



LPPD 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bundaran
Batara Guru



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

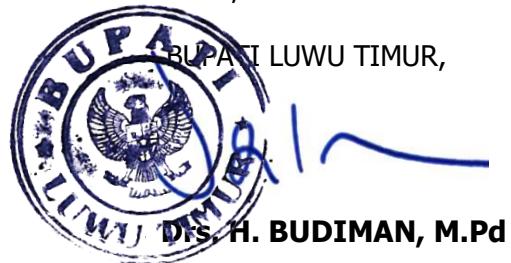
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang capaian kinerja, baik makro maupun capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna baik sistimatika penulisan maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini di masa akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malili, 26 Maret 2024





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	
1.1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	20
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	122

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1.Capaian Kinerja Makro	137
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	139
2.1.2. Angka Kemiskinan	142
2.1.3. Angka Penganguran	141
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi	143
2.1.5. Pendapatan Perkapita	150
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	151
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	153
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Hasil	153
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	219
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	220

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	318
3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	318
3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	320
3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat oleh Pemda	320
3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi oleh Pemda	327
3.3.3. Permasalahan dan Kendala	333
3.3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	333

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan	341
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	341
4.1.2. Target pencapaian penerapan SPM	341
4.1.3. Anggaran	341
4.1.4. Dukungan Personil	342
4.1.5. Hasil Capaian	343
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	344
4.2. Bidang Urusan Kesehatan	345
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	345
4.2.2. Target pencapaian penerapan SPM	345



4.2.3. Anggaran	346
4.2.4. Dukungan Personil.....	347
4.2.5. Hasil Capaian	347
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	349
4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	350
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	350
4.3.2. Target pencapaian penerapan SPM	350
4.3.3. Anggaran	350
4.3.4. Dukungan Personil.....	352
4.3.5. Hasil Capaian	352
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	353
4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	353
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	353
4.4.2. Target pencapaian penerapan SPM	354
4.4.3. Alokasi Anggaran	354
4.4.4. Dukungan Personil	354
4.4.5. Hasil Capaian	355
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	355
4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	356
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	356
4.5.2. Target pencapaian penerapan SPM	356
4.5.3. Alokasi Anggaran	357
4.5.4. Dukungan Personil	357
4.5.5. Hasil Capaian	358
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	359
4.6. Bidang Urusan Sosial	362
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	362
4.6.2. Target pencapaian penerapan SPM	362
4.6.3. Alokasi Anggaran	363
4.6.4. Dukungan Personil	363
4.6.5. Hasil Capaian	364
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	365
BAB V PENUTUP	366



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi	2
TABEL 1.2	Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur	3
TABEL 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur	4
TABEL 1.4	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Kab.Luwu Timur Tahun 2018-2023	5
TABEL 1.5	Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Tahun 2023	6
TABEL 1.6	Jumlah OPD Kabupaten Luwu Timur 2023	6
TABEL 1.7	Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur 2023	7
TABEL 1.8	Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kab.Lutim Th 2021-2023	8
TABEL 1.9	Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia & Jenis Kelamin Th 2021-2023	11
TABEL 1.10	Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Kab Lutim Th 2021-2023	11
TABEL 1.11	Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023	12
TABEL 1.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023.....	14
TABEL 1.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023.....	16
TABEL 1.14	Anggaran dan Realisasi Operasi Tahun Anggaran 2023.....	17
TABEL 1.15	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023.....	17
TABEL 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023	18
TABEL 1.17	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023	19
TABEL 1.18	Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	19
TABEL 1.19	Penjelasan Visi RPJMD RPJMD Kab Luwu Timur 2021-2026	36
TABEL 1.20	Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	38
TABEL 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	139
TABEL 2.2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yg bekerja selama seminggu Yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin Di kabupaten luwu timur tahunn 2023	142
TABEL 2.3	Data Pengangguran dan Pencari Kerja di Kab Luwu Timur 2023	142
TABEL 2.4	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas termasuk Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023	143
TABEL 2.5	Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur 2019-2023	145
TABEL 2.6	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023	147
TABEL 2.7	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kab. Luwu Timur Tahun 2019 – 2023	148
TABEL 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Kab Luwu Timur atas Harga Konstan 2020 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023	149
TABEL 2.9	PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	151



TABEL 2.10	Rincian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....	152
TABEL 2.11	Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro Kab. Luwu Timur Tahun 2022	153
TABEL 2.12	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Pendidikan	153
TABEL 2.13	Capaian Kinerja Kunci Hasil Pendidikan	157
TABEL 2.14	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Kesehatan	158
TABEL 2.15	Capaian Kinerja Kunci Hasil Kesehatan.....	159
TABEL 2.16	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pekerjaan Umum	161
TABEL 2.17	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pekerjaan Umum	170
TABEL 2.18	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Urusan Perumahan Rakyat.....	171
TABEL 2.19	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Urusan Perumahan Rakyat.....	172
TABEL 2.20	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	173
TABEL 2.21	Capaian Kinerja Kunci Hasil Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	175
TABEL 2.22	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Sosial	176
TABEL 2.23	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Sosial	179
TABEL 2.24	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Tenaga Kerja	179
TABEL 2.25	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Tenaga Kerja	185
TABEL 2.26	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnaK	186
TABEL 2.27	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnaK	187
TABEL 2.28	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pangan	188
TABEL 2.29	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pangan	188
TABEL 2.30	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanahan	189
TABEL 2.31	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanahan	189
TABEL 2.32	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Lingkungan Hidup	190
TABEL 2.33	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Lingkungan Hidup	191
TABEL 2.34	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	191
TABEL 2.35	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	191
TABEL 2.36	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	192
TABEL 2.37	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)	192
TABEL 2.38	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Statistik	192
TABEL 2.39	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Statistik	193
TABEL 2.40	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	193
TABEL 2.41	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	194



TABEL 2.42	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Komunikasi dan Informatika	195
TABEL 2.43	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Komunikasi dan Informatika	200
TABEL 2.44	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perhubungan	200
TABEL 2.45	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perhubungan	200
TABEL 2.46	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga	201
TABEL 2.47	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kepemudaan dan Olahraga	201
TABEL 2.48	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	201
TABEL 2.49	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	204
TABEL 2.50	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Penanaman Modal	204
TABEL 2.51	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Penanaman Modal	205
TABEL 2.52	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Persandian	205
TABEL 2.53	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Persandian	206
TABEL 2.54	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kebudayaan	206
TABEL 2.55	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kebudayaan	208
TABEL 2.56	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perpustakaan	208
TABEL 2.57	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perpustakaan	209
TABEL 2.58	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kearsipan	209
TABEL 2.59	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kearsipan	210
TABEL 2.60	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kelautan dan Perikanan	210
TABEL 2.61	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Kelautan dan Perikanan	211
TABEL 2.62	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pariwisata	211
TABEL 2.63	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pariwisata	212
TABEL 2.64	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pertanian	212
TABEL 2.65	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Pertanian	213
TABEL 2.66	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perdagangan	213
TABEL 2.67	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perdagangan	215
TABEL 2.68	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perindustrian	215
TABEL 2.69	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Perindustrian	216
TABEL 2.70	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Transmigrasi	217
TABEL 2.71	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	218
TABEL 2.72	Capaian Kinerja Kunci Hasil Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	218
TABEL 2.73.	Capaian Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kehutanan	218
TABEL 2.74	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	219
TABEL 2.75	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	221
TABEL 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi oleh Dinas Tenaga Kerja	



	Dan Transmigrasi Kab. Luwu Timur 2023	321
TABEL 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian Oleh Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur 2023	324
TABEL 3.3	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur 2023	328
TABEL 3.4	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur 2023	330
TABEL 3.5	Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Yang dilaksanakan oleh Kab. Luwu Timur 2023	333
TABEL 4.1	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan 2023	341
TABEL 4.2	Dukungan Personil Bidang Urusan Pendidikan	342
TABEL 4.3	Realisasi target SPM Urusan Pendidikan	343
TABEL 4.4	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan 2023	346
TABEL 4.5	Dukungan Personil Urusan Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023	347
TABEL 4.6	Realisasi target capaian SPM Urusan Bidang Kesehatan	347
TABEL 4.7	Alokasi anggaran Urusan Pekerjaan Umum	350
TABEL 4.8	Dukungan Personil Urusan Pekerjaan umum Kab.Luwu Timur Tahun 2023	352
TABEL 4.9	Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum	352
TABEL 4.10	Alokasi anggaran Urusan Perumahan Rakyat	354
TABEL 4.11	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	355
TABEL 4.12	Realisasi Target SPM Urusan Perumahan Rakyat	355
TABEL 4.13	Alokasi Anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	357
TABEL 4.14	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	357
TABEL 4.15	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	358
TABEL 4.16	Alokasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2023	363
TABEL 4.17	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial	363
TABEL 4.18	Realisasi Target SPM Urusan Sosial	364



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1	Perkembangan IPM Kab Luwu Timur Tahun 2020 – 2023	138
GRAFIK 2.2	Garis Kemiskinan di Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2023	140
GRAFIK 2.3	Jumlah penduduk Miskin di Kab. Luwu Timur Tahun 2017-2023	141
GRAFIK 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur dan Prov. Sulsel Tahun 2019-2023	145
GRAFIK 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur 2019-2023.....	146
GRAFIK 2.6	Gini Rasio Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2023	152



DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

GAMBAR 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur	3
DIAGRAM 2.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Luwu Timur, 2019-2023	150



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Keberadaan Kabupaten Luwu Timur tidak terlepas dari Sejarah Tanah Luwu yang kemunculannya berawal jauh sebelum masa Pemerintahan Hindu Belanda menguasai nusantara. Sebelumnya Luwu telah menjadi sebuah kerajaan yang memiliki wilayah hingga ke daerah Kolaka (Propinsi Sulawesi Tenggara) dan Poso (Propinsi Sulawesi Tengah). Sejarah Luwu ini dikenal pula dengan nama Tanah Luwu yang dihubungkan dengan nama La Galigo dan Sawerigading. Menyusul setelah Belanda berkuasa penuh di Luwu, maka wilayah Kerajaan Luwu mulai diperkecil, Kemudian dibentuk satu afdeling di Luwu yang dibagi menjadi 5 (lima) *Onder Afdeling* salah satunya *Onder Afdeling* Malili yang ibukotanya terletak di Malili.

Pada tahun 1959 di tetapkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (L.N. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa semua Daerah *Eks Onder-Afdeling* di Sulawesi Selatan, termasuk di antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten. Namun pada realitasnya, ternyata Daerah *Ex Onder Afdeling* yakni Malili dan 2 *Onder-Afdeling* lainnya belum dapat diwujudkan pembentukannya, terutama disebabkan karena alasan situasi keamanan yang belum memungkinkan pada waktu itu.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah memberikan ruang kebebasan lebih luas terhadap wacana pemekaran Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan sebagai momentum yang kuat dalam melanjutkan perjuangan aspirasi Masyarakat *Ex Kewedanaan* Malili untuk membentuk sebuah Kabupaten.

Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas sebelah utara dan sebelah timur adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Batas sebelah selatan adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah barat kabupaten ini adalah Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, kecamatan Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalena, Towuti, Nuha, Wasponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.



b. Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara $2^{\circ}03'00''$ – $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ – $121^{\circ}47'27'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 Km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut :

Tabel.1.1
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi.

Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Kelurahan	Jumlah Desa
Burau	256,23	3,69		18
Wotu	130,52	1,88		17
Tomoni	230,09	3,31	1	11
Tomoni Timur	921,2	13,26		8
Angkona	147,24	2,12		10
Malili	921,2	13,26	1	16
Towuti	1.820,48	26,21		18
Nuha	808,27	11,64	1	5
Wasuponda	1.244,00	17,91		6
Mangkutana	1.300,96	18,73		11
Kalaena	41,98	0,60		7
Jumlah	6.944,88	112,63	3	125

Sumber : Bagian Pemerintahan Pemda Luwu Timur 2023

Kabupaten Luwu Timur dengan Ibukota Malili memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Bagian Pemerintahan Pemda Luwu Timur 2023

Terdapat 14 sungai yang mengalir di Wilayah Kabupaten Luwu Timur, 9 (sembilan) diantaranya adalah sungai utama. Sungai terpanjang adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 Km. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Panjang sungai utama Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Tabel.1.2
Panjang Sungai Utama di Kabupaten Luwu Timur.

NAMA SUNGAI	DAERAH ALIRAN	Panjang Sungai (Km)
Larona	Kec. Nuha	60
Ussu	Kec. Nuha, Kec. Malili	30
Cerekang	Kec. Nuha, Kec. Malili	50
Angkona	Kec. Nuha, Kec. Malili, Kec. Angkona	48
Kalaena	Kec. Mangkutana	85
Powosoi	Kec. Mangkutana, Kec. Wotu	18
Senggeni	Kec. Mangkutana, Kec. Wotu	24
Bambalu	Kec. Wotu	15
Pongkeru	Kec. Malili	33,5

Sumber: BPS Kab Luwu Timur (Profil Kab Luwu Timur 2023)

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano (dengan luas 245,70 km²), Danau Mahalona



(25 km²), Danau Towuti (585 km²), Danau Tapparang Masapi (2,43 km²) dan Danau Lantoa (1,72 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha, sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Walaupun struktur masyarakat cukup heterogen dan multi etnis dengan wilayah yang relatif luas dan berbatasan dengan dua wilayah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022-2023 (kondisi pertengahan tahun/Juni) sebanyak 305.521 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,02. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebanyak 5.061 atau sebesar 1,67 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 mencapai 43,99 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 312,94 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 17,28 jiwa/km².

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu perpindahan penduduk (mutasi) dari atau/keluar Kabupaten Luwu Timur, kelahiran dan kematian. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data semester II Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk, sebanyak 313.404 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat pertumbuhan jumlah penduduk sebesar % atau bertambah sebanyak 4.874 Jiwa.

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan terhadap rasio besaran berdasarkan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur

No	KECAMATAN	Jumlah	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Burau	35.655	1,58	11,38	119,60
2	Wotu	34.723	2,94	11,08	236,52
3	Tomoni	27.727	3,56	8,85	110,24
4	Tomoni Timur	13.900	1,84	4,44	281,21
5	Angkona	25.814	2,02	8,24	87,81



6	Malili	45.853	5,60	14,63	61,39
7	Towuti	48.076	10,27	15,34	23,13
8	Nuha	24.486	3,08	7,81	32,36
9	Wasuponda	22.357	1,74	7,13	24,28
10	Mangkutana	22.551	0,51	7,20	20,14
11	Kalaena	12.262	-0,28	3,91	144,38
KAB. LUWU TIMUR		313.404	3,76	100.00	46,44

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2023 (BPS Kab.Luwu Timur)

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2023

KELOMPOK UMUR	Jumlah Penduduk					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	25.037	25.568	29.173	29.566	30.016	26.211
5-9	29.907	29.793	25.346	25.172	25.401	30.010
10-14	30.850	30.454	28.467	27.988	27.411	30.158
15-19	30.223	30.681	27.119	27.298	27.602	24.063
20-24	26.058	27.005	25.847	26.013	26.263	30.050
25-29	23.901	22.668	24.817	25.042	25.357	26.342
30-34	24.586	22.473	23.523	23.893	24.349	22.703
35-39	25.541	24.480	23.958	24.307	24.779	23.404
40-44	21.511	22.461	22.502	22.874	23.292	24.555
45-49	18.076	18.452	18.134	18.601	19.150	20.987
50-54	12.442	13.887	13.782	14.191	14.654	17.769
55-59	9.742	9.940	10.827	11.237	11.685	11.892
60-64	7.298	7.687	8.247	8.629	9.070	8.693
65+	5.764	14.861	6.497	6.791	7.117	6.384
70-74	3.438	-	4.174	4.381	4.625	4.470
75+	4.657	-	4.328	4.528	4.750	5.433
Jumlah	273.994	300.410	296.741	300.511	305.521	313.404

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam angka 2023 (hasil sensus penduduk)

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara $2^{\circ}03'00''$ – $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 Km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa. dan 3 Kelurahan, Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Dan Kecamatan terkecil yakni Kecamatan Kalaena dengan luas 41,98 km². Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut:



Tabel 1.5
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km²)	Percentase (%)	Kelurahan	Jumlah Desa
Burau	Burau	256,23	3,69	-	18
Wotu	Bawalipu	130,52	1,88	-	17
Tomoni	Mandiri	230,09	3,31	1	11
Tomoni Timur	Kertoraharjo	921,2	13,26	-	8
Angkona	Solo	147,24	2,12	-	10
Malili	Puncak Indah	921,2	13,26	1	16
Towuti	Langkea Raya	1.820,48	26,21	-	18
Nuha	Sorowako	808,27	11,64	1	5
Wasuponda	Ledu ledu	1.244,00	17,91	-	6
Mangkutana	Wonorejo	1.300,96	18,73	-	11
Kalaena	Kalaena kiri	41,98	0,60	-	7
Jumlah		6.944,88	112,63	3	125

Sumber : Bagian Pemerintahan Pemda Luwu Timur Tahun 2023.

e. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, Dinas sebanyak 21, Badan 6, Kecamatan 11 kelurahan 3 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Jumlah OPD Kabupaten Luwu Timur 2023

No	Unit Kerja
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pendapatan Daerah
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
14	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
15	Dinas Kesehatan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Kelautan
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
20	Dinas Perhubungan



21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian
24	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
26	Satuan Polisi Pamong Praja
27	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
30	Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo
31	Kec. Burau
32	Kec. Wotu
33	Kec. Tomoni
34	Kec. Tomoni Timur
35	Kec. Mangkutana
36	Kec. Kalaena
37	Kec. Angkona
38	Kec. Malili
39	Kec. Wasuponda
40	Kec. Towuti
41	Kec. Nuha
42	Kelurahan Magani
43	Kelurahan Tomoni
44	Kelurahan Malili

Sumber : Bagian organisasi Setkab Luwu Timur

Merujuk pada Pasal (1) Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 sebanyak 5.101 orang yang terdiri dari 3.795 orang PNS dan 1.306 orang PPPK. Bertambah 595 orang jika dibandingkan dengan data ASN pada tahun 2022 yaitu sebanyak 4.506 orang.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur 2023

Golongan	I	6
	II	281
	III	2538
	IV	970
Jenis Kelamin	Laki-laki	1.354
	Perempuan	2.441
Eselon	II-A	1
	II-B	31
	III-A	53
	III-B	104
	IV-A	175
	IV-B	43
	Jumlah Eselon	407
	Non eselon	3388
	SD	3
	SLTP	6



Pendidikan	SLTA	314
	D1-DIII	643
	S1	2.667
	S2	161
	S3	1
Fungsional Tertentu	Ahli Utama	1
	Ahli Madya	708
	Ahli Pertama	667
	Ahli Muda	1029
	Penyelia	171
	Mahir	195
	Pelaksana	147
	Pelaksana Pemula	0

Sumber: BPKSDM Luwu Timur Tahun 2023

PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur ini tersebar di beberapa unit kerja/Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah PNS Kabupaten Luwu Timur tahun 2022-2023 yang tersebar di beberapa OPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8
Jumlah PNS Berdasarkan OPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		
		2021	2022	2023
1	SEKRETARIAT DAERAH	81	82	80
2	SEKRETARIAT DPRD	22	21	22
3	INSPEKTORAT	44	45	48
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	56	48
5	DINAS KESEHATAN	69	73	73
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	85	87	88
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	19	18	19
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	40	39	39
9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9	14	20
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20	19	18
11	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	27	25	23
12	DINAS PERIKANAN	30	24	24
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22	25	25
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	18	18
15	DINAS PEMBERDAYAAN	17	16	15



MASYARAKAT DAN DESA				
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17	19	20
17	DINAS PERHUBUNGAN	27	28	27
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN	21	21	22
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	22	23	26
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	21	19	18
21	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	23	21	20
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30	28	28
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	193	196	190
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26	26	25
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34	27	28
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11	24	25
27	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28	27	25
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	11	12
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11	12	13
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO	223	228	228
31	KEC. BURAU	22	23	19
32	KEC. WOTU	22	21	19
33	KEC. TOMONI	19	17	15
34	KEC. MANGKUTANA	18	18	18
35	KEC. TOMONI TIMUR	15	15	14
36	KEC. KALAENA	16	17	13
37	KEC. ANGKONA	17	19	16
38	KEC. MALILI	16	14	13
39	KEC. WASUPONDA	16	16	16
40	KEC. NUHA	16	15	14



41	KEC. TOWUTI	27	25	20
42	KEL. MAGANI	7	8	7
43	KEL. MALILI	5	7	8
44	KEL. TOMONI	10	11	9
45	PUSKESMAS BURAU	43	40	36
46	PUSKESMAS WOTU	55	60	58
47	PUSKESMAS TOMONI	60	57	59
48	PUSKESMAS MANGKUTANA	58	57	56
49	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	43	42	42
50	PUSKESMAS KALAENA	37	38	40
51	PUSKESMAS ANGKONA	41	40	38
52	PUSKESMAS LAKAWALI KEC. MALILI	29	37	34
53	PUSKESMAS MALILI	74	76	79
54	PUSKESMAS LAMPIA KEC. MALILI	35	33	33
55	PUSKESMAS WASUPONDA	47	48	46
56	PUSKESMAS PARUMPANAI KEC. WASUPONDA	17	19	18
57	PUSKESMAS NUHA	62	62	59
58	PUSKESMAS WAWONDULA KEC. TOWUTI	53	55	56
59	PUSKESMAS TIMAMPU KEC. TOWUTI	31	32	35
60	PUSKESMAS MAHALONA KEC. TOWUTI	21	22	18
61	PUSKESMAS BANTILANG KEC. TOWUTI	21	24	22
62	PUSKESMAS BONE PUTE	24	33	36
63	TAMAN KANAK KANAK (TK)	47	47	45
64	SEKOLAH DASAR (SD)	1095	1061	1007
65	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	559	530	510
JUMLAH		3935	3911	3795

Sumber: BPKSDM Luwu Timur Tahun 2023

Klasifikasi PNS menurut usia berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur tahun 2023, memperlihatkan bahwa usia 36 – 40 tahun merupakan usia yang paling banyak dari jumlah seluruh PNS yaitu mencapai 836 orang (22,03%). PNS dengan usia 61-65 tahun sebanyak 1 orang (0,03%) merupakan PNS dengan usia yang paling sedikit. Klasifikasi PNS berdasarkan usia dan jenis kelamin tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.9
Klasifikasi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021-2023

No	Usia	Tahun									
		2021			2022			2023			
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	20 - 25	5	9	14	7	18	25	1	7	8	
2	26 - 30	45	109	154	55	124	179	42	108	150	
3	31 - 35	94	291	385	98	301	399	90	222	312	
4	36 - 40	222	640	862	223	641	864	212	624	836	
5	41 - 45	288	542	830	289	542	831	271	543	814	
6	46 - 50	281	353	634	279	352	631	273	392	665	
7	51 - 55	280	343	623	277	343	620	273	356	629	
8	56 - 60	218	203	421	186	176	362	191	189	380	
9	61 - 65	9	3	12	0	0	0	1	0	0	
Jumlah Total				3935			3911			3795	

Sumber: BPKSDM Luwu Timur Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, usia pensiun PNS bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama dan pejabat fungsional keterampilan adalah berusia 58 tahun. usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta usia 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Dari tabel 1.9 tersebut diatas, terdapat pengurangan jumlah pegawai pada tahun 2023 sebanyak 116 orang karena sudah masuk masa pension serta terdapat juga meninggal dunia.

Sementara, ASN Kabupaten Luwu Timur dengan status PPPK sampai dengan tahun 2023 berjumlah 1.306 orang. Bertambah 711 orang jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berjumlah 595 orang. Jumlah PPPK berdasarkan kualifikasi jabatan, pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1.10
Jumlah PPPK Berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2023

No	Kualifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Se-derajat		SLTP/ Se-derajat		SD/ Se-derajat				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
Tahun 2021																
1	Kesehatan					1	1							1	1	2
2	Guru				22	85								22	85	107
3	Teknis			3				1					3	1	4	
Jumlah		0	0	25	85	1	1	0	1	0	0	0	0	26	87	113
Tahun 2022																
1	Guru			93	387									93	387	479
Jumlah		0	0	93	389	0	0	0	0	0	0	0	0	93	389	482
Tahun 2023																
1	Kesehatan			17	71	18	145							35	216	251
2	Guru			86	318									86	318	404
3	Teknis			24	32			3						27	32	59
Jumlah		0	0	127	421	18	145	3	1	0	0	0	0	148	566	714
Total		0	0	244	893	19	146	3	1	0	0	0	0	266	1040	1306

Sumber: BPKSDM Luwu Timur Tahun 2023



Pada tahun 2021, pengangkatan PPPK dibuka untuk 3 jenis formasi yakni formasi Kesehatan, Guru dan Teknis. Adapun tenaga PPPK yang lulus untuk formasi Kesehatan sebanyak 2 orang, guru sebanyak 107 orang dan teknis sebanyak 4 orang. Sementara pada tahun 2022 formasi penerimaan hanya terbuka untuk guru dan yang dinyatakan lulus sebanyak 479 orang. Kemudian pada tahun 2023 formasi penerimaan kembali dibuka untuk 3 jenis formasi yakni formasi Kesehatan, Guru dan Teknis. Untuk formasi Kesehatan yang diterima sebanyak 251 orang, formasi guru sebanyak 404 orang, dan formasi Teknis sebanyak 59 orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 ditetapkan bahwa target total Pendapatan sebesar Rp1.776.608.283.423,00, dan targer tersebut dapat terealisasi dengan capaian sebesar Rp1.794.735.970.431,33 atau 101,02%. Komponen jenis pendapatan tersebut diurai sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah yang memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah meliputi 22,21% dari total realisasi Pendapatan tahun 2023.

Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.11
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	390.691.355.806,00	394.961.876.615,58	101,09
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	238.588.526.149,00	246.712.996.066,59	103,41
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00
4.1.4	Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.336.593.699,00	121.679.188.021,99	98,66

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)



Dari tabel di atas terlihat bahwa total Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp390.691.353.806,00 dengan realisasi sebesar Rp394.961.876.615,58 atau 101,09% yang terdiri dari Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp238.588.526.149,00 dapat direalisasi sebesar Rp246.712.966.066,59 atau 103,41%. Dimana Pajak Daerah yang berkontribusi lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan untuk Pajak Daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak PBB-P2. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp5.177.658.500,00 dengan realisasi sebesar Rp2.981.187.069,00 atau 57,58%. Dari capaian Retribusi Daerah ini yang tidak tercapai sesuai target di pengaruhi oleh tidak terpenuhinya target Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, untuk Retribusi jasa usaha seperti Retribusi penyewaan kekayaan daerah, Retribusi Terminal dan Restribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Perizinan Tertentu yang bersumber dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dianggarkan sebesar Rp 23.588.575.458,00 terealisasi sebesar Rp23.588.575.458,00 atau 100,00%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp123.336.593.699,00 terealisasi sebesar Rp121.679.118.021,99 atau 98,66%,.

Berdasarkan nilai realisasi, maka kontribusi masing-masing jenis pendapatan terhadap total Penerimaan PAD yaitu, persentase tertinggi terdapat pada Pajak Daerah sebesar 62,47%, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 30,81%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5,97% dan Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,75% dari realisasi anggaran pendapatan asli daerah.

Terhadap beberapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya lebih dari 100% dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya jumlah kunjungan pada objek pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi yang disebabkan karena adanya kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023, jumlah transaksi pembayaran pajak daerah yang melampaui dari target yang ditetapkan dan penerapan system pembayaran non tunai yang maksimal penggunaannya serta penyebarluasan canal pembayaran sehingga memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang diterima dari Pemerintah pusat maupun antar daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik. Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai



kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan transfer meliputi 74,88% dari total realisasi pendapatan tahun 2023. Target dan Realisasi Pendapatan dari Dana Transfer dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.2	Pendapatan Transfer	1.323.464.643.617,00	1.331.700.405.097,75	100,62
4.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.073.605.505.598,00	1.080.940.374.581,00	100,68
4.2.1.1	Dana perimbangan	950.972.873.598,00	958.307.742.581,00	100,77
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	251.916.136.898,00	265.544.756.904,00	105,41
4.2.1.1.2	Umum-Dana Dana Transfer Alokasi Umum (DAU)	538.151.782.000,00	538.151.648.274,00	100,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	25.658.610.700,00	25.834.967.779,00	100,69
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.246.344.000,00	128.776.369.624,00	95,22
4.2.1.5	Dana Desa	110.838.130.000,00	110.838.130.000,00	100,00
4.2.1.2	Dana Insentif Desa	11.794.502.000,00	11.794.502.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	249.859.138.019,00	250.760.030.516,75	100,36
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	233.198.402.019,00	243.656.469.516,75	104,48
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	16.660.736.000,00	7.103.561.000,00	42,64

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas Total Anggaran Dana Transfer Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.323.464.643.617,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.331.700.405.097,75 atau 100,62%. Terdiri dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 950.972.873.598,00 dan terealisasi sebesar Rp.958.307.742.581,00, atau 100,68%. Dana Transfer berupa Dana Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp 251.916.136.898,00 terealisasi sebesar Rp 265.544.756.904,00 atau 105,41%, Dana alokasi umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp 538.151.782.000,00 terealisasi sebesar Rp 538.151.648.274,00 atau 100,00%, Dana alokasi khusus (DAK) Fisik dianggarkan sebesar Rp 25.658.610.700,00 terealisasi sebesar Rp 25.834.967.779,00 atau 100,69%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dianggarkan sebesar Rp 135.246.344.000,00 terealisasi sebesar



Rp.128.776.369.624,00 atau 95,22%. Dana insentif daerah ditargetkan Rp11.794.502.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.794.502.000,00 atau 100,00%. dan Dana Desa ditargetkan sebesar Rp 110.838.130.000,00 terealisasi sebesar Rp 110.838.130.000,00 atau 100,00%.

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 249.859.138.019,00 dan terealisasi sebesar Rp 250.760.030.516,75 atau 100,36%, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak daerah dianggarkan Rp.233.198.402.019,00 dan terealisasi sebesar Rp.243.656.469.516,75 atau 104,44% dan bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp 16.660.736.000,00 terealisasi Rp 7.103.561.000,00 atau sebesar 42,64%.

Untuk Terhadap Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 jenis Bantuan Keuangan yaitu Bantuan Keuangan Khusus berupa Kesehatan Gratis dan Bantuan Keuangan Umum berupa bantuan untuk pekerjaan Pembangunan ruang terbuka public (Malili River site) Tahun 2023. Untuk tidak tercapainya realisasi Bantuan Keuangan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan Gratis

Untuk Bantuan Keuangan Khusus Kesehatan Gratis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum menyalurkan ke Bantuan Kesehatan Gratis Triwulan III dan IV Tahun 2023 sehingga dalam Laporan Keuangan TA. 2023 dicatat sebagai Piutang sebesar Rp2.909.718.000,00

b. Bantuan Keuangan Umum untuk Pembangunan ruang terbuka public (Malili River site)

Untuk pekerjaan Pembangunan ruang terbuka public (Malili River site) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berkontrak dengan Pihak Ketiga an CV. Citra Lestari Mandiri sesuai kontrak nomor 602.1/10/SPKONT/CK.ID/PUPR/IX/2023 tgl 21 September 2023 dengan nilai kontrak Rp7.387.684.463,55. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menerima penyaluran BKK tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp4.193.843.000,00. Untuk tahap kedua Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengajukan permohonan pencairan namun hingga 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencairkan bantuan tersebut sehingga di dalam Laporan Keuangan TA. 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencatatkan sebagai piutang pada Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp3.693.841.464,00.

c) Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen Pendapatan ini meliputi 2,91% dari total realisasi pendapatan tahun 2023. Adapun rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.13

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4.3	Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.452.286.000,00	51.688.884.198,00	82,77
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	11.548.286.000,00	5.511.525.592,00	47,73
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri	50.904.000.000,00	46.177.358.606,00	90,71

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Dari tabel di atas, penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 62.452.286.000,00 terealisasi sebesar Rp 51.688.884.198,00 atau 82,77%. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp 11.548.286.000,00 terealisasi sebesar Rp5.511.525.592,00 atau 47,73% dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri ditargetkan sebesar Rp50.904.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.177.358.606,00 atau 90,71%.

Untuk Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat disebabkan Penerimaan Hibah READSI-IFAD tidak tersalurkan sepenuhnya disebabkan terdapat Belanja Alsintan yang tidak realisasi karena ketersediaan Dana Sharing Kelompok Tani yang sebesar 30 persen tidak tersedia, sehingga tidak dapat di realisasikan dan terdapat Belanja Honor Narasumber Pelatihan Sekolah Lapang Tidak terealisasi karena ada beberapa Narasumber tidak bisa dibayarkan seperti Narasumber Dari PT MARS yang tidak mau untuk dibayarkan karena Salah satu Bentuk kerjasama Antara PT MARS dan Program READSI, termasuk narasumber yang berasal dari SKPD (Dinas Pertanian itu sendiri) serta untuk Hibah dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri disebabkan masih terdapat Hibah Scrap periode Nopember 2023 dan Desember 2023 yang belum dibayarkan oleh PT. Vale Indonesia Tbk. Kendala/hambatan yang dihadapi karena proses pencairan Hibah pada PT. Vale Indonesia Tbk membutuhkan waktu yang Panjang karena harus mendapatkan persetujuan (legal standing) dari Vale yang ada di Luar Negeri sehingga akan ditagihkan kembali pada Tahun 2024.

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.937.326.930.321,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.837.841.042.138,01 atau mencapai 94,86%. Realisasi Komponen Belanja daerah tersebut diurai sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari



Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.266.763.111.781,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.192.242.124.850,66 atau 94,12%. Realisasi Belanja Operasi ini meliputi 64,88% dari total realisasi belanja Tahun 2023. Uraian realisasi belanja operasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Anggaran dan Realisasi Operasi Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.1	Belanja Operasi	1.266.763.111.781,00	1.192.242.124.850,66	94,12%
5.1.1	Belanja Pegawai	578.126.606.600,00	537.360.420.558,47	92,95
5.1.3	Belanja Barang dan Jasa	604.888.818.571,00	572.932.914.512,27	94,72
5.1.5	Belanja Hibah	70.765.886.585,00	77.372.989.779,92	91,23
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.979.800.025,00	4.575.800.000,00	91,89

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Belanja Berdasarkan tabel di atas, belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp.578.128.606.600,00 terealisasi Rp.537.360.420.558,47 atau 92,95%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 604.888.818.571,00 terealisasi Rp 572.932.914.512,27 atau 94,72%, Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp 78.765.886.585,00 terealisasi Rp 77.372.989.779,92 atau 98,23% dan Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp. 4.979.800.025,00 dan terealisasi Rp 4.575.800.000,00 atau 91,89%.

b) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.334.306.920.202,00 terealisasi sebesar Rp.313.767.765.805,75 atau 93,86% sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.2	Belanja Modal	334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	93,86
5.2.1	Belanja Modal Tanah	707.459.000,00	343.256.122,00	48,52



5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.815.482.938,00	46.103.713.018,52	94,44
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.701.868.665,00	105.765.564.552,59	96,41
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	173.095.468.299,00	160.649.281.012,64	92,81
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.986.641.300,00	905.951.100,00	45,60

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

Berdasarkan tabel di atas, belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah yang ditargetkan sebesar Rp 707.459.000,00 terealisasi Rp 343.256.122,00 atau 48,52%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp 48.815.482.938,00 terealisasi Rp 46.103.713.018,52 atau 94,44%, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp 109.701.868.665,00 terealisasi Rp 105.765.564.552,59 atau 96,41%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi ditargetkan Rp 173.095.468.299,00 terelisasi Rp 160.649.281.012,64 atau 92,81% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 1.986.641.300,00 terealisasi Rp 905.951.100,00 atau 45,60%.

c) Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 548.000.000,00 atau 10,96%. Realisasi tidak tercapai karena anggarannya hanya bersifat disediakan dan direalisasikan sesuai mekanisme belanja tak terduga antara lain penting dan mendesak sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	548.000.000,00	10,96
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	548.000.000,00	10,96

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI)

d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, Belanja Transfer ditargetkan Rp331.256.898.338,00 terealiasi sebesar Rp 331.256.151.481,60 atau 100,00%. Realisasi Belanja transfer meliputi 18,01% dari



total realisasi belanja tahun 2023. Uraian realisasi belanja transfer diuraikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5.4	BELANJA TRANSFER	331.256.898.338,00	331.256.151.481,60	100,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	20.599.461.495,00	20.599.397.923,00	100,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	310.657.436.843,00	310.656.753.558,60	100,00

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI).

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran sebesar Rp(59.462.876.226,68). Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi Keuangan Daerah untuk menutupi selisih antara Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. dengan rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	100,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya	173.616.646.898,00	173.616.122.250,24	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	82,00
6.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	82,00
	Pembiayaan Netto	160.718.646.898,00	163.040.122.250,24	101,44
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	0	103.577.246.023,56	0

Sumber : LRA BPKD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (laporan keuangan belum diaudit BPK-RI).

Beberapa hal yang menjadi bagian dari pembentuk SiLPA yaitu tingkat capaian realisasi anggaran belanja tidak mencapai 100 persen, sementara realisasi pendapatan tercapai 100 persen atau lebih.



a) Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 173.616.646.898,00 dengan realisasi sebesar Rp 173.616.122.250,24 atau 100%. Jumlah Penerimaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 12.898.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.576.000.000,00 atau 82,00%. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan Daerah di maksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk maksud tersebut, perencanaan pembangunan daerah memuat hal-hal yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan

1) Kemiskinan Dan Taraf Hidup Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur saat ini menempati peringkat keempat di Sulawesi Selatan (Kota dan Kabupaten) dengan nilai 73,22 (2020), 73,34 (2021) dan 73,92 (2022). Meskipun nilai IPM ini merupakan peringkat tertinggi di antara semua Kabupaten, namun tetap merupakan tantangan untuk mencapai tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi. Masalah terkait peningkatan kualitas manusia adalah penguasaan pengetahuan yang diukur dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah; peluang berumur panjang yang



diukur dengan angka harapan hidup; dan daya beli yang diukur dengan Pengeluaran Perkapita. Pada tahun 2022, Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8,92 tahun, Harapan Lama Sekolah adalah 13,00 tahun, Angka Harapan Hidup adalah 70,94 tahun dan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 13,058 juta/orang/tahun.

Meskipun IPM sudah di atas rata-rata Provinsi dan Nasional serta PDRB Perkapita ADHB Tahun 2022 yang mencapai 92,98 juta/orang/tahun yang tergolong cukup tinggi, namun belum berbanding lurus jika dihubungkan dengan tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator taraf hidup yang pada Tahun 2022 mencapai 6,81% (20,89 ribu orang) dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 394.158/kapita/bulan. Sementara itu salah satu ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata adalah Gini Rasio, dimana pada Tahun 2022 Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan menjadi 0,394. Permasalahan kemiskinan dan distribusi pendapatan memiliki keterkaitan erat, dimana semakin sejahteranya dari kondisi miskin maka akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk sehingga diharapkan pengentasan kemiskinan juga akan turut menurunkan Gini Rasio di daerah.

2). Pertumbuhan Perekonomian Daerah Yang Fluktuatif

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur selama periode lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dimana pada tahun 2022 mencapai 50,04 persen. Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 16,03 triliun rupiah menjadi 16,35 triliun rupiah sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 1,99 persen. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Luwu Timur pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 50,04 persen (angka tersebut meningkat dari 47,77 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 21,89 persen (angka ini menurun dari 24,23 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,69 persen (angka ini meningkat dari 9,25 persen di tahun 2018). Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor menempati posisi keempat, yaitu sebesar 3,79 persen (angka ini menurun dari 3,80 persen di tahun 2018). Terakhir lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 3,37 persen (angka ini menurun dari 3,39 persen di tahun 2018). Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian; serta Konstruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Konstruksi mengalami penurunan peranan PDRB dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan memiliki peranan kurang dari 5 persen. Salah satu penyebab meningkatnya peranan Pertambangan dan Penggalian adalah meningkatnya produksi pada lapangan usaha tersebut. Kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga



menjadi penyebab peningkatan peranan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian.

Walapun peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan, namun meningkatnya peranan lapangan usaha lain berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan menjadi 4,48 persen dengan jumlah penganggur sebanyak 7.230 orang.

3). Belum Optimalnya Cakupan Dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Infrastruktur memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Namun demikian, upaya-upaya itu belum mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan infrastruktur daerah. Infrastruktur belum mampu memberi dukungan maksimal terhadap upaya menciptakan transportasi yang aman, efisien dan efektif.

Permasalahan transportasi darat adalah tingginya tingkat kerusakan jalan akibat belum optimalnya pemeliharaan dan peningkatan jalan serta masih belum optimalnya akses jalan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata. Daya dukung sumber air baku untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat juga belum optimal yang disebabkan karena keterbatasan anggaran. Saluran irigasi belum mampu memenuhi kebutuhan air bagi kegiatan budidaya pertanian. Masih tersedia lahan potensial yang cukup untuk perluasan areal budidaya pertanian namun belum terlayani jaringan irigasi teknis. Selain itu ketersediaan air baku juga belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih yang terus meningkat sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk.

Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hunian layak masih dihadapkan pada rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak memiliki rumah. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat terus meningkat yang tidak diiringi dengan kemampuan memiliki rumah. Hal ini memberikan dampak pada penurunan kualitas rumah dan menciptakan rumah tidak layak huni baru. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana dasar memberikan dampak pada tidak berkurangnya lingkungan kumuh bahkan memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru. Kinerja pelayanan air bersih/minum masih perlu ditingkatkan dalam rangka mencapai target universal access. Demikian juga pada sektor sanitasi yang meliputi limbah domestik, sampah dan drainase. Prasarana pemukiman lain seperti jalan lingkungan, talud pengaman permukiman dari longsor dan abrasi serta ketersediaan listrik juga belum menunjukkan kinerja optimal sehingga memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan.



4). Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Memuaskan

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan Pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pada tahun 2022, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh Nilai 64,26 dengan Predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "BAIK", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian kecil Unit Kerja Utama namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 menitikberatkan pada implementasi Akuntabilitas Kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun Level Perangkat Daerah. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 memperoleh peningkatan nilai 57,68 dengan predikat "CC" dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 dengan nilai 53,57. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil

5). Degradasi Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 mencapai 79,71 atau mengalami penurunan dari tahun 2021 mencapai 84,085. Penurunan IKLH Kabupaten Luwu Timur tersebut dipengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Air dari 80,69 di tahun 2021 menjadi 66,52 di tahun 2022, Indeks Kualitas Udara dari 97,62 di tahun 2021 menjadi 94,27 di tahun 2022 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari 76,48 di tahun 2021 menjadi 75,45 di tahun 2022. Walaupun mengalami penurunan tetapi kategori Indeks masih dalam kategori "BAIK", namun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tetap harus mengantisipasi ancaman degradasi lingkungan. Degradasi memiliki makna penurunan, kemerosotan, maupun kemunduran. Jadi, degradasi lingkungan adalah kondisi menurunnya kualitas lingkungan akibat kerusakan yang terjadi dan berakibat pada berkurangnya fungsi komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Penyebab Degradasi Lingkungan Menurunnya fungsi komponen-komponen lingkungan tersebut ditengarai oleh banyak hal di antaranya pengambilan dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berlebih. Faktor penyebab degradasi lingkungan terjadi dapat dibedakan dalam 2 hal yakni faktor



manusia dan faktor alam itu sendiri. Degradasi lingkungan dalam lingkup fisik secara umum diakibatkan oleh adanya pencemaran. Pencemaran sendiri dapat berlaku atau terjadi pada medium air, udara dan tanah. Penyebabnya pun bermacam-macam, bisa karena ulah tangan manusia, contohnya adalah pembuangan limbah, penggunaan bahan kimia untuk pertanian, dan kebutuhan transportasi yang menyumbang polusi.

6). Masih Adanya Potensi Gangguan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib. Upaya itu dapat berupa deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli secara rutin, pengamanan, penanganan unjuk rasa dan penertiban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 TAHUN 2020. Upaya-upaya tersebut tentunya memerlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan TNI dan POLRI yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing serta kewenangan kelembagaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai banyak keterbatasan dalam pelaksanaan tupoksinya. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari TNI dan Polri melalui kesepakatan Trantibmum agar dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam Program-Program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, aman dan tenram.

Termasuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pada setiap kegiatan operasional terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2022 total jumlah kriminal meningkat sebanyak 371 kasus dibandingkan tahun 2021 sebanyak 197 kasus, yang terdiri dari Kejahatan Seksual 33 kasus, Penganiayaan 127 kasus, Pencurian 55 kasus, dan Penipuan 9 kasus. Untuk dapat meredam potensi konflik di Kabupaten Luwu Timur, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

7). Tantangan Untuk Merawat Nilai-Nilai Agama Dan Budaya ditengah Era Transformasi Digital yang semakin berkembang

Masyarakat Luwu Timur dikenal sebagai masyarakat yang beradab. Keberadaban ini bertumpu pada kesadaran terhadap pentingnya nilai-nilai agama dan budaya di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. hal ini perlu dilestarikan ditengah semakin berkembangnya era digitalisasi saat ini, tantangan tersebut perlu untuk segera disikapi dengan baik. Penguatan Nilai-nilai agama dan budaya tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan keberagaman latar sosial masyarakat Luwu Timur. Daerah ini dihuni oleh berbagai pemeluk agama dan keyakinan. Juga mereka memiliki nilai-nilai budaya yang beragam. Perbedaan dan keberagaman dimaksud memiliki tantangan



tersendiri, dan sekaligus menjadi potensi bagi terciptanya masyarakat yang beragam dalam kesatuan. Dalam konteks inilah, maka upaya yang berkesinambungan dalam merawat nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Luwu Timur memiliki makna yang strategis. Fakta menunjukkan bahwa ketika keberagaman nilai-nilai agama dan budaya tersebut dirawat dengan baik, maka keberagaman ini menjadi kekuatan didalam mengatasi berbagai macam problem pembangunan.

Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kondisi aktual, dan kemampuan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, maka arah pembangunan selama satu tahun diupayakan untuk dapat memecahkan isu dan masalah mendesak sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah yang diperkirakan akan dihadapi pada tahun 2023. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD yang baru mencapai 56,62 persen;
- Menurunnya Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B dari 97,37 persen di tahun 2021 menjadi 90,23 persen di tahun 2022;
- Masih tingginya Angka Putus Sekolah sebanyak 285 siswa yang terdiri dari SD/MI sebanyak 113 siswa dan SMP/MTs sebanyak 172 siswa;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan;
- Belum meratanya distribusi Guru dan ketersediaan guru untuk setiap mata pelajaran pada setiap Satuan Pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup sebesar 10,24 persen pada tahun 2022 dengan jumlah kematian bayi sebanyak 54 kasus yang menyebabkan menurunnya angka kelangsungan hidup bayi sebesar 89,72%;
- Meningkatnya Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup dari 2 kasus di tahun 2021 menjadi 8 kasus di tahun 2022;
- Masih terdapatnya jumlah kematian ibu pada tahun 2022 sebanyak 7 kasus (133,3/100.000 KH);
- Bertambahnya kejadian balita gizi buruk pada tahun 2022 sebanyak 6 orang;
- Meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA di tahun 2022 sebanyak 409 orang dan Jumlah pasien TB Yang meninggal sebanyak 15 orang.
- Meningkatnya Angka Kejadian Malaria dari 13 kasus di tahun 2021 menjadi 56 kasus di tahun 2022;
- Belum meratanya ketersediaan tenaga kesehatan;
- Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang;

a. Pekerjaan Umum

- Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik menurun dari 39,18 persen di tahun 2021 menjadi 34,12 persen di tahun 2022;
- Sebagian besar lebar jalan belum sesuai dengan standar jalan Kabupaten;
- Masih terdapat jembatan yang lebarnya kurang dari lebar jalan existing;
- Masih rendahnya Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik di tahun 2022 yang baru mencapai 55,97 persen;
- Masih rendahnya Persentase Penduduk Berakses Air Minum di tahun 2022 yang baru mencapai 60,67 persen;
- Besarnya cakupan layanan irigasi;
- Belum termanfaatkannya potensi sumber air baku.

b. Penataan Ruang

- Masih rendahnya Ketaatan Terhadap RTRW di tahun 2022 yang baru mencapai 39,94 persen;
- Masih terbatasnya regulasi RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis;
- Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
- Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih rendahnya Rasio Rumah Layak Huni di tahun 2022 yang baru mencapai 0,19 persen;
- Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh menurun dari 2,71 km² di tahun 2021 menjadi 2,69 km² di tahun 2022;
- Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Masih terbatasnya prasarana dasar perumahan dan permukiman;
- Belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Masih tingginya Jumlah Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di tahun 2022 sebanyak 418 kasus;
- Masih tingginya Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada di tahun 2022 sebanyak 843 kasus;
- Belum idealnya rasio SDM pemadam kebakaran;
- Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran;
- Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana;
- Belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi;
- Belum optimalnya peran fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanggulangan bencana.



6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Masih terdapat 1.385 jiwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Tahun 2022
- Belum optimalnya pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- Belum validnya data base Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas;
- Belum termanfaatkannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam program penanggulangan kemiskinan oleh seluruh pihak;
- Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sebagai dampak melemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan leve

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Masih terdapat 7.230 orang penganggur di tahun 2022;
- Meningkatnya Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja dari 25 kasus di tahun 2021 menjadi 46 kasus di tahun 2022;
- Masih rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja;
- Masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
- Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
- Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan;
- Belum maksimalnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak;
- Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan;
- Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan;
- Masih adanya kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga (KDRT).

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Menurunnya Jumlah Rata-Rata Ketersediaan Pangan Utama dari 265.292 ton di tahun 2021 menjadi 243.787 ton di tahun 2022;
- Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras;
- Harga bahan pangan masih fluktuatif;
- Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman.



10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Belum teridentifikasi seluruh tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terjadinya perselisihan sengketa pertanahan milik Negara dan masyarakat;
- Sebagian besar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- Belum maksimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pembuatan sertifikat tanah masyarakat.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Masih terjadinya kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
- Menurunnya Indeks Kualitas Air dari 80,69 di tahun 2021 menjadi 66,52 di tahun 2022;
- Menurunnya Indeks Kualitas Udara dari 97,62 di tahun 2021 menjadi 94,27 di tahun 2022;
- Menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari 76,48 di tahun 2021 menjadi 75,45 di tahun 2022;
- Masih terjadinya kerusakan lingkungan, berakibat pada peningkatan luasan lahan yang perlu dikonservasi;
- Peran serta sektor swasta masih tergolong rendah dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- Lemahnya validitas informasi dan data base kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur;
- Belum sebandingnya jumlah kegiatan yang harus diawasi dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan;
- Jumlah prasarana dan sarana yang tersedia belum sebanding dengan besarnya jumlah timbulan sampah dan luasnya daerah pelayanan kebersihan;
- Belum optimalnya pengelolaan dan penanganan persampahan sejak dari sumber sampai ke Tempat Pengolahan Akhir sampah;
- Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya (3R; reuse, reduse and recycle);
- Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan;
- Kondisi kualitas lingkungan khususnya air badan air di wilayah Kabupaten Luwu Timur masih belum dapat memenuhi baku mutu.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan



12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Masih belum optimalnya capaian penerbitan dokumen kependudukan terutama dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian dan penerbitan akta kelahiran;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan;
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam rangka meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Masih lemahnya up-dating data profil desa/kelurahan sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PADes;
- Belum optimalnya BUMDes yang terbentuk;
- Masih rendahnya status Indeks Desa Membangun Kabupaten Luwu Timur;
- Masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintah desa dalam memahami regulasi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Masih terjadi Laju Pertumbuhan Penduduk di tahun 2022 sebesar 1,67 persen;
- Meningkatnya Jumlah Akseptor KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di tahun 2021 sebanyak 11.728 jiwa menjadi 10.738 jiwa di tahun 2022;
- Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi di tahun 2021 sebanyak 13.591 jiwa menjadi 15.886 jiwa di tahun 2022;
- Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB masih sangat rendah;
- Masih minimnya Regulasi Daerah terkait Pengendalian Penduduk.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Menurunnya Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan dari 0,059 persen di tahun 2021 menjadi 0,050 persen di tahun 2022;
- Masih minimnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang terminal, pelabuhan dan bandara sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta koneksi antar daerah;
- Belum maksimalnya pemenuhan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas di jalan Kabupaten;
- Masih terbatasnya penyediaan sarana transportasi massal bagi masyarakat;
- Masih rendahnya Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum



16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemenuhan kegiatan komunikasi dan informatika;
- Masih minimnya sumber daya manusia pengelolaan Informatika dan Telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan E –Government;
- Belum optimalnya akses internet bagi masyarakat pada ruangruang publik di Kabupaten Luwu Timur

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas;
- Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri di Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan data peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan;
- Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM;
- Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Menurunnya Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) dari 46 Perusahaan di tahun 2021 menjadi 35 Perusahaan di tahun 2022;
- Masih minimnya regulasi yang mendukung peningkatan penanaman modal;
- Kurangnya data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi antara Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
- Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Rata-rata waktu penerbitan dokumen perizinan belum sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Menurunnya Jumlah Wirausaha Muda dari 30 orang di tahun 2021 menjadi 26 orang di tahun 2022;
- Menurunnya Jumlah Atlet Berprestasi dari 74 atlet di tahun 2021 menjadi 21 atlet di tahun 2022;
- Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Menurunnya Jumlah Pelatih Bersertifikat dari 40 orang di tahun 2021 menjadi 20 orang di tahun 2022;



- Masih rendahnya minat olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
- Masih perlunya peningkatan pembinaan masyarakat bidang olah raga

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Belum optimalnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Timur;
- Masih terbatasnya SDM dan kapasitas pengelola data statistik;
- Belum terpusatnya penyediaan data statistik sektoral;
- Keterbatasan anggaran pengelolaan data statistik sektoral.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan SDM;
- Keterbatasan sarana dan prasarana;
- Keterbatasan anggaran.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Masih rendahnya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan;
- Belum optimalnya implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya luhur;
- Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana budaya;
- Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelaku budaya;
- Masih rendahnya daya saing dan semangat kompetisi dalam berkarya budaya

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Minimnya Inovasi di bidang perpustakaan;
- Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di seluruh wilayah sebagai sasaran pembinaan;
- Masih terbatasnya tenaga pustakawan daerah;
- Masih minimnya Jumlah pustakawan tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat;
- Menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan karena kurangnya;
- minat dan budaya baca masyarakat;

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Database informasi karsipan belum optimal dilaksanakan;
- Keterbatasan SDM arsiparis;
- Pengelolaan administrasi karsipan Perangkat Daerah belum optimal;
- Masih rendahnya pengetahuan tentang tata karsipan pada aparatur sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis;
- Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Menurunnya jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan dari 12.342,23 Ton di tahun 2021 menjadi 10.247,8 Ton di tahun 2022;
- Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Masih maraknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan;



- Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
- Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
- Belum optimalnya pemanfaatan Balai Benih Ikan (BBI);
- Belum optimalnya produksi olahan ikan;
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan.

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Masih terbatasnya aksesibilitas sistem transportasi yang menghubungkan objek wisata;
- Masih kurangnya akses jaringan telekomunikasi khususnya internet pada objek wisata;
- Legalitas Matano dan Sistem Danau Malili sebagai Kawasan Geopark;
- Keterbatasan kewenangan dalam rangka pemanfaatan pengelolaan objek wisata;
- Masih lemahnya peran dan penguatan seluruh penggerak sektor pariwisata melalui pelatihan, bimtek, desiminasi, sosialisasi, penguatan modal.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Masih terbatasnya ketersedian benih unggul setiap musim tanam;
- Belum terpenuhinya unsur hara untuk pertanaman padi akibat ketergantungan petani pada ketersediaan pupuk dan pestisida kimia, sementara alokasi pupuk subsidi dan kemampuan petani dalam menebus masih terbatas;
- Sebagian besar kondisi Alsintan dalam kondisi tua dan rusak, sehingga kemampuan mengolah lahan berkurang;
- Kurang optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana serta penunjang pertanian lainnya;
- Varietas Benih jagung cenderung spesifik;
- Masih sulitnya ketersediaan bibit sawit yang bersertifikasi;
- Belum tersedianya pupuk subsidi untuk komoditi perkebunan;
- Belum memadainya ketersediaan alat pasca panen komoditi lada;
- Masih minimnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan peternakan dan kesehatan hewan belum memiliki kantor pusat pelayanan kesehatan hewan (Puskeswan);
- Belum tersedianya lahan atau padang pengembalaan sebagai sentra pengembangan ternak sapi;
- Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
- Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah;
- Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi;
- Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menerapkan standar UTPP yang dimiliki;



- Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan Ekspor dan Impor.

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Masih rendahnya produktifitas IKM;
- Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM;
- Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM;
- Masih rendahnya pendidikan dan ketrampilan pelaku IKM.

30. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- Belum optimalnya aksesibilitas transportasi ke daerah transmigrasi;
- Masih minimnya dukungan infrastruktur penunjang pada wilayah transmigrasi;
- Belum sepenuhnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan oleh para pihak;
- Tingkat kompetensi calon transmigran belum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan

31. Unsur Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Penjabaran Rencana Kerja yang mengacu pada Road Map RB Pemerintah Daerah masih terpaku pada kebutuhan administratif dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
- Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dalam upaya mendukung perubahan pada lingkup unit kerja maupun organisasi;
- Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) belum disusun, sehingga kegiatan pemantauan berkala belum berjalan;
- Peta keterkaitan antara Kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dan OPD yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan belum disusun;
- Belum selesainya penyesuaian Proses Bisnis dan SOP untuk mendukung alur kerja;
- Belum optimalnya pemantauan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui evaluasi terhadap pemanfaatan dan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan organisasi;
- Masih rendahnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran;
- Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah;
- Belum tersedianya layanan pengajuan penyusunan produk hukum secara IT.

32. Unsur Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- Masih terbatasnya SDM di Sekretariat DPRD terhadap penyusunan legal drafting;



- Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD khususnya di bidang informasi dan Teknologi.

33. Unsur Perencanaan

- Kurangnya SDM perencana;
- Masih kurangnya akurasi perencanaan dan data kinerja;
- Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data perencanaan;
- Belum meratanya kapasitas SDM Perencana di level Perangkat Daerah.

34. Unsur Keuangan

- Kurangnya jumlah dan kualitas personil yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;
- Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja yang diatur dalam anggaran kas;
- Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan obyek pajak belum optimal;
- Jumlah SDM yang mengelola pendapatan masih kurang;
- Ruang pelayanan pajak belum representative

35. Unsur Kepegawaian

- Belum optimalnya penguatan sistem manajemen sumber daya manusia;
- Menurunnya Penilaian Sistem Merit dari nilai 168 di tahun 2021 menjadi 156,5 di tahun 2022;
- Menurunnya Indeks Profesionalitas ASN dari nilai 51,27 di tahun 2021 menjadi 30,09 di tahun 2022;
- Tidak lanjut asesmen sebagai dasar pengembangan karier belum dilaksanakan;
- Belum adanya Pemetaan Talenta sebagai dasar penempatan Jabatan kritisik/suksesi;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kinerja belum disertai dengan kepatuhan seluruh OPD dalam pengumpulan data kinerja berkala dan belum digunakan dalam pemantauan capaian kinerja berkala.

36. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- Belum memadainya Database Kediklatan;
- Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
- Rencana Pengembangan Pegawai sesuai dengan kebutuhan kompetensi masih dalam tahap perencanaan

37. Unsur Penelitian Dan Pengembangan

- Masih rendahnya hasil-hasil Kelitbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD;
- Masih rendahnya tingkat pemberdayaan stakeholder kelitbang;
- Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil-hasil Kelitbang

38. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

- Masih rendahnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat;
- Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum;
- Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan luas wilayah.



36. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

- Belum optimalnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- Belum optimalnya parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik;
- Masih rendahnya persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan;
- Masih rendahnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terkait ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

37. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

- Masih rendahnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
- Belum optimalnya level kapabilitas APIP;
- Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, Whistle Blowing System (WBS) serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan efektif;
- Pengajuan Unit Kerja dalam penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diantaranya RSUD I Lagaligo, Disdukcapil, dan DPMPTSP belum berhasil memperoleh Predikat ZI menuju WBK pada tahun 2021;
- Upaya pelayanan publik yang diberikan telah mengarah pada pelayanan prima, namun masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan perikatan dengan stakeholder agar jangkauan informasi pelayanan bisa lebih luas

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai “medan magnet” bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnya tetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah: ***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”***.

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada Tabel 1.19



Tabel 1.19
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	Berkelanjutan	<p>Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksud-kan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuh-an generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.</p>
	Lebih maju	<p>Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi</p>



		keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	Berlandaskan nilai agama dan budaya	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelak-sanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasayarakatan.

Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni "Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter" dan visi RPJMN 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

2. Misi Pembangunan Daerah

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan ditempuh dalam mewujudkan visi. Upaya umum tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang hendak dicapai. Rumusan misi ini membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Olehnya itu, rumusan misi RPJMD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Adapun rumusan misi pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,

b) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian unggulan daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut,



dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata pada seluruh wilayah.

c) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

d) Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan publik lainnya.

e) Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

f) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan Budaya

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar ummat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel 1.20
Keterkaitan Pokok Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD
Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No.	Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Berkelanjutan	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh	dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum agar masyarakat Luwu Timur semakin meningkat kesejahteraan dan taraf hidupnya dengan ditandai oleh meningkatnya PDRB per kapita, menurunnya angka pengangguran, menurunnya rasio jumlah penduduk miskin, meningkatnya indeks pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya daya beli



			masyarakat
2		Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas	<p>dimaksudkan sebagai upaya umum agar perekonomian Luwu Timur terus berkembang. Selain itu juga memiliki kapasitas daya saing yang berbasis pada pertanian olahan mendukung hilirisasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan struktur ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Perekonomian Luwu Timur tersebut diupayakan berkembang dengan rantai pasok yang luas Karena memiliki berbagai jaringan dalam konteks regional, nasional dan global</p>
3.	Lebih Maju	Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	<p>dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Luwu Timur didorong untuk menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ini ditandai dengan upaya-upaya untuk terkelolanya pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif, serta pengembangan kerjasama yang fungsional dan produktif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa serta dengan berbagai pihak. Misi ini juga mencakup upaya perluasan jangkauan dan intensitas layanan publik serta meningkatkan pendapatan asli daerah</p>
4		Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas	<p>dimaksudkan sebagai upaya umum dalam menyediakan infrastruktur wilayah pada berbagai sektor sehingga ketersediaanya lebih memadai dan terakses sampai pada daerah terisolasi. Misi ini juga mencakup upaya dalam menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana. Misi ini termanifestasikan dalam bentuk meningkatnya indeks lingkungan hidup, terciptanya kepuhan</p>



			multipihak terhadap Rencana Tataruang dan Rencana Wilayah (RTRW), serta peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat atas ketersediaan infrastruktur wilayah
5.	Berlandas nilai agama dan budaya	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat seperti mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelaksanaan pembangunan
6.		Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya	dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memberi jaminan terhadap keberlangsungan pembangunan di masa depan. Misi ini mengasumsikan bahwa ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lebih prospektif lagi bagi masa depan Luwu Timur ketika proses atau pelaksanaan pembangunan didasari dengan nilai-nilai agama dan budaya. Nilai-nilai agama dan budaya tersebut menjadi sangat penting artinya. Ini telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan Luwu Timur di masa lalu yang masyarakatnya hidup dan berkembang dengan keberagamaan yang kuat serta penghayatan dan praktik budaya yang tinggi. Nilai-nilai agama dan budaya ini juga relevan dalam konteks keberlanjutan pembangunan, karena dari keduanya para penyelenggara pembangunan dapat termotivasi untuk mengendalikan diri terhadap berbagai kemungkinan rusaknya tatanan keluarga, masyarakat, dan lingkungan fisik manusia



C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026" LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA" dalam mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

- Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.
- Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I.
- Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) 30 bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan.

Pembangunan pada Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ketiga RPJMD 2021-2026, fokus pembangunan diarahkan kepada penajaman pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJMD. Tujuan dan



Sasaran Pembangunan Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD 2005-2025, RKPD Tahun 2023 telah disusun dengan mengintegrasikan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang saat ini sedang dalam Tahap proses Penyusunan Sehingga diharapkan dapat terwujud senergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. berdasarkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi yang merupakan kerangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arahan yang jelas yang akan dilaksanakan guna menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pembangunan memberikan arahan yang jelas kepada para pemangku kepentingan dan para stakeholders dalam proses pelaksanaannya. Selain itu memberikan arahan pelaksanaan bagi setiap Urusan Pemerintahan Daerah baik Urusan Waib maupun Urusan Pilihan dalam mendukung Misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah yang dirumuskan secara spesifik, realistik dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perumusan permasalahan dan tantangan pembangunan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2023 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah dan capaian Kinerja Pembangunan Daerah, guna memaksimalkan pencapaian Tujuan dan sasaran dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Permendagri 86/2017, tujuan dalam RPJMD adalah kondisi yang akan dicapai atau sesuatu yang akan diubah selama periode RPJMD. Langkah-langkah perumusan tujuan meliputi: (1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; (2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) merumuskan indikator tujuan yang memenuhi kriteria SMART-C. Sasaran dalam RPJMD adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Menurut Permendagri 86/2017, kriteria sasaran adalah: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan (4) memenuhi kriteria SMART-C. Langkah-langkah dalam merumuskan sasaran adalah: (1) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; (2) merumuskan indikator sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok tahapan RPJPD yang relevan; dan (3) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.



Berdasarkan pemahaman di atas maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada Misi-1 yakni "Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh" adalah: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran: (a) Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (b) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (c) Meningkatnya kesetaraan gender
2. Penjabaran tujuan pada Misi-2 yakni "Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas" adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah; (b) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.
3. Penjabaran tujuan pada Misi-3 yakni "Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas" adalah: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan" dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah; (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Penjabaran tujuan pada Misi-4 yakni "Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik" adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan sasaran: (a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
5. Penjabaran tujuan dari Misi-5 yakni "Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat" adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman dengan sasaran Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat,
6. Penjabaran tujuan dari Misi-6 yakni "Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya" adalah Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Untuk itu Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima (5) tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dipetakan dalam Matriks Program Pembangunan Daerah berdasarkan hasil



pemetaan tersebut nomenklatur Program, Kegiatan dan Subkegiatan berpedoman pada Permendagri 050-379 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)

Tujuan

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan Kesejahteraan masyarakat (T1)

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan pendidikan
- 2 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman
- 4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 5 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
- 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 7 Program Pemberdayaan Sosial,
- 8 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial,
- 9 Program Pengendalian Penduduk
- 10 Program pembinaan keluarga berencana (KB),
- 11 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS),
- 12 Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan,
- 13 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan,
- 14 Program pengembangan kapasitas kepramukaan,
- 15 Program pembinaan perpustakaan.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program Penataan Desa,
- 2 Program Administrasi Pemerintahan Desa,
- 3 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi,
- 4 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi,
- 5 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi,
- 6 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
- 7 Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan desa,
- 8 Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan kelurahan

Sasaran 3

Meningkatnya pemberdayaan gender (S3)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program Penanganan Warga negara migran korban tindak kekerasan,
- 2 Program rehabilitasi sosial,



-
- 3 Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan,
 - 4 Program perlindungan perempuan,
 - 5 Program pengelolaan sistem data dan gender dan anak,
 - 6 Program pemenuhan hak anak (PHA),
 - 7 Program perlindungan khusus anak,
 - 8 Program peningkatan kualitas keluarga,

Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas (M2)

Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)

Sasaran 4

Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan,
- 2 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat,
- 3 Program penanganan kerawanan pangan,
- 4 Program pengawasan keamanan pangan
- 5 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi,
- 6 Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi,
- 7 Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi,
- 8 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM),
- 9 Program pengelolaan perikanan tangkap,
- 10 Program pengelolaan perikanan budaya,
- 11 Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,
- 12 Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
- 13 Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata,
- 14 Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif,
- 15 Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian,
- 16 Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner,
- 17 Program perizinan usaha pertanian,
- 18 Program penyuluhan pertanian,
- 19 Program pengembangan ekspor,
- 20 Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting,
- 21 Program standarisasi dan perlindungan konsumen,
- 22 Program perencanaan dan pembangunan industri,

Sasaran 5

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program perencanaan tenaga kerja,
- 2 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja,
- 3 Program penempatan kerja
- 4 Program hubungan industrial,



-
- 5 Program pendidikan dan latihan perkoperasian,
 - 6 Program pengembangan iklim penanaman modal,
 - 7 Program promosi penanaman modal,
 - 8 Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal,
 - 9 Program pengembangan ekonomi kreatif melalui penempatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual,
 - 10 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan,

Misi 3 : menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)

Tujuan

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T4)

Sasaran 6

Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan sumber daya air,
- 2 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum,
- 3 Program pengembangan sistem pengolahan persampahan regional,
- 4 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah,
- 5 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase,
- 6 Program pengembangan permukiman,
- 7 Program penataan bangunan gedung,
- 8 Program penyelenggaraan jalan,
- 9 Program pengembangan jasa konstruksi,
- 10 Program penyelenggaraan penataan ruang,
- 11 Program penataan bangunan dan lingkungannya,
- 12 Program pengembangan perumahan,
- 13 Program kawasan permukiman,
- 14 Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh,
- 15 Program peningkatan sarana dan utilitas umum (psu),
- 16 Program pengelolaan tanah kosong,
- 17 Program penyelesaian sengketa tanah garapan,
- 18 Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan,
- 19 Program pengelolaan izin membuka tanah,
- 20 Program penatagunaan tanah,
- 21 Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ),
- 22 Program pengelolaan pelayaran,

Sasaran 7

Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program penanggulangan bencana,
- 2 Program penanganan bencana,
- 3 Program perencanaan lingkungan hidup,
- 4 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- 5 Program pengelolaan keanearagaman hayati (kehati),



-
- 6 Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3),
 - 7 Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH),
 - 8 Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat,
 - 9 Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat,
 - 10 Program penanganan pengaduan lingkungan hidup,
 - 11 Program pengelolaan persampahan,
 - 12 Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,

Misi 4 : Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)

Tujuan

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)

Sasaran 8

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengelolaan aplikasi informatika
- 2 Program penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi,
- 3 Program pengelolaan arsip,
- 4 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
- 5 Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah,
- 6 Program pengelolaan keuangan daerah,
- 7 Program pengelolaan barang milik daerah,
- 8 Program pengelolaan pendapatan daerah,
- 9 Program penyelenggaraan pengawasan,
- 10 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Sasaran 9

Meningkatnya kualitas pelayanan public (S9)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- 2 Program pengelolaan taman makan pahlawan
- 3 Program pendaftaran penduduk
- 4 Program pencatatan sipil
- 5 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- 6 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
- 7 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam,
- 8 Progam pelayanan penanaman modal,
- 9 Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal,
- 10 Program penyelenggaraan statistik dan sektoral,
- 11 Program perlindungan dan penyelamatan arsip,
- 12 Program perizinan penggunaan arsip
- 13 Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota,



-
- 14 Program pengelolaan system informasi industry nasional
 - 15 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,
 - 16 Program perekonomian dan pembangunan
 - 17 Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd,
 - 18 Program kepegawaian daerah
 - 19 Program pengembangan sumber daya manusia
 - 20 Program penelitian dan pengembangan daerah
 - 21 Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - 22 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Misi 5 : mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh masyarakat (M5)

Tujuan

Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman (T5)

Sasaran

Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- 2 Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamata non kebakaran,
- 3 Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- 4 Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
- 5 Program peningkata peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- 6 Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 7 Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Misi 6 : Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis agama dan budaya (M6)

Tujuan

Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T11)

Sasaran

Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)

Program yang menunjang sasaran ini :

- 1 Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), Kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
- 2 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- 3 Program pemberdayaan kebudayaan
- 4 Program pengembangan kesenian tradisional
- 5 Program pembinaan sejarah



-
- 6 Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
 - 7 Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial, dan budaya

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Prioritas RPJMD Kabupaten Luwu timur Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dirumuskan terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Selain program prioritas yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan daerah, pada bab ini juga disajikan program- program operasional pada semua SKPD yang tupoksi semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten. Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal dengan indikatornya masing-masing, diharapkan akan mengarah pada pencapaian target SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dimaksud.

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 80 sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 - Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan
 - Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Penambahan Ruang Kelas Baru



- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan perpustakaan sekolah
 - Pembangunan laboratorium
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat laboratorium
 - Rehabilitasi Sedang/Berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pengadaan Mebel PAUD
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Panganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

- 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

- 1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- 1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
 - Pendaftaran objek diduga cagar budaya
- 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pelindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan cagar budaya

2 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 9 program, 32 kegiatan dan 105 sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - Pembangunan puskesmas
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Pengembangan Puskesmas
 - Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 - Pengadaan Obat, Vaksin



-
- Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
-



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - Operasional pelayanan puskesmas

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - Operasional pelayanan puskesmas



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
7. Peningkatan pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan Rumah Sakit
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



-
- Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 12 program, 26 kegiatan dan 96 sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan alat besar
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



-
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Tanggul Sungai
 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
 - Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Rehabilitasi Tanggul Sungai
 - Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
 - Normalisasi/Restorasi Sungai
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Bendung Irigasi
 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
 - Operasional Unit Pengelola Irigasi
 - Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM
 - Pembangunan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 - Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM
 - Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan
 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan



PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

1. Pengembangan Sistem dan Pegelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Penyediaan Sarana Persampahan
 - Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Outline Plan pada kawasan genangan
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

1. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta Implementasi SIMBG
 - Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Rehabilitasi Jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Pelebaran Jembatan
 - Rehabilitasi Jembatan

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil)
 - Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IJUK Nasional
 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Pengawasan Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Bimbingan Teknis Tentang Terbit Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota
 - Sistem Informasi Penataan Ruang



-
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 10 program, 22 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
KABUPATEN/KOTA				

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan barang milik daerah SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



-
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota



- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GERAPAN

1. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
 - Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

1. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong
 - Pelaksanaan inventarisasi tanah kosong

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

1. Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1. Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

5 Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 2 program, 11 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN



- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan aset dan tak berwujud



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Umum
 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 2 program, 12 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan aset dan tak berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyusunan rencana kontijensi
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota/Kabupaten.
 - Aktivasi sistem komandi penanganan darurat bencana
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
4. Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan Bencana
 - Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota

7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 2 program, 13 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



-
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
-



-
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan aset dan tak berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
 - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
3. Investigasi kejadian kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran



-
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 14 program, 25 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Smesteran SKPD
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya



- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asa

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan permakanan
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup daerah kabupaten/kota
 - Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah
 - Penyediaan Layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah

9. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 10 program, 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Darah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta aribut kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undnagan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor



-
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah, Air , Udara dan Laut
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/ kota
2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

1. Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/ Kota
 - Pengelolaan ruang terbuka hijau

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan sementara Limbah B3
 - Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/ kota
 - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/ atau izin PPLH
 - Pengawasan Usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak



Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, Penyelesaian sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan sampah
 - Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengelolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 6 program, 15 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
 - Evaluasi pelaksanaan fasilitasi / insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota
 - Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Strategi promosi penanaman modal
 - Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

11. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 7 program dan 20 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

- 1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

- 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan



- Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
- 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

- 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

- 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

12. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 15 program dan 26 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:



**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- 1. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

- 1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

- 1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

- 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro



- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
 - Misi dagang bagi produk ekspor unggulan
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat



PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 5 program, 14 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (DAK)
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (DAK)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DAK)
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/ SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi peraturan Perundang -undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (DAK)
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu (DAK)
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD/DAK)
- 6. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DAK)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor APBD/DAK
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biayah pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Kependudukan

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan sipil
 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROPIK KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Propik Kependudukan
 - Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota



14. Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 7 program dan 20 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
-----------------------------------	------------------	---------------	---------------------	---------------

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daer
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



-
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta
 - Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelayanan antar kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
2. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Pengawasan dan pengendalian LPTKS
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelatihan transmigrasi

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

15. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA/SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - 4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Makan Minum Tamu)
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap



- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha
- 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- 1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil
 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha
 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan
 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
 - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
 - Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 4 program, 16 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
-----------------------------------	------------------	---------------	---------------------	---------------

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk



- Penyerasan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK),
 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
 - Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal
 - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penyediaan dan Distribusi sarana KIE Program KKBPK
 - Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya
 - Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - Pembinaan Terpadu Kampung KB



PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS) Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga),
 - Penyerasan Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK,
 - Advokasi dan Promosi IPK
 - Sosialisasi IPK
2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS),
 - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

17. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 3 program, 19 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
3. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker



- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLA PELAYARAN

- 1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

18. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 5 program, 14 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - Penetapan Wajib Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Komunikasi dan Informatika)
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik



- Layanan Hubungan Media
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Membangun Metadata Statistik Sektoral

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 4 program dan 11 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bedasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya

PROGRAM PENATAAN DESA

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Profil Desa



- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 5 program dan 15 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan gedung kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lain
 - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perongan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Pengeloaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik
 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/ Kota
 - Pengeloaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - Sosialisasi budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 - Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota

PROGRAM PENGELOAAN ARSIP

1. Pengeloaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan daerah kabupaten/ Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun



- Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
- Pelaksanaan pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

21. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 10 program dan 25 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



-
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas,Tenologi dan Spesifik Lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kota/ Kabupaten
 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit
 - Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner



- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota



-
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

22. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 3 program dan 21 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
 - 12. Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat



3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 - Fasilitasi kerja sama luar negeri

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pegelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS



- Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Pendalaman tugas DPRD
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 8. Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

24. Inspektorat Kabupaten

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 3 program, 10 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
KABUPATEN/KOTA				

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD



-
3. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 4. Administrasi Umum perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengawasan keuangan pemerintah daerah
 - Reviu Laporan Kinerja
 - Reviu Laporan Keuangan
 - Pengawasan Desa
 - Kerjasama Pengawasan Internal
 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - Pengawasan dengan tujuan tertentu

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Pendampingan dan Asistensi
 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan daerah
 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi



-
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi

25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota

- 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategi Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)



- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
- 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- 3 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- 4 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang

26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Adminsitras Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Pengelolaan Dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Adminsitras Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Adminsitras Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Adminsitras Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran
 - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
 - Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota,
 - Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan kerugian Daerah
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah



- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Investasi Pemerintah Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat Mendesak
5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan standar harga
 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah
 - Inventarisasi barang milik daerah
 - Pengamanan barang milik daerah
 - Penilaian barang milik daerah
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtempahan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

27. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3. Adminsitrasasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Adminsitrasasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah



28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
-----------------------------------	------------------	---------------	---------------------	---------------

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah
 - Penataan Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - Pengelolaan Mutasi ASN
 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - Pengelolaan Promosi ASN
- 2 Pengembangan Kompetensi ASN
 - Pengelolaan Assessment Center
 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - Pembinaan Disiplin ASN
 - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
 - Evaluasi Disiplin ASN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1 Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Penyelenggaraan Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional
 - Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota



- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

30. Kecamatan

Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur berjumlah 11 Kecamatan antara lain: Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Angkona, Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan di Kecamatan secara umum sama. Pada tahun 2023 Kecamatan melaksanakan 6 program dan 15 kegiatan dan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya



-
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerinteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Adapun rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran sebagai berikut:

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

1. Pendidikan.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan kinerja yang cukup baik yang tergambar dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Propinsi. Namun ada beberapa indikator kunci yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur, diantaranya adalah Kabupaten Luwu Timur memiliki level yang berbeda dengan Kota Palopo. Penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan Diploma I (13,01 tahun untuk Luwu Timur dan 15,12 tahun untuk Kota Palopo). Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Kota Palopo dengan Luwu Timur yaitu 2,20 tahun. Kota Palopo memiliki rata-rata lama sekolah selama 11,09 tahun, sementara di Kabupaten Luwu Timur memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,93 tahun. Untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan dengan Kota Palopo. Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara ratarata, penduduk Kabupaten Luwu Timur usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,94 tahun masa sekolah atau sudah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,01 tahun atau



setara dengan Diploma I. Standar hidup layak Kabupaten Luwu Timur yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai 13,451 juta per kapita per tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan. APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. APS usia 7-12 tahun (setara SD/Sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2032 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) mencapai 99,99 persen. Artinya tingkat pemerataan terhadap akses pendidikan SD di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup tinggi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan (2022 = 99,82 persen).

APS usia 13-15 tahun (setara SMP/sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mencapai 96,21 persen, lebih rendah daripada usia SD/sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13-15 tahun mengalami penurunan (2022 = 97,93 persen). APS usia 16-18 tahun (setara SMA/sederajat) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mencapai 70,3 persen. Angka ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7-12 tahun dan APS usia 13-15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16-18 tahun ini juga mengalami peningkatan (2022 = 70,11 persen).

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM usia 7-12 tahun (SD/MI/sederajat) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 telah mencapai 99,55 persen atau hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah SD/MI/Sederajat. APM usia 13-15 tahun (SMP/MTs/sederajat) pada tahun 2023 mencapai 81,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 18 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dirasakan oleh semua masyarakat. APM usia 16-18 tahun (SMA/SMK/MA/Sederajat) masih berada pada angka 63,13 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh, diantaranya adalah Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2015-2017 cenderung stabil pada kisaran 69 tahun dan meningkat pada kisaran 70 tahun mulai tahun 2018 hingga kini Kondisi ini menunjukkan harapan



bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya AHH di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu Angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan variabel persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Pada faktor penanganan pada saat persalinan, masih terdapat persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga medis (dukun) sebesar 0,2%, hal ini menunjukkan kesadaran ibu hamil akan penanganan terhadap persalinan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.

Jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Luwu Timur dalam tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 jumlah tenaga medis yang ada sebanyak 746 orang sedangkan jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 313.404. Permasalahan lain terkait dengan beberapa layanan rumah sakit yang belum terakreditasi serta kualitas layanan puskesmas yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum.

Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2023 hanya berkisar 36,34%, atau 810.271 Km dan masih ada sekitar 63,66% atau 1.419.598 Km jalan yang berada dalam kondisi kurang baik. Kondisi tersebut dipengaruhi pula oleh volume kendaraan yang semakin hari semakin meningkat. Masih terdapatnya beberapa wilayah di Kabupaten Luwu Timur belum dapat diakses sarana transportasi darat.

Untuk rasio perbandingan antara luas lahan budidaya dan panjang jaringan irigasi mengalami perbaikan, luas lahan budidaya di Kabupaten Luwu Timur semakin lebih baik dan data tahun 2023, ada 67,44%, diantaranya panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik, 98.384,31 m dan kondisi irigasi primer 57.004,03 m,

Selain itu, di tahun 2023, kinerja penyediaan pelayanan SPALD Akses pelayanan dasar telah mengalami perbaikan, dengan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi layak sebesar 92.734 rumah dari jumlah rumah dikabupaten luwu timur sebanyak 95.620, atau 96,98%.

b. Penataan Ruang.

Sepintas ada semacam konflik antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan pembangunan ekonomi rakyatnya. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Sudah tidak proporsionalnya antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031. Masih terjadi inkonsistensi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik perseorangan maupun badan usaha. Permasalahan terkait konflik Tenurial Kawasan Hutan diharapkan dapat terselesaikan sampai tahun 2023.



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah jumlah rumah yang layak untuk ditinggali pada tahun 2023 sebanyak 58.019 rumah atau berkisar 89,05%, masih ada sekitar 7.134 rumah atau 10,95 % yang belum layak untuk dihuni, selain itu juga perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) untuk tahun 2023, hanya 2,65% atau sekitar 1.728 rumah.

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Luwu Timur merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebanyak 378 kasus, sedangkan untuk kejadian bencana yang sering terjadi di kabupaten luwu timur antara lain; Banjir, Putting Beliung, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran. Frekuensi kejadian yang paling sering terjadi adalah banjir dan kebakaran, dimana pada tahun 2023 jumlah korban sebanyak 1283 jiwa, diantaranya 633 laki-laki dan 659 perempuan, selain itu untuk mengantisipasi jatuhnya korban, maka dilakukan beberapa langkah, salah satunya dengan memberikan edukasi dan layanan informasi rawan bencana dan mitigasi bencana, dan untuk tahun 2023, telah dilakukan layanan informasi kepada 276.254 jiwa.

Sementara itu untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan kejadiannya hampir merata pada semua kecamatan, berdasarkan data yang ada kejadian kebakaran pada tahun 2023 sebanyak 138 kali, dengan frekuensi terbesar pada Kecamatan Malili. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Luwu Timur yang hampir sebagian besar merupakan kawasan hutan sehingga potensi ini sangat mempengaruhi selain itu juga dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuka lahan.

6. Sosial.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan masih perlu untuk lebih dioptimalkan lagi, Berbagai upaya pembangunan kesejahteraan sosial selama ini telah dilakukan untuk dapat menuntaskan masalah kesejahteraan sosial. Namun upaya tersebut menghadapi tantangan balik dari berbagai faktor yang mengakibatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung



meningkat. Salah satu hal yang menjadi kendala, yakni terbatasnya sarana dan prasarana bagi fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Berdasarkan data yang ada jumlah PMKS di kabupaten luwu timur pada tahun 2023 berdasarkan SK Bantuan pemenuhan dan rehabilitasi penyandang disabiitas, terlantar, anak terlantar, lanjut usia, gelandangan dan pengemis untuk terpenuhinya kebutuhan dasar sebanyak 100 orang; dan data jumlah korban bencana alam sebanyak 327 jiwa, meliputi bencana tanah longsor, angina kencang dan kebakaran. selanjutnya jumlah penduduk miskin kabupaten luwu timur tahun 2023 sebesar 21,57 juta jiwa. Kondisi demikian perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam penanganannya.

B. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman & Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:29PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur 2021-2026.



C. Kebijakan Umum Daerah

Arah Kebijakan Umum Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Daerah dengan menekankan target Prioritas Pembangunan yang diarahkan pada pemantapan pencapaian Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026" **LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA**" dalam mewujudkan masyarakat yang semakin Maju, Mandiri dan Sejahtera. Program Prioritas yaitu program yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM. Program Prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Serta ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah.

Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas.

Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target Sasaran Pembangunan Daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi Prioritas Pembangunan Daerah, disesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan kemendesakan identifikasi masalah dan korelasinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD. Suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, terkecuali hal yang sangat mendesak dan memiliki daya ungkit besar terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah dan berdampak luas bagi masyarakat yang tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*) selain itu pula dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional maupun Provinsi hal ini guna tercapainya harmonisasi antar perencanaan pembangunan

Berdasarkan Tema, Tujuan, Sasaran serta Arah umum kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran



pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM.

Tahap Pembangunan di tahun kedua ini ditujukan untuk mencapai Berkelanjutan, Lebih Maju dan Berlandaskan nilai agama dan budaya Kabupaten Luwu Timur hingga tahun 2026. Guna mewujudkan Prioritas Pembangunan tersebut maka ditetapkan 6 Misi yang saling mendukung satu sama lain dalam mewujudkan visi daerah yaitu:

Misi 1

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan:

Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing,
- b. Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Misi 2

Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas.

Tujuan:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan

Sasaran:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
- b. ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha

Misi 3

Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.

Tujuan:

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah

Sasaran:

- a. Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah
- b. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup

Misi 4

Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Misi 5

Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.

Tujuan yakni Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman

Sasaran yaitu Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat.



Misi 6

Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Tujuan yaitu mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya

Sasaran yaitu meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan

d. (SPM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

e. Kebijakan Umum Anggaran

Arah Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Penyusunan belanja daerah di Tahun 2023 tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*) dari input yang direncanakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.



Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya serta untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang bersifat mendasar dengan tujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2023 disusun dan dihitung dengan dasar dan asumsi sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur selama periode lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, hal ini disebabkan karena peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2021 mencapai 43,99 persen. Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan dari 16,26 triliun rupiah menjadi 16,03 triliun rupiah sehingga mengalami kontraksi sebesar -1,39 persen . Kondisi tersebut disebabkan oleh PDRB sektor pertambangan dan penggalian di tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -7,81 persen. Namun jika nilai Pertumbuhan Ekonomi dihitung tanpa sektor Pertambangan dan penggalian mengalami tren yang sangat positif mencapai 5,76 persen. Untuk Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 2,72-3,63% dengan asumsi **Pertama**, diharapkan kondisi pemulihan ekonomi dunia yang sudah semakin stabil sehingga pertumbuhan sektor tambang dan penggalian dapat tumbuh secara positif. **Kedua** pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi akan kembali Mengalami Pertumbuhan Pasca imbas dari situasi Ekonomi Global yaitu Pandemi covid 19. **Ketiga** Melakukan Intervensi melalui kebijakan dalam rangka Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
- b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 ditargetkan 74,10 poin. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,34. Angka ini meningkat sebesar 0,13 poin atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,17 persen dibandingkan tahun 2020. Hal ini mengindikasikan Intervensi Kebijakan Pemerintah



Kabupaten Luwu Timur melalui program dan kegiatan yang mendukung IPM tepat sasaran sehingga kualitas Kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran masyarakat Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

- c) Persentase Penduduk Miskin di tahun 2021 sebesar 6,94 % atau mengalami kenaikan persentase dari 6,85 % dari tahun 2020, sehingga dibutuhkan akselerasi dan upaya-upaya secara terpadu, melalui intervensi Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menekan dan menurunkan persentase kemiskinan yang di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 6,44 % dan juga disertai penguatan kelembagaan dan sinkronisasi/harmonisasi kebijakan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dan keterlibatan pihak Swasta;
- d) Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2021 sebesar 4,96 % atau mengalami kenaikan persentase dari 4,46 % di tahun 2020, sehingga dibutuhkan akselerasi dalam Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang diproyeksikan menjadi 3,05 % pada Tahun 2023 melalui peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama lapangan kerja produktif, mengembangkan start-up UMKM berbasis digital yang didukung melalui penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi.
- e) Capain Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur di tahun 2021 sebesar 0,396 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,405. Penurunan Gini Ratio tersebut mengindikasikan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2023 Gini Ratio ditargetkan sebesar 0,381 atau 0,015 dari capaian di tahun 2021 melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah.
- f) Salah satu indikator kinerja makro yang juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Perkapita. Pada tahun 2023 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu di targetkan sebesar 72,00 Juta Rupiah sesuai yang menjadi target pada dokumen RPJMD.
- g) Selain indikator kinerja makro diatas adapun beberapa kebijakan pembangunan tahun 2023 dalam mendukung sasaran pembangunan di tahun 2023 antara lain:
 1. Peningkatan Layanan pendidikan melalui Pemerataan dan penguatan tata kelola, aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan;
 2. Pembangunan kesehatan melalui pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi Ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia dan masyarakat miskin, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan peran swasta serta masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, peningkatan mutu tenaga kesehatan dengan pelatihan, sertifikasi dan penguatan kompetensi dan optimalisasi pelayanan Keluarga



Berencana dan Keluarga Sejahtera, peningkatan keadilan gender, pengarusutamaan hak anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;

3. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana, fokus pada:
 - Peningkatan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir melalui pelibatan serta peran aktif masyarakat;
 - Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan Kelembagaan masyarakat dan Penegakan hukum;
 - Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitasnya;
 - Peningkatan konservasi sungai, dan danau untuk meningkatkan ketersediaan dan Keberlangsungan sumber daya air;
 - Pengendalian pemanfaatan ruang utamanya terkait pencegahan alih fungsi lahan produktif;
 - Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pelibatan masyarakat;
 - Peningkatan kapasitas manajemen pencegahan dan Penanggulangan bencana meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
4. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tatakelola pemerintahan, difokuskan pada:
 - Penerapan Inovasi dalam mendukung Reformasi birokrasi secara berkelanjutan melalui Peningkatan layanan publik, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi publik, optimalisasi layanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi, Optimalisasi Pencapaian SPM;
 - Pengembangan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sistem pembinaan karir yang terbuka;
 - Peningkatan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur komunikasi dan informasi menuju **e-government**;
5. Mengurangi disparitas infrastruktur antar wilayah, peningkatan kinerja dan cakupan pelayanan jaringan irigasi, prasarana sumberdaya air, pengembangan sistem transportasi, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan antarwilayah dengan inovasi pengembangan infrastruktur melalui Kolaborasi antar pemerintah daerah dengan dunia usaha;
6. Pembangunan Pertanian dalam arti luas guna mendukung kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui program Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi, Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, teknologi, akses pasar, Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pangan



berbasis organik/semi organik dan petani milenial serta pengendalian alih fungsi dalam mendukung program nasional lahan pangan berkelanjutan;

7. Pengembangan Pariwisata dengan memfokuskan pengembangan pada destinasi wisata yang menjadi unggulan kabupaten serta mengembangkan 1 desa 1 destinasi (one village one destination) yang merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Pengembangan wisata desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah serta menghasilkan produktivitas yang tinggi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan;
8. Pengembangan kawasan pesisir dan sentra perikanan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan, serta pembinaan masyarakat nelayan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan lautan dalam mendukung kelestarian lingkungan berkelanjutan;
9. Penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan melalui Pengelolaan bina mental-spiritual, Penguatan kerukunan antar ummat beragama, Pengelolaan cagar budaya secara terpadu, serta pembinaan kesenian tradisional berbagai etnik.
10. Percepatan implementasi pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Kewenangan Wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai kewenangan Kabupaten;
11. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan Pemulihian Perekonomian Daerah pasca pandemi covid 19 melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, perlindungan terhadap produk dalam negeri, pembinaan dan pemberdayaan KUMKM-IKM, sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/kegiatan sektoral di daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk meningkatkan investasi dengan penyerderhanaan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur;
12. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme check and balances;
13. Dalam rangka pengelolaan pembangunan perdesaan perlu diperhatikan:
 - Dukungan pembangunan perdesaan melalui kebijakan bantuan keuangan Khusus kepada pemerintah desa guna terwujudnya kemandirian desa;



- Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan kabupaten yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa harus sinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
 - Pendeklasian pelaksanaan kewenangan pembangunan skala lokal desa kepada Desa;
 - Pelaksanaan program sektoral yang masuk kedesa harus terkoordinasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan desa;
 - Pembangunan perdesaaan berbasis kearifan local perdesaan, dan difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang prioritas dan mendesak untuk diselesaikan pada skala desa;
14. Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan reformasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
15. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kualitas belanja langsung berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik produktif yang memberikan dampak multiplier tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
16. Pengusulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 harus mencerminkan kinerja yang terukur terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah dan berbasis Sistem Informasi Perencanaan pembangunan (SIPD)

f. Kebijakan Belanja Pemenuhan kebutuhan Wajib dan Mengikat

Kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan Wajib dan mengikat berpedoman kepada Permendagri 13 Tahun 2006 sesuai amanat pasal 106 sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa
- b. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga.

g. Kebijakan Belanja Pemenuhan kebutuhan Program Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026 pemenuhan kebutuhan belanja Program Prioritas dimaksud kebijakannya diarahkan pada:



1. Melaksanakan Program Prioritas (KP1) guna mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD 2021-2026. Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2022 yang mana difokuskan pada 5 (lima) Prioritas Utama yaitu:
 - a. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pengurangan Kemiskinan
 - b. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Akselerasi Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas, Industri dan Jasa Produktif serta Pengembangan Pariwisata;
 - c. Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar berkualitas yang mendukung Penguatan Konektifitas;
 - d. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas;
 - e. Pengembangan Kawasan Strategis Daerah serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Mengedapankan program-program dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan penciptaan lapangan kerja.
3. Melaksanakan program-program dalam rangka mendukung kebijakan Nasional Indonesia Kerja dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tercipta sinergi pembangunan dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan Nasional.
4. mengakomodir program-program pembangunan berdasarkan Aspirasi Masyarakat dalam musrenbang.
5. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari hasil rumusan penelaahan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

h. Kebijakan Belanja Pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

i. Kebijakan Belanja Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK fisik dan Non Fisik)

1. Pengalokasian dana alokasi khusus Non Fisik berpedoman Petunjuk Tehnis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada APBD Tahun Anggaran



2022 dan Pasal 12 Ayat 7 (tujuh) undang-undang nomor 14 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
 - b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).
 - c. Tunjangan Profesi guru
 - d. Tambahan penghasilan guru
 - e. Tunjangan khusus guru (TKG PNSD)
 - f. Bantuan operasional kesehatan (BOK) dan Bantuan operasional keluarga berencana (BOKB)
 - g. Dana pelayanan administrasi kependudukan (PAK)
2. Dana Alokasi Fisik Adalah Dana yang Dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, yang dianggarkan dalam APBD setelah terbitnya Rincian Alokasi DAK Fisik Oleh Kementerian Keuangan RI. Pengalokasian Dana Alokasi khusus Fisik berpedoman Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Terkait, yang terdiri dari DAK Fisik Reguler, Penugasan dan Afirmasi. Meliputi:
 - a. DAK Reguler meliputi bidang : Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Kelautan Perikanan, sentra Industri Kecil Dan Menengah dan Pariwisata,
 - b. DAK Penugasan meliputi bidang : Pendidikan Sekolah Menengah Kejuuan, Kesehatan Rumah sakit rujukan/Pratama, Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi dan Energi Skala Kecil.
 - c. DAK Afirmasi meliputi Bidang : Perumahan dan Pemukiman, transportasi dan Kesehatan
 3. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/ subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, yaitu untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya.
 - a. Untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
 - b. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada kegiatan yang sama DAK Nonfisik dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Adapun capaian kinerja makro penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 sebagai berikut.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan keterbandingan dengan wilayah lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak.

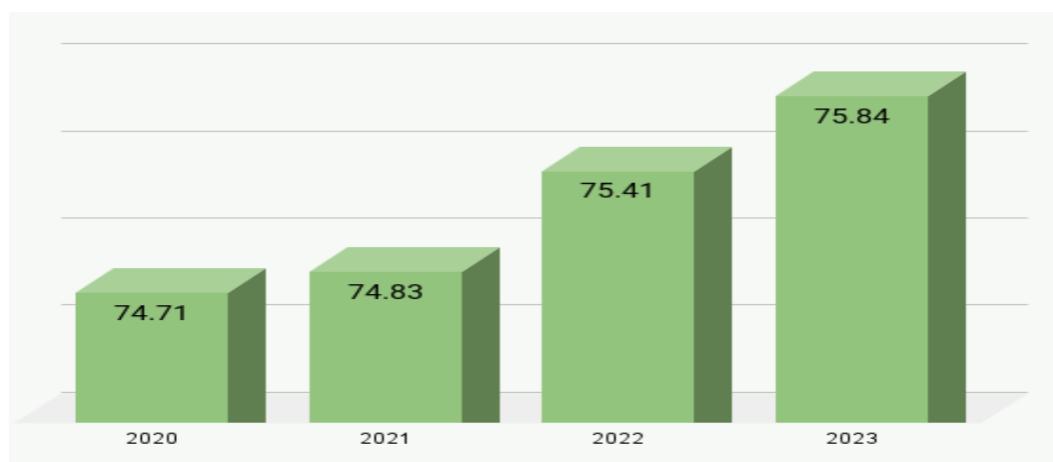
IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990. Komponen IPM yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan PDB per kapita. Pada tahun 1991 terjadi penyempurnaan komponen IPM yang digunakan, yaitu AHH, AMH, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan PDB per kapita. Pada tahun 1995 terjadi penyempurnaan kembali terhadap komponen yang digunakan, yaitu AHH, AMH, kombinasi APK, dan PBD per kapita. Pada tahun 2010 UNDP melakukan perubahan terhadap metodologi yang digunakan yaitu AHH, RLS, HLS dan PNB per Kapita serta penghitungan agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian pada tahun 2011 dan 2014 penyempurnaan metodologi yaitu mengganti tahun dasar PNB dari 2005 menjadi 2011 serta merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan IPM Kabupaten Luwu Timur sebagian besar menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran untuk mengumpulkan data kependudukan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang terdapat dalam kuesioner Kor dan Modul.



Pembangunan manusia di Luwu Timur terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Luwu Timur sudah berada di level "tinggi". Selama 2020-2023, IPM Luwu Timur rata-rata meningkat sebesar 0,5 persen per tahun, dari 74,71 pada tahun 2020 menjadi 75,84 pada 2023. Peningkatan IPM Luwu Timur 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,01 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,33 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,41 persen menjadi 0,32 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,25 persen menjadi 0,11 persen. Adapun Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,25 persen menjadi 0,08 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2023

Grafik 2.1
Perkembangan IPM Kab Luwu Timur Tahun 2020 – 2023



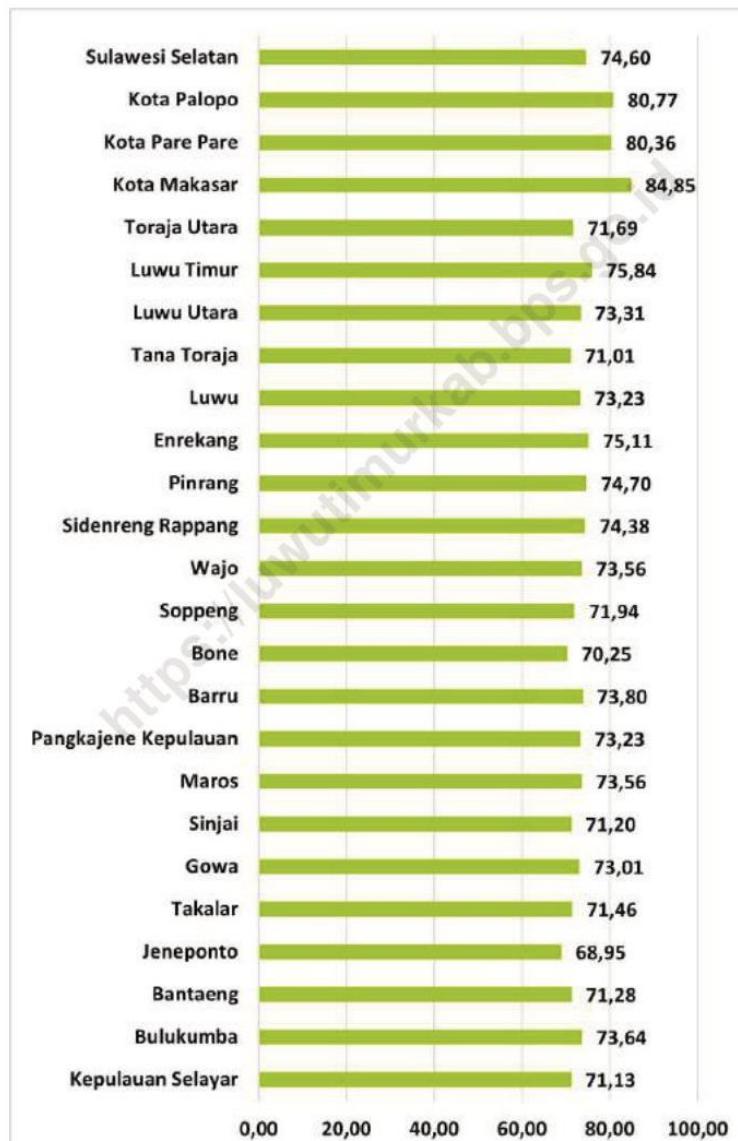
Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur, Indeks Pembangunan Manusia, Publikasi 31 Desember 2023

Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar 75,84, menempati peringkat 4 di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2019 sudah berstatus tinggi. Selama periode 2020-2023 angka IPM Kabupaten Luwu Timur selalu setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu, juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk jajaran kabupaten/kota di wilayah luwu raya, IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 berada pada posisi kedua setelah Kota Palopo. Sejak periode 2010 hingga 2023 capaian IPM tertinggi di wilayah luwu raya dicapai oleh Kota Palopo. Pada tahun 2023 IPM Kota Palopo mencapai 80,77 kemudian pada posisi kedua adalah Kabupaten Luwu Timur dengan capaian sebesar 75,84 dan posisi ketiga di wilayah luwu raya adalah Kabupaten Luwu dengan capaian IPM sebesar 73,23. Adapun perkembangan Indeks Pembangunan se-Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:



Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Menurut
Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023



Sumber: BPS –Indeks Pembangunan Manusia, Tahun 2023

2.1.2 Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 mencapai 788,85 ribu jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 mencapai 21,57 ribu jiwa. Angka ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 9 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

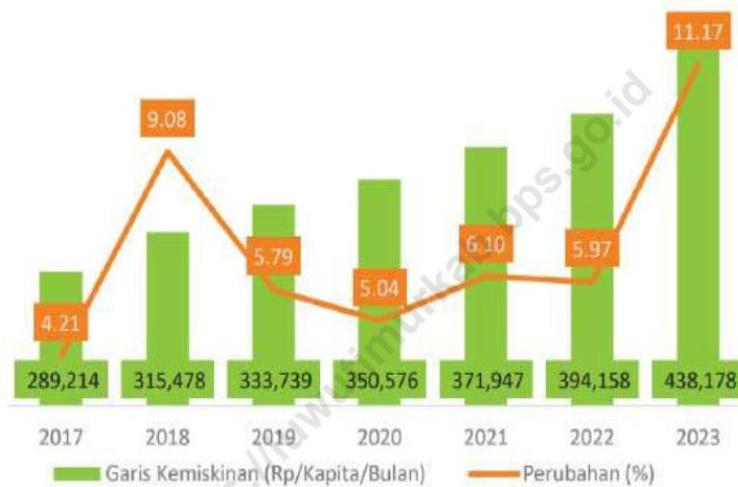


kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN 2017 – 2023

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama tahun 2017 – 2023, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sekitar Rp 289.214 perkapita/bulan dan di tahun tersebut Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar sebesar 4,21 persen. Selanjutnya di tahun 2018 Garis Kemiskinan menjadi Rp 315.478,- perkapita/bulan dengan peningkatan sebesar 9,08 persen. Pada tahun 2018 persentase peningkatan Garis Kemiskinan adalah yang paling besar sejak tahun 2017 hingga 2022. Pada tahun 2019, Garis kemiskinan Kabupaten Luwu Timur menjadi Rp 333.739,- perkapita/bulan, kemudian di tahun 2020 Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur naik 5,04 persen menjadi Rp 350.576,- perkapita/bulan, pada tahun 2021, Garis Kemiskinan naik 6,10 persen menjadi Rp 371.947,- perkapita/bulan, pada tahun 2022, garis kemiskinan turun menjadi Rp.394.158 rupiah/kapita/bulan dan terakhir pada tahun 2023, garis kemiskinan turun menjadi Rp.438.178 rupiah/kapita/bulan

Grafik 2.2
Garis Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur,
Tahun 2017-2023



Sumber: BPS – Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Berdasarkan hasil tabel, dapat dipaparkan bahwa Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, dengan garis kemiskinan 438.178 rupiah/kapita/bulan, terdapat 21,57 ribu atau 6,93 persen penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur.



Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 20,89 ribu atau 6,81 persen penduduk miskin.

Grafik 2.3
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur,
Tahun 2017-2023



Sumber: BPS – Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

2.1.3 Angka Pengangguran

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar ketenagakerjaan dan dunia usaha. Sektor ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan selain itu dapat megatasi permasalahan pengangguran. Salah satu sasaran utama pembangunan ketenagakerjaan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja. Angkatan Kerja di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 157.300 jiwa dan 148.779 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir (94,58 persen).

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Luwu Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 sebanyak 5.732 orang. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan dibandingkan laki-laki, tercatat pada tahun 2023 sebanyak 4.158 laki-laki dan 1.574 perempuan pencari kerja yang terdaftar.



Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja/Economically Active	98.330	58.970	157.300
1. Bekerja/Working	93.526	55.253	148.779
2. Pengangguran Terbuka/ Unemployment	4.804	3.717	8.521
Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	18.040	51.795	69.835
1. Sekolah/Attending School	8.813	9.853	18.666
2. Mengurus Rumah Tangga/ Housekeeping	3.254	39.777	43.031
3. Lainnya/Others	5.973	2.165	8.138
Jumlah/Total	116.370	110.765	227.135

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Tabel 2.3

Data Jumlah Pencari Kerja terdaftar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Pencari Kerja Terdaftar Registered Job Applicants		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Burau	333	129	462
Wotu	282	126	408
Tomoni	158	70	228
Tomoni Timur	114	56	170
Angkona	205	58	263
Malili	761	252	1.013
Towuti	861	308	1.169
Nuha	595	228	823
Wasuponda	588	215	803
Mangkutana	171	93	264
Kalaena	90	39	129
Luwu Timur	4.158	1.574	5.732

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024



Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami penurunan dari 161.470 orang pada tahun 2022 kemudian, turun sebanyak 4.170 orang pada tahun 2023. Penduduk usia kerja mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Luwu Timur. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 67,48 persen atau 157.300 orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 148.779 ribu orang penduduk bekerja dan 8.521 orang pengangguran.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang termasuk Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2019-2023

No	Kegiatan Utama	2019	2020	2021	2022	2023
11	Angkatan Kerja :	137.236	157.509	162.182	161.470	157.300
	• Bekerja (<i>ribu jiwa</i>)	138.234	150.480	154.130	154.240	148.779
	• Pengangguran Terbuka (<i>ribu jiwa</i>)	5.502	7.029	8.052	7.230	8.521
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	67,48	72,36	73,14	71,51	67,48
3	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3.810	4.460	4.960	4.480	5.420

Sumber: Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2024

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun menjadi 67,48 persen dibandingkan tahun 2021 (73,14 persen). Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik yang menjadi penduduk bekerja maupun sebagai pengangguran.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian kabupaten luwu timur dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pertanian

Pada tahun 2023, produksi tanaman sayuran terbesar yang dihasilkan adalah tanaman kangkung dengan produksi 2.943 kw dari luas panen sebesar 165 hektar. Sedangkan produksi tanaman buah-buahan terbesar adalah buah semangka sebesar 6.003 kuintal, sedangkan Komoditas Perkebunan Rakyat unggulan di Kabupaten Luwu Timur adalah Kelapa Sawit. Pada tahun 2023, kecamatan Wotu merupakan penghasil Kelapa Sawit terbanyak yang mencapai 23.820,10 ton dari luas area 1.430,75 hektar.

b. Pertambangan dan Penggalian

Produksi Nikel Mate PT Vale Tbk tahun 2023 sebesar 71.656 metrik ton, jumlah ini meningkat 19,25% dibanding tahun 2022. Produksi tertinggi terjadi pada triwulan 4 sebanyak 19.346 metik ton



c. Kehutanan

Berdasarkan SK 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 pada tahun 2022, luas kawasan hutan dan konservasi perairan di Kabupaten Luwu Timur mencapai 549.638,25 hektar. Kecamatan dengan kawasan hutan dan konservasi perairan terluas adalah Towuti, yaitu 175.653,33 hektar.

d. Peternakan

Populasi ternak terbanyak di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 adalah sapi potong yang mencapai 18.002 ekor diikuti oleh kambing potong dengan jumlah 12.339 ekor

e. Perdagangan

Tahun 2023, di Kabupaten Luwu Timur terdapat 12.623 sarana perdagangan yang terdiri dari 5.827 kios, 3.972 toko, 2.785 warung dan 39 pasar. Pada tahun 2023 lalu lintas bongkar muat penumpang dan barang di Pelabuhan Timampu mengalami penurunan. Total bongkar muat penumpang tahun 2023 turun 24,69 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut)

f. Energi

Jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2023 mencapai 13.342 pelanggan, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 18.474 pelanggan.

Jumlah pelanggan PLN pada tahun 2022 mencapai 76.599 pelanggan, meningkat bila dibanding dengan tahun 2021 yang mencapai 75.006 pelanggan.

g. Pariwisata

Pada tahun 2023, terdapat 90 rumah makan/restoran di Luwu Timur. Kecamatan dengan jumlah rumah makan/restoran terbanyak adalah Kecamatan Malili sebanyak 22 rumah makan/restoran. Sementara itu pada tahun 2023, jumlah akomodasi hotel yang ada di Kabupaten Luwu Timur mencapai 31 buah. Kecamatan Nuha memiliki jumlah akomodasi hotel terbanyak yaitu 12 akomodasi. Selanjutnya kecamatan Malili dengan jumlah akomodasi hotel sebanyak 10 akomodasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2018 sebesar 3,39%, tahun 2019 sebesar 1,17%, dan tahun 2020 sebesar 1,46%, akan tetapi ditahun 2021, Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan Pertumbuhan ekonomi sebesar -1,39% dan ditahun 2022, pertumbuhan ekonomi, mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen hingga tahun 2023 mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,66%. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : Pertambangan dan Penggalian; Pertanian,



Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Industri Pengolahan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sehingga hal ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur berjalan secara optimal. Terkhusus pada produktivitas sektor-sektor perekonomian yang umumnya berbasis sumber daya alam, baik tambang maupun non tambang, terkelola dengan baik.

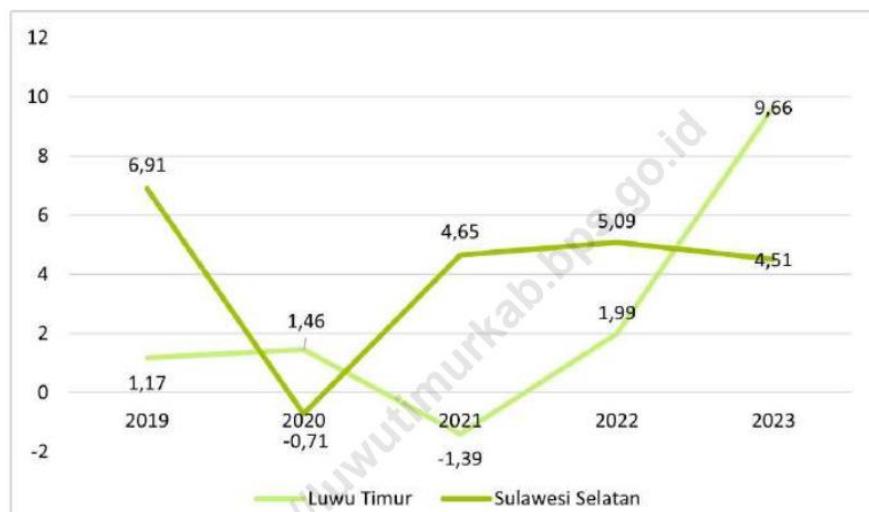
Tabel 2.5
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur 2019-2023

No	Tahun	Laju Pertumbuhan (%)
1	2019	1,17
2	2020	1,46
3	2021	-1,39
4	2022	1,99
5	2023	9,66

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024

Laju pertumbuhan PDRB 2023 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 4,51 %, nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan sebesar 9,66%.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (%) Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024



Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024

h. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada waktu tertentu. Penyusunan PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan. Yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Untuk Penyajian Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur, menyajikan data Pendapatan Domestik Bruto menurut lapangan usaha.

i. PDB menurut lapangan usaha

Mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.



Tabel 2.6
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	3.183,97	3.175,95	3.308,98	3.254,37	3.293,12
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	8.447,71	8.587,77	7.916,77	8.048,03	9.395,08
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	521,87	507,75	541,15	581,75	566,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	10,03	10,52	11,17	11,79	12,49
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,21	1,32	1,47	1,61	1,65
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.403,98	1.448,20	1.559,00	1.598,88	1.697,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	669,82	662,57	707,10	762,50	793,34
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	111,86	97,39	103,94	116,07	119,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	27,79	24,23	24,80	27,26	28,39
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	294,89	328,12	353,19	376,91	364,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	141,69	147,33	154,80	158,51	164,95
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	295,87	313,48	331,40	351,83	354,14
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,82	7,15	7,42	7,89	8,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	348,46	345,81	366,50	377,25	406,18
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	317,69	337,64	356,56	367,14	396,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	219,43	245,15	268,62	288,51	306,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	18,86	16,54	17,62	18,91	19,63
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		16.022,95	16.256,90	16.030,50	16.349,21	17.928,43

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2024



Tabel 2.7
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kab. Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	5.005,81	5.157,68	5.906,03	6.229,88	6.799,93
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9.502,35	9.677,50	10.387,74	14.212,80	15.441,18
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	801,19	790,88	862,98	958,55	952,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	10,22	10,60	11,35	12,09	13,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,47	1,62	1,85	2,05	2,12
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.192,08	2.269,46	2.544,55	2.752,09	3.017,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	882,67	883,23	961,72	1.077,26	1.162,10
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	164,43	147,15	167,57	200,23	221,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	46,13	41,37	42,48	48,38	50,15
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	325,47	362,77	390,48	420,65	405,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	210,78	221,04	255,26	255,26	274,71
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	509,27	542,98	574,09	629,84	611,98
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	12,10	11,27	11,94	13,20	14,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	566,44	573,81	613,94	636,87	696,14
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	454,55	486,91	515,92	540,25	588,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	280,44	325,95	359,29	391,02	414,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	28,84	25,57	27,28	29,98	31,35
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		20.994,22	21.529,81	23.614,52	28.410,41	30.695,95

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2024



Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5
F	Konstruksi/Construction	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	5,72	3,98	5,08	2,40	4,06
L	Real Estat/Real Estate Activities	7,80	5,95	5,72	6,17	0,66
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	10,51	-8,52	3,79	6,33	5,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	5,52	-0,76	5,98	2,93	7,67
P	Jasa Pendidikan/Education	7,22	6,28	5,60	2,97	8,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,74	11,72	9,58	7,40	6,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	9,28	-12,32	6,54	7,32	3,80
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66

Sumber: Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2024



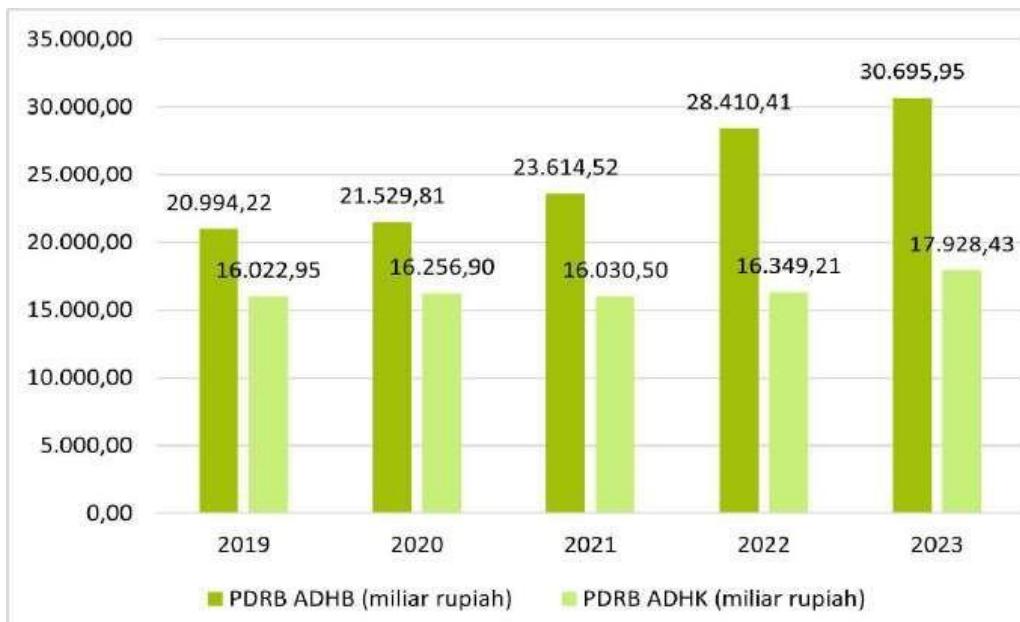
Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 30,70 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,30 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 17,93 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi percepatan ekonomi sebesar 9,66 persen.

2.1.5 Pendapatan Perkapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah PDRB perkapita. Indikator ini merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk sebagai akibat dari adanya aktivitas produksi. Meskipun indikator ini belum bisa menggambarkan pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah, namun kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita. PDRB perkapita dihasilkan dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, maka PDRB perkapita akan naik, namun sebaliknya bila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka PDRB perkapita akan turun.

Diagram 2.1

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (juta rupiah), 2019– 2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024



Tabel 2.9
PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Kategori	T a h u n				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	20.994,22	21.529,81	23.614,52	28.407,91	30.695,95
Jumlah Penduduk	300.078	296.741	300.511	305.521	313.404
PDRB Perkapita	71.340,00	72.850,00	78.580,00	92.980,00	99.490,00

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2023

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Salah satu indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai suatu wilayah harus dibarengi dengan pemerataan pembangunan khususnya pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan secara adil dan merata.

Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi gini rasio Luwu Timur Tahun 2023 adalah 0,393. Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga hal tersebut mengindikasikan kesenjangan di Kabupaten Luwu Timur masih lebih lebar dibandingkan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil perhitungan dari data Susenas 2020 hingga tahun 2021, gini rasio penduduk Kabupaten Luwu Timur sudah mencapai 0,396. Berdasarkan klasifikasi tingkat kesenjangan, distribusi pendapatan di Kabupaten Luwu Timur secara umum termasuk dalam kategori kesenjangan sedang. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur di Tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami ketimpangan tetapi masih dalam ketimpangan kategori sedang.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 jika diukur dengan menggunakan kriteria Bank Dunia termasuk ke dalam kategori ketimpangan sedang. Ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur yang terjadi diduga dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan penduduk antar wilayah di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa wilayah/kecamatan di Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi sumber daya alam yang punya nilai tinggi seperti kecamatan Nuha yang merupakan lokasi pertambangan nikkel.

Hal ini juga dapat lebih dijelaskan dari disparitas tingkat produktifitas antar sektor ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Sektor ekonomi yang memiliki tingkat produktifitas cukup rendah adalah sektor perdagangan/reparasi/hotel/rumah makan. Sektor ekonomi berikutnya dengan tingkat produktifitas yang rendah yaitu sektor jasa-jasa dan sektor pertanian dan sektor lainnya (sektor pertambangan, konstruksi, listrik, air, real estate, dan lain-lain) memiliki tingkat



produkstifitas yang cukup tinggi. Distribusi pendapatan yang masuk dalam kategori sedang ini merupakan peringatan dini bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar bisa mengantisipasi kesenjangan distribusi pendapatan yang ada di kalangan masyarakat. Angka kesenjangan yang terjadi sekalipun masih dalam klasifikasi sedang, dalam jangka panjang dapat melebar dan penyebab terjadinya kecemburuan sosial diantara masyarakat, yang pada akhirnya menjadi pemicu munculnya kerawanan serta konflik sosial di masyarakat.

Walaupun Gini ratio Kabupaten Luwu Timur berada pada kategori sedang, akan tetapi dengan hasil Gini ratio sebesar 0,393 sudah mengindikasikan bahwa selama periode tersebut, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran pendudukan dan ini memberikan hasil penurunan jika dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya (2021) sebesar 0,396.

Sebagai ukuran tingkat pemerataan atau kesenjangan, rasio dapat memberikan gambaran mengenai tingkat dan status kesenjangan pendapatan suatu wilayah. Menurut *Michael Todaro*, seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia, bahwa nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Grafik 2.6
Gini Rasio Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 2.10
Rincian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Ratio Tahun 2018-2023		
No	Tahun	Laju Ketimpangan Pendapatan
1	2018	0,398
2	2019	0,387
3	2020	0,405
4	2021	0,396



5	2022	0,394
7	2023	0,393

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Tabel 2.11
Capaian kinerja makro menggunakan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,41	75,84	0,57
2	Angka Kemiskinan	6,86	6,99	1,895
3	Angka Pengangguran	4,48	5,42	20,982
4	Pertumbuhan Ekonomi	16.349,21	17.928,43	9,659
5	Pendapatan Per Kapita	28.410,41	30.695,95	8,045
6	Ketimpangan Pendapatan	0,394	0,393	-0,254

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun capaian kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kab. Luwu Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Hasil

Berikut ini adalah capaian kinerja keluaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjadi kewenangannya tahun 2023 berdasarkan urusan.

1) Urusan Pendidikan

Tabel 2.12
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	179	Disdikbud	Data Paud/TK yang terakreditasi
2		Jumlah peserta didik PAUD(Negeri dan Swasta) yang	7139	Disdikbud	- Dilengkapi Foto - SK Bupati Luwu



		menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			Timur, No.313/F-04/X/2022
3		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	7139	Disdikbud	
4		Jumlah minimal Kebutuhan pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
5		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	736	Disdikbud	
6		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang Memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	475	Disdikbud	
7		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	157	Disdikbud	
8		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	172	Disdikbud	<ul style="list-style-type: none"> - SD yang berakreditasi 133 - SMP yang terakreditasi 39
9		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35703	Disdikbud	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi Foto - SK Bupati Luwu Timur, No.313/F-04/X/2022
10		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35703	Disdikbud	
11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35703	Disdikbud	
12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16696	Disdikbud	
13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	175	Disdikbud	



14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	294	Disdikbud	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2195	disdik	
16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1001	Disdikbud	
17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	158	Disdikbud	
18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	33	Disdikbud	
19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	516	Disdikbud	
20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	238	Disdikbud	
21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	768	Disdikbud	
22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	387	Disdikbud	
23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	172	Disdikbud	
24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	51	Disdikbud	
25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	0	Disdikbud	Surat Pernyataan
26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	0	Disdikbud	Surat Pernyataan
27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	172	Disdikbud	- SD yang berakreditasi



					133 - SMP yang terakreditasi 39
28		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	35703	Disdikbud	- Dilengkapi Foto - SK Bupati Luwu Timur, No.313/F-04/X/2022
29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16696	Disdikbud	
30		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	35703	Disdikbud	
31		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16696	Disdikbud	
32		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	175	Disdikbud	
33		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	294	Disdikbud	
34		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2195	Disdikbud	
35		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1001	Disdikbud	
36		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	158	Disdikbud	
37		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	33	Disdikbud	Surat Pernyataan
38		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	516	Disdikbud	
39		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	238	Disdikbud	
40		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	238	Disdikbud	
41		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	768	Disdikbud	
42		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	172	Disdikbud	



43		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	51	Disdikbud	
44		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	0	Disdikbud	Surat Pernyataan
45		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	0	Disdikbud	Surat Pernyataan
46		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	7	Disdikbud	
47		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3920	Disdikbud	-
48		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3920	Disdikbud	
49		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	0	Disdikbud	Surat Pernyataan
50		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	14	Disdikbud	
51		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	14	Disdikbud	
52		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	172	Disdikbud	
53		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	9	Disdikbud	

Tabel 2.13
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome /Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi PAUD dalam	60.02%	Disdik	Jumlah siswa =7139 Jumlah penduduk



					usia 5-6=11894
2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	98.73	Disdik	Jumlah siswa =35703 Jumlah penduduk usia 7-12=36292
3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92,75	Disdik	Jumlah siswa =16696 Jumlah penduduk usia 13-15=18001
4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	31,81	Disdik	Jumlah siswa =3920 Jumlah penduduk usia 7-18=12321

2) Urusan Kesehatan

Tabel 2.14
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	DINKES	2 YAITU = RS I LAGALIGO DAN RS AWAL BROS SOROWAKO
2		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2	DINKES	2 YAITU = RS I LAGALIGO (PARIPURNA) DAN RS AWAL BROS SOROWAKO (UTAMA)
3		Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	8 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	4 Tenaga per Puskesmas	DINKES	
4		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Jenis Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	3 Tenaga per Puskesmas	DINKES	
5		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	3 Jenis tenaga	DINKES	
6		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3 Jenis tenaga	DINKES	
7		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis Alat	DINKES	



		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	7 Jenis tenaga	DINKES	
8		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Jenis tenaga	DINKES	
9		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga	DINKES	
10		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Jenis Tenaga	DINKES	
11		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/ Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga	DINKES	
12		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4 Jenis barang Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Jenis Tenaga		
13		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Jenis Tenaga	DINKES	
14		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5 Jenis barang/Alat	DINKES	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Jenis Tenaga (85) + 2 = (87) Untuk PKM Nuha dan Mangkutana masing masing tambahan 1 orang Apoteker	DINKES	

Tabel 2.15
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	<u>200</u> 313.404 =0,64	Dinkes	TT RS I LAGALIGO= 200



			$\frac{86}{313.404} = 0,27$ <p style="text-align: center;">TOTAL TT =</p> $\frac{286}{313.404} = 0,91$		<p>RS SOROWAKO=86</p> <p>TOTAL TT = 286</p>
2	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	2/2 kali 100 =100	Dinkes	2 YAITU= RS I LAGALIGO(PARIP URNA) DAN RS PT INCO SOROWAKO
3	Dinas Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,73	Dinkes	4911×100 5130 =95,73
4	Dinas Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,96	Dinkes	4908×100 4910 =99,96
5	Dinas Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,23	Dinkes	4819×100 4906 =98,23
6	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,02	Dinkes	27.283×100 29.650 =92,02
7	Dinas Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinkes	11.616×100 11.616 =100
8	Dinas Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (usia produktif)	100	Dinkes	119.162×100 119.162 =100
9	Dinas Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,25	Dinkes	15.659×100 18.809 =83,25
10	Dinas Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinkes	47.465×100 47.464 =100
11	Dinas Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	Dinkes	5262×100 5262 =100



12	Dinas Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinkes	<u>553</u> x100 553 =100
13	Dinas Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinkes	<u>34881</u> x100 3488 =100
14	Dinas Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	Dinkes	<u>5804</u> x100 5804 =100

3) Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2.16
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/kota (m)	-	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
5		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan kabupaten /kota	Ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
6		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten /kota	ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat



7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	i.3020 m ii.271 m iii.- iv.2 unit vi.- vii.32,70	Data SDA TA 2023	Data prasarana dan sarana pengaman Pantai dan Sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i.Bangunanperkuatan tebing (M) ii.tanggul Sungai (m) iii.kanal banjir (m) iv. Pintu air /bendungan pengendali banjir(unit) v.pompa banjir(unit dan kapasitas) vi.polder/kolam retensi (unit) vii.Breakwater (m) seawall dan bangunan pengaman Pantai lainnya (m)
8		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/kota (ha)	Tidak ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
9		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
10		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Tidak ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
11		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Tidak ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat



12		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ Rencana Pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
13		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	PERMEN PUPR NOMOR 04/PRT/M/2015 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI	Sungai/pantai / rawa bukan kewenangan kab tetapi kewenangan pusat
14		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	i.3020 m ii.271 m iii.- iv.2 unit v. - vi.- vii. 32,70 m	Data SDA TA 2023	Data prasarana dan sarana pengaman Pantai dan Sungai milik pemerintah kabupaten/ kota yang diminta adalah: i.Bangunan perkuatan tebing(m) ii.tanggul sungai iii.kanal banjir (m) iv.pintu air/bendung pengendali banjir (unit) v.pompa banjir(unit dan kapasitas) vi.polder/kola m retensi (unit) vii.breakwater (m) seawall dan bangunan pengaman Pantai lainnya (m)
15		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	67,44	Data dasar prasana irigasi Kabupaten LuwuTimur 2023	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 98.384,31 m dan kondisi irigasi primer 57.004,03
16		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	71,26	Data dasar prasanan irigasi Kabupaten LuwuTimur 2023	Panjang jaringan irigasi sekunder 13.484,10 m



					dan kondisi irigasi sekunder 36.213,73
17		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	72,41	Data dasar prasanan irigasi Kabupaten Luwu Timur 2023	Panjang jaringan irigasi tersier dan kondisi irigasi rusak ringan 755,60
18		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dok	Reviu RISPAM TAHUN 2021	Skoring 88,97% sesuai surat kepala balai prasarana permukiman wilayah Sulawesi selatan nomor UM 0201-CB29/286 tgl 13/02/2023
19		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	0	Bidang cipta karya	Surat pernyataan
20		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	1	PDAM WAEMAMI	
21		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Bidang cipta karya	Surat pernyataan
22		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	Bidang cipta karya	Surat pernyataan
23		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	92.734 Rumah	Dinkes	
24		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	360 Rumah	Bidang Cipta Karya	Lokasi di kec. Malili, towuti dan wasuponda
25		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	93.094 rumah	Dinkes	Rumah tinggal sanitasi layak tahun 2023 yakni 92.734 rumah



26		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	2777 Rumah	Bidang Cipta Karya	
27		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	2777 Rumah		
28		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	360 Rumah	Bidang Cipta Karya	Lokasi di kec malili (100 rumah), kec nuha (210 rumah) dan 50 di kec wasuponda
29		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	96,98 %	Dinkes	Rumah tinggal sebanyak 68056 dan rumah yang bersanitasi layak sebesar 92734 rumah
30		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	4,56%	Bidang Cipta Karya	Jumlah KK Real 91.188 dan total 2777
31		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100%	Bidang Cipta Karya	Kinerja Penyediaan SPALDT tergolong aman
32		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	96,98	Bidang Cipta Karya	
33		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	20%	Bidang Cipta Karya	Realisasi 1 unit truk tinja dengan total target 5 unit
34		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	4,2%	Bidang Cipta Karya	Target 142 m3/hari dengan realisasi 6m3
35		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%	Bidang Cipta Karya	Kinerja Penyediaan SPALD tergolong aman
36		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	4,56%	Bidang Cipta Karya	Jumlah KK Real 91.188 dan total 2777
37		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	155%	Bidang Cipta Karya	Rasio bangunan gedung yang berfungsi sebanyak 31 unit dari 20 unit yang ditargetkan



38	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	333%	Bidang Cipta Karya	Tereleasasi 60 IMB dari target 25 IMB
39	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	PERDA 15 TAHUN 2010 TENTANG BANGUNAN/GEDUNG	
40	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli bangunan/Gedung	1 DOK	Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 105/D-05/III/TAHUN 2023 tentang penetapan anggota profesiali, tim penilai teknis, pemilik bangunan Gedung dan secretariat kabupaten luwu timur	
41	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada	Bidang Cipta Karya	Surat Pernyataan
42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada	Bidang Cipta Karya	Surat Pernyataan
43	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	8 gedung terbangun, 4 gedung dimanfaatkan 3 gedung masih tahap lanjutan	Bidang Cipta Karya	
44	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2 gedung	Bidang Cipta Karya	Gedung dinas pupr dan gedung pertemuan bantea
45	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	2229,87 Km	SK Bupati nomor:151/D-05/IV/Tahun 2023 tentang perubahan ke2 atas SK Bupati nomor 340/XI/Tahun 2015 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupatn dan jalan desa di kab luwu timur	Tahun 2023
46	Panjang jalan yang dibangun	56,902 Km	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
47	Panjang jembatan yg dibangun	24,066 KM	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
48	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	56,902 Km	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023



		Aspal	24,066 KM	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
		Beton	2,923 Km	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
		Kerikil	29,912 Km	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
49		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	5,50 M	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
50		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	15,513 Km	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
51		Panjang jembatan yang direhabilitasi	810,271 KM	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
52		Panjang jalan yang dipelihara	15,513 Km	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
53		Panjang jembatan yang dipelihara	87,00 M	TA 2023	Realisasi fisik tahun 2023
54		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/ teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	3 Kegiatan	Data Dinas PUPR Tahun 2023	Kegiatan Tahun 2023
55		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	247 Orang	Daftar hadir yg mengikuti pelatihan tahun 2023	Kegiatan Tahun 2023
56		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	237 orang	Daftar hadir yg mengikuti pelatihan tahun 2023	Kegiatan Tahun 2023
57		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1 SK	Keputusan Bupati Luwu Timur nomor 376/D-05/XII/Tahun 2021	Tentang pembentukan tim Pembina jasa kontruksi kabuoaten luwu timur
58		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	764 potensi pasar APBD	Potensi pasar yang bersumber dari APBD Kab kota	
59		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	92 potensi pasar APBN	Potensi pasar yang bersumber dari APBN	
60		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1 Kegiatan	Potensi pasar yang bersumber dari pendanaan lainnya	Penanganan lonsoran kayulangi=BT S SULTENG CV.Angkasa Lentera Madani



61		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	856 paket	Paket pekerjaan Kab.Luwu Timur	
62		Tersedianya data dan profil OPD sub-urususan jasa konstruksi kabupaten/kota	1 informasi personil	Keputusan ketua tim Pembina jasa kontruksi Tentang penunjukan personal administrator pengelolaan system informasi Pembina jasa kontruksi	SK Tim Pembina Jasa Konstruksi Nomor 1/1/2022
63		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	3 kegiatan	Daftar hadir yang hadir yang mengikuti pelatihan tahun 2023	Kegiatan tahun 2023
64		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	237 orang	Daftar hadir yang hadir yang mengikuti pelatihan tahun 2023	Kegiatan tahun anggaran tahun 2023
65		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/analisis di wilayah kab/kota	237 orang	Daftar hadir yang hadir yang mengikuti pelatihan tahun 2023	Kegiatan tahun anggaran tahun 2023
66		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	28 badan usaha	Daftar kegiatan dinas PUPR	Dilaksanakan tahun 2023
67		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IJUK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Rekomendasi IJUK O Karena sejak bulan juli thn 2021 terakhir diterbitkan di dinas PUPR	Surat Pernyataan



68		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan Ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 Hasil pengawasan	Data fisik pekerjaan dinas PUPR	Data hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis klasifikasi kegiatan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan yang sama
69		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100% tanpa kecelakaan konstruksi	Kabupaten luwu timur	Tidak ada kecelakaan konstruksi
70		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 hasil pengawasan	Data fisik pekerjaan dinas PUPR	Data penmgawasan dengan klasifikasi segmentasi pasar sama
71		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	323 badan usaha		Daftar data konstruksi 2023 DPMPTSP
72		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	Surat pernyataan	Belum ada
73		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yg terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	168 Badan usaha		
74		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	28 Badan usaha	Daftar kegiatan dinas PUPR	Dilaksanakan tahun 2023
75		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Surat pernyataan	SIUK Sudah tidak lagi diterbitkan di dinas PUPR Sejak bulan juli 2021
76		Jumlah pengawasan terkait ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 jumlah pengawasan	Data kegiatan fisik dinas PUPR	Pengawasan ketidak sesuaian jenis klasifikasi usaha sama dengan kewenangan kewenangan pengawasannya



77	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 Kecelakaan	Kabupaten Luwu Timur	Tidak ada kecelakaan konstruksi
78	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	315 jumlah pengawasan	Data kegiatan fisik dinas PUPR	Jumlah pengawasan kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi sama dengan kewenangan pengawasannya

Tabel 2.17
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome / Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0		Sungai/Pantai/ Rawa bukan kewenangan Kab.tetapi kewenangan Pemerintah Pusat Sungai/Pantai/ Rawa bukan kewenangan Kab.tetapi kewenangan Pemerintah Pusat
2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, nerosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	0		
3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,58		Data dasar prasarana irigasi kabupaten luwu timur
4		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	62,6%	Bidang Cipta Karya	Jumlah total akses 38.095
5		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96,98%	Bidang Cipta Karya	Jumlah rumah tinggal sebanyak 68056 dan rumah sanitasi layak ada 92734
6		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	90,82%	Bidang Cipta Karya	
7		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	810,271 KM		Sesuai SK Bupati No.151/D-05/IV Tahun 2023



8		Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	64%	Dinas PUPR	Jumlah tenaga operator 602
9		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPR	Berdasarkan data dan informasi bidang jasa konstruksi

4) Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 2.18
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	87	RP2KPKPK	2 tanah longsor, 3 angin kencang
2		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	5	DPKPP	
3		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	5	DPKPP	
4		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	5	DPKPP	
5		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	DPKPP	
6		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	-	DPKPP	Surat Pernyataan
7		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	-	DPKPP	Surat Pernyataan
8		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	5	DPKPP	2 tanah lonsor, 3 angin kencang
9		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPKPP	Surat Pernyataan
10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	2	Bidang pertanian	
11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DPKPP	Surat Pernyataan
12		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DPKPP	Surat Pernyataan
13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yg telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1.230	DPKPP	
14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	-	DPKPP	Surat Pernyataan



No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
15		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	-	DPKPP	Surat Pernyataan
16		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	51,9	SK Kumuh	
17		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	-	DPKPP	Surat Pernyataan
18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	2,67	Bid sarpras	
19		Jumlah rumah di kab/kota	98.614	Bid.sarpras dan dinas pmd	
20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	1701	Bid sarpras	
21		Jumlah rumah tidak layak huni	7.134	Bid sarpras	
22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	-	Bid sarpras	Surat Pernyataan
23		Rasio rumah dan KK	0,0015 19	Bid sarpras	
24		Jumlah rumah pembangunan baru	-	Bid sarpras	Surat Pernyataan
25		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	1728	Bid sarpras	
26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	-	Bid sarpras	Kewenangan Dinas PUPR, Bid. Cipta Karya
27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	Bid sarpras	
28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	-	Bid. Sarpras	Kewenangan Dinas PUPR, Bid. Cipta Karya
29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-	Bid. Sarpras	Kewenangan Dinas PUPR, Bid. Cipta Karya
30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	Bid. Sarpras	tidak ada data
31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	Surat Pernyataan	tidak ada data
32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	-	Surat Pernyataan	tidak ada data
33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	Surat Pernyataan	tidak ada data

Tabel 2.19
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	5	Bid. Perumahan	



2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	2	Bid. Perumahan	
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,035977	Bid sarpras	
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,701	Bid sarpras	
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70,87	Bid sarpras	

5) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.20
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	378 kasus	Bid trantibunlin mas	Daftar pelanggaran/gangguan trantibun tahun 2023
2		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	128 orang	Bidang trantibunlin nmas	Daftar anggota satlinmas yang mengikuti pelatihan tahun 2023
3		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	32	Bidang gakda	Daftar perda/perkada yang ditegakkan
4		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 orang	Secretariat PPNS	Ftocopy SKEP PPNS
5		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	20 SOP	Bid SDM dan Sarpras	Dokumen sop tahun 2023
6		Tersedianya sarana prasarana minimal	37,58	Pengurus barang satpol PP	Daftar sarpras minimal ssesuai permendagri 17/2019
7		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
8		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	91,46%	BPBD	
9		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Dokumen rencana penanggulangan bencana
10		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	Dokumen renkon(rencna kontijensi)
11		Persentase jumlah aparatur dan warga	0,031%	BPBD	Pengembangan kapasitas tim reaksi



		negara yang ikut pelatihan			cepat (TRC) BPBD Kab Luwu Timur sebanya 40 org, sekolah lapang gempa bumi 50 org
12		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,083%	BPBD	Pelaksanaan apel siaga bencana 250 orang
13		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD	Alat WRS InaTwes (Indonesia Tsunami Early Warning System) adalah system peringatan dini gempa bumi yang berpotensi tsunami secara realtime dan dalam kurun waktu dari 5 menit dapat menjangkau seluruh wilayah di indonesia, alat deteksi gempa bumi local besar matano di 3 lokasi yaitu desa matompi, desa kalpataru dan desa atue serta alat deteksi banjir sungai kalaena di desa pertasi kencana kecamatan kalaena
14		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	BPBD	
15		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	
16		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	
17		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	
18		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	
19		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota	192 kali	Dinas damkar dan penyelamatan	
20		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	9 posko di kecamatan + 1(kantor dinas damkar dan	Dinas damkar dan penyelamatan	



			penyelamatan		
21		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ada	Dinas damkar dan penyelamatan	Dari 11 kecamatan di kab.luwu timur baru 9 kecamatan yang memiliki pos sektor damkar beserta personal dan sarpras
22		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/ desa	Tidak ada	Dinas damkar dan penyelamatan	Posko damkar masih wilayah kecamatan
23		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadam, penyelamatan dan evakuasi	ada	Dinas damkar dan penyelamatan	
24		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	12 orang	Dinas damkar dan penyelamatan	1.tahun 2023 dilat damkar 1 sebanyak 11 orang 2.dilat inspektur damkar sebanyak 1 orang
25		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Jumlah binaan satuan relawan thun 2023 sebanyak 11 desa dengan jumlah personal binaan sebanyak 55 orang	Dinas damkar dan penyelamatan	Jumlah kelompok satuan relawan yang dibentuk /dibina thn 2023 sebanyak 11 kelompok
26		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	sebanyak 3 jenis kegiatan	Dinas damkar dan penyelamatan	1. Diklat damkar I 2. Diklat inpektur pemadam 3. Pelatihan bantuan hidup dasar (BHD)

Tabel 2.21
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Bidang tribumas	Laporan /temuan/gangguan/pelanggaran tarantibun/dapat ditangani/diselesaikan



					ikan
2)		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100%	Bidang penegak perda	6 Perda/ perkada yg memiliki kasus tahun 2023 dari total 32 perda yang memuat sanksi
3)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	91,46%	BPBD	
4)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
5)		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	Jumlah korban sebanyak 1283 jiwa (633 laki-laki) dan 659 (perempuan)
6		Persentase pelayanan penyelamatan evakuasi kebakaran dan korban	75,36%	Dinas damkar dan penyelamat	-Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dalam Tingkat waktu tanggap=104 kejadian kebakaran sedang layanan diluar waktu tanggap sebanyak 34 kejadian -jumlah total kejadian kebakaran tahun 2023: 138 kejadian kebakaran
7		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.	12,25 menit	Dinas damkar dan penyelamat	-jumlah total waktu tanggap: 1.690 menit - jumlah kejadian kebakaran tahun 2023: 138 kejadian kebakaran

6) Urusan Sosial

Tabel 2.22
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	Dinsos	SIK-NG



2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	88 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	SK Bansos dan daftar peserta pelatihan bagi anak di UPTD PPSBR Maros
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	-	Belum ada
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	88 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	SK Bansos dan daftar peserta pelatihan bagi anak di UPTD PPSBR Maros
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit	Dinsos P3A	Mitsubisi Triton
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	50 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	SK Bansos (Penerima Jaminan Hidup)
7		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	-	Belum ada
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	50 orang	-	SK Bansos (Penerima Jaminan Hidup)
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	96 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Daftar penerima alat bantu
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	-	Tidak ada
11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	30 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)
13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	-	Tidak ada
14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	60 orang	Dinsos P3A	SK TKSK (Tenaga kesejahteraan Sosial)



15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	5 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Daftar Peserta pelatihan di UPTD PPSBR Maros
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1 kali	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar (ODGJ)
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	11 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Daftar Fasilitasi NIK, Akta kelahiran dan KIA
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	30 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Daftar Peserta pelatihan di UPTD PPSBR Maros
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	30 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Daftar layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	30 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	30 orang	Bidang Rehabdaya sos-Dinsos	Daftar ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa yang dirujuk ke RS)
22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	327 orang	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
23		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
24		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	10 orang	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	74 orang	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana
26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Bidang Linjamsos Dinsos	Daftar Korban Bencana



27		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	60 orang	Dinsos P3A	SK TKSK (Tenaga kesejahteraan Sosial)
----	--	--	----------	------------	---------------------------------------

Tabel 2.23
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	Dinsos	Capaain akhir sampai dengan tahun 2023 sebanyak 100 orang
2		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinsos	Jumlah korban bencana alam 327 jiwa

7) Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab luwu timur masih dalam proses penyusunan dokumen
2		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	
3		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	150	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah Perusahaan terdaftar pada tahun 2023 yaitu 150 perusahaan
4		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	33,33%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	1 program PBK Dengan klasifikasi kluster daro total tiga program urusan tenaga kerja
5		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	40%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Terdapat 30 instruktur yang meberikan pelatihan dan 20 orang diantaranya



					bersertifikat
6		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	16,12%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah peserta pelatihan sebanyak 180 orang dan dibimbing oleh insrtuktur sebanyak 30 instruktur
7		Percentase LPK yang terakreditasi	28,57%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah total LPK yang ada di luwu timur 7 LPK, 2 diantaranya telah terakreditasi
8		Percentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 7 LPK yang ada di luwu timur semuanya telah memiliki perizinan
9		Jumlah penganggur yang dilatih	306 orang	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah pengangguran yang dilatih adalah sebanyak 306 orang (186 orang peserta pelatihan kompetensi 80 orang peserta pelatihan penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta 40 orang peserta pelatihan TKM)
10		Percentase lulusan bersertifikat pelatihan	60,78%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan adalah sebanyak 306 orang (186 orang peserta pelatihan



					kompetensi 80 orang peserta pelatihan penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta 40 orang peserta pelatihan TKM) sebanyak 186 orang mendapatkan sertifikat pelatihan
11		Percentase penyerapan lulusan Lulusan bersertifikat kompetensi	37,63%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 70 orang peserta pelatihan dari 186 orang pelatihan telah terserap atau mendapat pekerjaan
12		Lulusan bersertifikat kompetensi	100%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	186 orang peserta pelatihan yang mendapatkan sertifikat, dengan rincian melalui 110 orang menerima pelatihan K3, 16 orang penerima Pelatihan BLK dan 60 orang menerima pelatihan Kerjasama dengan ATS
13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	100%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 7 orang CMI/CTKI diberikan pelatihan daftar nama terlampir
14		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	1 pelatihan	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Pelatihan kepada CPMI /CTKI Diberikan melalui sub



					kegiatan penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja
15		Percentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	62,67%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	93 perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas dari 150 perusahaan
16		Data tingkat produktivitas total	7,44	BPS	Pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan modal tambah pertumbuhan tenaga kerja)
17		Percentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	60%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	60 perusahaan yang memiliki peraturan Perusahaan yang (masih berlaku) dari 100 perusahaan yang memiliki tenaga kerja 110 orang atau lebih
18		Percentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	26.08%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	6 perusahaan memiliki perjanjian kerja Bersama (PKB) dari 23 perusahaan yang memiliki SP/SB
19		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	33 SP/SB &1 SP/SB/di luar perusahaan	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	34 sp/sb Yang dicatatkan di dinas transmigrasi dan tenaga kerja
20		Percentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	140,9%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	93 perusahaan telah Menyusun struktur



					skala upah dari total 66 perusahaan yang mengatur syarat kerja (diatur dalam PP ATAU PKB)
21		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebanyak peserta BPJS Ketenagakerjaan	100%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 105 perusahaan terdaftar sebagai pekerja BPJS Ketenagakerjaan
22		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	14%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	21 perusahaan yang berselisih dari total 150 perusahaan
23		Jumlah mogok kerja	1	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	FPE KSBSI PT Minja Global Mandiri
24		Jumlah penutupan perusahaan	0		Tidak ada Perusahaan yang ditutup
25		Jumlah perselisihan kepentingan	3	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Perselisihan kepentingan akibat PKB di PT Vale Indonesia Tbk
26		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Tdk ada perselisihan antar SP/ SB
27		Jumlah perselisihan PHK	10	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	10 Kasus PHK yang didaftarkan
28		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	48	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Daftar Perusahaan yang melakukan PHK daftar terlampir
29		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3 kasus	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	3 kasus yang diarahkan untuk bipartid
30		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS Tripartit	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	SK LKS Tripartit



31		Persentase perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	36,67%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	11 kasus yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama melalui 30 kasus yang didaftarkan
32		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	116 loker	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 116 lowongan kerja yang disebarluaskan sesuai dengan jumlah loker yang tersedia
33		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	5732 orang	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	terlampir
34		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3 BKK	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	terlampir
35		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/ kota	0	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Tidak ada pekerja khusus yang terdaftar pada dinas transmigrasi dan tenaga kerja
36		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3 Orang	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	terlampir
37		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	7 LPTKS	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Terdapat 7 LPTKS di kabupaten luwu timur
38		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	8103	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Berdasarkan aplikasi siap kerja, jumlah Perusahaan yang mengajukan perjanjian kerja selama tahun 2023
39		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Tdk ada penempatan tenaga kerja melalui IPK online (SISNAKER)
40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia	7 ORNG	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 7 orang CPMI/ CTKI yang



		(CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		kerja	menerima sosialisasi
41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	7 Orang	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 7 orang CPMI/ CTKI yang terdata
42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0		Tdk ada orang yang mendapatkan PMI /TKI mendapatkan fasilitas kepulangan
43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	53 orang	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Sebanyak 53 PMI/ TKI yang telah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan kerja
44		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Tidak ada data pemberdayaan PMI/ TKI purna dan keluarganya
45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukkan	1	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	LTSA berkedudukan di wilayah kota pare pare untuk wilayah indonseai timur

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)		Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja masih sementara Menyusun dokumen rencana tenaga kerja daerah
2)		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	25,00%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja bersertifikat 3335 orang jumlah tenaga kerja yang terdaftar di dinas tengan



					kerja dan transmigrasi sebanyak 13339 orang
3)		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	RP 190.940.307	BPS	Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur konstan (28.407.908.000) dibagi jumlah tenaga kerja luwu timur 148.779 x 100%
4)		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5,40%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola layak sebanyak 8 perusahaan dari 150 perusahaan
5)		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	29,01%	Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditetapkan 1663 orang dari jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 5732 orang

8) Urusan Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	41 SKPD	Bidang PPPA- Dinsos	Daftar Lembaga pemerintah
2		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	240 KEGIATAN	Bidang PPPA- Dinsos	Daftar kegiatan
3		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan



4		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 unit	Bidang PPPA- Dinsos	SK UPTD
5		Percentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	UPTD PPA	
6		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Sosial	Surat Keterangan
7		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/kota)	1 unit	UPTD PPA	SK Pembentukan
8		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	32 lembaga	Bidang PPPA- Dinsos	Daftar nama lembaga
9		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	300 orang	Bidang PPPA- Dinsos	Daftar nama kader
10		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	12 lembaga	Bidang PPPA- Dinsos	Daftar lembaga
11		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 lembaga	PKK DAN DWP	DPA LRA Kegiatan PKK dan DWP
12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program	Bidang PPPA- Dinsos	DPA dan LRA
13		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 unit	UPTD PPA	Perbup No 56 Tahun 2020 tentang UPTD
14		Percentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	UPTD PPA	Daftar Korban kekerasan perempuan

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perlindungan Perempuan dan Anak	Percentase ARG pada belanja langsung APBD	40,3396284	Dinsos	Daftar Anggaran dan realisasi sub kegiatan ARD pada APBD
2		Percentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,03%	Dinsos	Daftar kekerasan pada anak
3		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,51%	Dinsos	Daftar kekerasan pada perempuan



9) Urusan Pangan

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	2 desa (16)	Dinas pertanian ketahanan pangan	Table terlampir
2		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	5 gapoktan	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Table terlampir
3		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	-		
4		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	13 kelompok	Dinas pertanian dan ketahanan pangan dan kelompok Wanita tani	13 kelompok.dat a pendukung terlampir
5		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	8 desa	Dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas kesehatan, dinas social, dinas dukcapil dan BPS	Peta terlampir
6		Tertanganinya kerawanan pangan	ada		Keterangan terlampir
7		Tersalurkannya adangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	-		Keterangan terlampir
8		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	15 sampel		

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	12,65%1	DKP2 dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan	



10) Urusan Pertanahan

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100		SK terlampir
2		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100		Terdapat data pendukung
3		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak ada		Surat pernyataan kepala dinas
4		Dokumen Izin membuka tanah	Tidak ada		Surat pernyataan kepala dinas
5		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Tidak ada		Surat pernyataan kepala dinas

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Tidak ada		Surat pernyataan kepala dinas
2		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	88,16%	Bidang Pertanahan	Fasilitas Umum, sebanyak 3.352.096
3		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	Bidang Pertanahan	Luas izin yang diterbitkan 208.86 m2
4		Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	Bidang Pertanahan	Luas objek tanah landreform 90.570,715 Ha
5		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak ada		Surat pernyataan kepala dinas
6		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Bidang Pertanahan	Terdapat 3 kasus



11) Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	66,25 95,97 74,46	terlampir	terlampir
2		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota :	70,56%	Dinas lingkungan Hidup	• terlampir
3		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Dinas lingkungan Hidup	Rekap dokumen UKL/UPL THN 2023
4		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	11,11%	Dinas lingkungan Hidup	Daftar terlampir
5		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 1 Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	0	DLH Lutim (Bidang Pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup)	Belum ada MHA yang diakui dan diusulkan
6		Terfasilitasnya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLH Lutim (Bidang Pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup)	Belum ada MHA yang diakui
7		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	Dinas lingkungan Hidup	Daftar Lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pelatihan thn 2023



8		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	Dinas lingkungan Hidup	Daftar laporan / aduan tahun 2023
---	--	---	------	------------------------	-----------------------------------

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	80,09	Dinas lingkungan Hidup	Data pendukung dokumen iklim thn 2023 dan rapor IKLH thn 2023
2		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	70,56%	Dinas lingkungan Hidup	• data terlampir
3		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	Dinas lingkungan Hidup	Daftar pengawasan pelaku usaha / atau kegiatan tahun 2023

12) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Penerbitan Akta Perkawinan	100%	capil	
2		Penerbitan akta perceraian	100%	capil	
3		Penerbitan akta kematian	100%	capil	
4		Penyajian data kependudukan	100%	Capil	

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Perekaman KTP-el	98,21%	capil	
2		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	52,79%	capil	
3		Kepemilikan akta kelahiran	97,58%	capil	



4		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	80%	capil	
---	--	---	-----	-------	--

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	38 desa	PMD	
2		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	100%	PMD	
3		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	74%	PMD	
4		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	26%	PMD	

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	PMD	
2		Persentase peningkatan status desa mandiri	35,29%	PMD	

14) Urusan Statistik

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Statistik

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tersedianya buku profil daerah	Ada	BPS	https://drive.google.com/drive/u/2/folders/14JSg6zOIHfsOw8CpgZYmBK-Y0SY7ACSE
2		Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	30	BPS	Semua data survei statistik sektoral di imput di meta data Statistik



3		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	6	BPS	Semua data kompilasi statistik sektoral di imput di portal satu data
4		Jumlah survey statistik sektoral yang endapat rekomendasi BPS	1	BPS	https://romantik.web.bps.go.id/ihat-rekomendasi/V-23.7325.001
5		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	1	BPS	https://romantik.web.bps.go.id/ihat-rekomendasi/K-23.7325.001
6		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	77%	BPS	Pengumpulan File Pelatihan Metadata dan EPSS - Google Sheets
7		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	37%	BPS	Metadata 2022 - Google Drive

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	BPS	Analisis Hasil Survey Kebutuhan Data BPS Kabupaten Luwu Timur 2023 - Google Drive
2		Persentase OPD yang Menggunakan Data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	BPS	Analisis Hasil Survey Kebutuhan Data BPS Kabupaten Luwu Timur 2023 - Google Drive

15) Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	ada	Dinas pengendalian penduduk dan KB	TDK DIPERDAKAN
2		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,5 tahun	Dinas pengendalian penduduk dan KB	Pendataan keluraga thn 2023



3		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30,60%	BPS	Longfrom SP 2020
4		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	88,16%	Dinas pengendalian penduduk dan KB	Pendataan keluarga 2023 (PK2023)
5		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	159 terdiri dari 127 ppkb, 11 kecamatan dan 21 faskes	Laporan statistic rutin from dalap dan pelkon (DPPKB) THN 2023	
6		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Laporan new siaga	
7		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33,84%	Laporan new siaga	
8		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	ada	DPPKB (SK DWG)	
9		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	71,17	Laporan statistic Rutin from dalap dan pelkon (DPPKB)	
10		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	62,64	Laporan statistic Rutin from dalap dan pelkon (DPPKB)	
11		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	90,59%	Laporan statistic Rutin from dalap dan pelkon (DPPKB)	

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	P2KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,31%	SP BPS 2020	
2		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	71,15%	Laporan New siaga 2023	
3		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,38%	Pendataan keluarga 2023 pada aplikasi new	



				siaga table 16 (DPPKB)	
--	--	--	--	------------------------	--

16) Urusan Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,56%	Bidang Telematika Dan persandian	RSUD I Lagaligo memiliki dan mengelola jaringan intra sendiri
2		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97,56%	Bidang Telematika Dan persandian	RSUD I Lagaligo memiliki dan mengelola jaringan intra sendiri
3		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	100%	Persandian	Terdapat 4 sistem elektronik komunikasi intra pemerintah
4		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Bidang Telematika Dan persandian	Semua kegiatan yang sifatnya virtual baik itu kegiatan rapat maupun kegiatan yg membutuhkan live streaming di fasilitasi oleh diskominfo-sp
5		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yg sesuai standar	100%	Dinas Kominfo-SP	Seluruh opd dilingkup pemkab lutim, yaitu 41 opd teknis dan kecamatan
6		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	100%	Dinas Kominfo-SP	Seluruh perangkat daerah di lingkup pemkab lutim telah memanfaatkan layanan aplikasi khusus, diantaranya SIPD



					Perencanaan dan penganggaran, FMIS, KRISNA, SRIKANDI, LAPOR SP4N, SIYANTI, SIPATUH (Presensi Pegawai), E-PPID dan beberapa aplikasi lain
7		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	70%	Dinas Kominfo-SP	Terdapat 72 Layanan pada seluruh OPD berdasarkan data dokumen peta lintas fungsi (CFM) dan 51 Layanan yang diselenggarakan secara elektronik
8		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	95%		Tahun 2023, seluruh layanan aplikasi pemerintah kab luwu timur yg berada di bawah domain dan subdomain luwutimurkab.go.id telah menerapkan penggunaan sertifikat elektronik (SSL) dan beberapa diantaranya menerapkan tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN seperti SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan), OSS & SICANTIK (Layanan Perizinan), SRIKANDI (Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi),



					SIAP KERJA (Layanan Ketenagakerjaan) dan SIYANTI (Sistem Informasi Layanan Cuti) Adapun layanan elektronik yang belum memanfaatkan Sertifikat Elektronik adalah layanan aplikasi umum berbasis desktop seperti SIMDA BMD dan SISWASKEUDES (Layanan Pengawasan Keuangan Desa Oleh Inspektorat).
9		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	66%		Berdasarkan data tahun 2023 terdapat 44 aplikasi khusus (tidak termasuk website OPD) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan sebanyak 29 aplikasi diantaranya telah ditetapkan melalui surat keputusan bupati nomor 34B D-17 XI TAHUN 2022 Tentang Penetapan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
10		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem	0	Dinas Kominfo-SP	Surat Pernyataan



		penghubung layanan pemerintah			
11		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo-SP	Semua opd sudah punya website resmi dan disimpan di pusat data kab luwu timur
12		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	Dinas Kominfo-SP	Semua opd sudah punya website resmi dan disimpan di pusat data kab luwu timur
13		Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	93&	Bidang Statistik	Terdapat 2 OPD yg belum memperbarui data,Bapelitbang da & Sekretariat Daerah
14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	93&	Bidang Statistik	Terdapat 2 OPD yg belum memperbarui data,Bapelitbang da & Sekretariat Daerah
15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi Inovasi yang mendukung smart city	76%	Bidang Aptika	Terdapat 31 perangkat daerah yg mengimplementasi inovasi yg mendukung smart city
16		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Dinas Kominfo SP	Terdapat 9 pengelola TIK
17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100%	JDIH Kabupaten Luwu Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 46 tahun 2017 tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di lingkup tahun 2018-2022 2. Perbup nomor 47 tahun 2017 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah daerah.



					3. SK Bupati Luwu Timur, nomor 34B D-17/XI/Tahun 2022 tentang Penetapan sistem elektronik pemkab lutim 4. Perbup nomor 74 tahun 2023 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik 5. SK Bupati Luwu Timur nomor 293/D-17/IX/Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi SPBE Kab Luwu Timur.
18		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	140%	Bidang IKP dan Humas	Semua media partner yg bekerjasama dengan pemkab luwu timur baik online maupun cetak
19		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	72,40 %	Bidang IKP dan Humas	Konten Informasi yg berupa program dan kebijakan pemerintah berjumlah 5 media yg menghasilkan 362 konten
20		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi(STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	130%	Bidang IKP dan Humas	Dari 8 Layanan informasi public yg dimiliki oleh pemkab yg dibawah naungan perundang-undangan yg berlaku dengan memiliki strategis komunikasi dan SOP dapat menghasilkan layanan informasi public diatas rata-rata



Tabel 2.43
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,56%	Dinas Kominfo SP	Terdapat 40 OPD yg memiliki jaringan internet
2		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	Dinas Kominfo SP	Terdapat 14 daftar layanan public pemerintah kab luwu timur yg diselenggarakan secara online
3		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Kominfo SP	Jumlah masyarakat dari umur 15/59 tahun sebanyak 201.765 orang dan jumlah penduduk luwu timur sebanyak 313.404 jiwa

17) Urusan Perhubungan

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	100%	Dinas perhubungan	
2		Terlaksananya pelayanan uji berkala	104,79%	Dinas perhubungan	
3		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Dinas perhubungan	Telah ditetapkan 2 tarif lintas penyebrangan terhadap 2 lintas penyeberangan dalam Kab Luwu Timur
4		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%	Dinas perhubungan	

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Rasio konektivitas Kabupaten Kota	0,58	Dinas perhubungan	IK2(Angkutan Sungai,danau dan



					penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kotatsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten Kota tersebut.
2		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,73	Dinas perhubungan	Perhitungang kinerja jalan /lalu lintas (SMP/JAM) / Kapasitas Ruas jalan (SMP/jam)

18) Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	20	DISPARM UDORA	
2.		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	DISPARM UDORA	
3.		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	30	DISPARM UDORA	
4.		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	20 OKP	Tidak ada juknis di pusat	
5.		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0	DISPARM UDORA	
6.		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	7 Even		

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	20 Orang	DISPARM UDORA	
2		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	50 OKP (Orang)	DISPARM UDORA	
3		Peningkatan Prestasi Olahraga	26 org	DISPARM UDORA	

19) Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	4,61%	Dinas penanaman modal dan pelayanan	Pemenuhan izin usaha komperasi melalui online single submission



		keanggotaan dalam 2daerah kabupaten/kota		terpadu satu pintu	(oss) merupakan kahrusan bagi pelaku usaha memiliki legalitas berupa izin usaha tidak terkecuali bagi Lembaga koperasi (PERMENKOUKM NO,8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam
2		Percentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Dasar Hukum (UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, permenkop UKM-RI NO.15/per/m.kuk m/IX/2015
3		Percentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,39%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	MENGATUR TENTANG PENGAWASAN KOPERASI TERCANTUM DALAM PASAL 21.UU NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN INDONESIA DAN MEMBAHAS TENTANG KEWENANGAN PENGAWAS KOPERASI
4		Percentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,29%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Terdapat 24 koperasi yang mengikuti bimtek penilaian Kesehatan dari total 68 ksp/ usp yang ada
5		Percentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8.67%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Terdapat 15 koperasi yang mengikuti diklat per koperasi dari 173 kopersi
6		Percentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten /kota	0,23%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Terdapat 30 orang terdiri dari 15 koperasi (msing2 koperasi mengutus 2 orang peserta) mengutii dilat perkoperasian
7		Percentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		Tidak terlaksana



8		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,57%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Kopkar VALE Menjadi satu satunya mendapoatkan fasilitasi pembiayaan thn 2023
9		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,35%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Thn 2023
10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,57%		Kopkar VALE Menjadi satu satunya mendapoatkan fasilitasi pembiayaan thn 2023
11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,15%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	Koperasi yang menerima fasilitasi pemasaran yaitu Kptan anugrah dan Kop ammannagappa
12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	84,39%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	terlampir
13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	3,46%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	terlampir
14		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2,49%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	
15		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	5,47%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	
16		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,28%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	
17		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	3,86%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	
18		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	3,43%	Dinas perdagangan koperasi dan	



		pemasaran		UMKM dan perindustrian	
19		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2,57%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	
20		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	1.99%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	32,94%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	terlampir
2		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,49%	Dinas perdagangan koperasi dan UMKM dan perindustrian	

20) Urusan Penanaman Modal

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan pemerintahan	IKK Output/keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	ada	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
2		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tdk ada	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
3		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tdk ada	PMPTSP	Surat Pernyataan
4		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Tdk ada	Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
5		Kegiatan pameran penanaman modal	4 kali	Dinas PMPTSP	
6		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Dinas PMPTSP	Surat Pernyataan
7		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	28 kontruksi	Dinas PMPTSP	



8		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	11.261 izin	Dinas PMPTSP	
9		Laporan realisasi penanaman modal	4.024.437.259.150	Dinas PMPTSP	
10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Dinas PMPTSP	
11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	298 usaha	Dinas PMPTSP	
12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	2 dokumen data	Dinas PMPTSP	

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-1,653478	Dinas PMPTSP	

21) Urusan Persandian

Tabel 2.52
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outpu/ keluaran	Capaian kinerja	Sumbe r data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Urusan Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Kominfo	Kegiatan tidak dilaksanakan
2		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	95,45 %	Dinas Kominfo	44 aplikasi yg menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)
3		Persentase sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	95,45%		
4		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100 % (2 titik)	Dinas Kominfo	1. email sanapati



Tabel 2.53
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1)		Tingkat keamanan informasi pemerintah	57%	Dinas Kominfo (Indeks KAMI)	

22) Urusan Kebudayaan

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Kebudayaan

No	Urusan	IKK Output/Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	24	Disdikbud	- 24 Sanggar Seni
2		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	15	Disdikbud	- 3 warisan budaya tak benda - 12 warisan budaya benda - SK dan daftar terlampir
3		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	15	Disdikbud	- 3 warisan budaya tak benda - 12 warisan budaya benda - SK dan daftar terlampir
4		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	24	Disdikbud	24 Sanggar Seni
5		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	12	Disdikbud	Registrar cagar budaya
6		Perlindungan cagar budaya kabupaten/ kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	4	Disdikbud	- Kapal Jepang - Goa Andomu - Benteng Wotu - Makam



					Rahamp uú
7		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
8		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	-	Disdikbud	- Surat Pernyataan
9		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	-	Disdikbud	- Surat Pernyataan
10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Disdikbud	SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/159/Dik bud
14		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	Disdikbud	SK Bupati Luwu Timur, No.103/D-03/III/Tahun 2023 tgl 10 Maret 2023
16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	-	Disdikbud	Surat Pernyataan
19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	-	Disdikbud	Surat Pernyataan



Tabel 2.55
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/Hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Terlestariannya cagar budaya	27,27	Disdikbud	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar objek cagar budaya yang telah di SK - Daftar objek yang diduga cagar budaya SK Bupati No. 293/D-151/IX/Tahun 2022

23) Urusan Perpustakaan

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Perpustakaan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,7145	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data koleksi perpustakaan kab luwu timur
2		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	47,5%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data kunjungan perpustakaan
3		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0014	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
4		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	23%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah perpustakaan yang memiliki npp 253
5		Jumlah pemasyarakat gemar membaca di masyarakat	231 kali	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data permasyarakat gemar membaca
6		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan
7		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan



8		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan
---	--	---	-----------	----------------------------------	------------------

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
1)		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,43	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	kajian kegemaran membaca masyarakat kabupaten luwu timur
2)		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	86,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	kajian IPLM kabupaten luwu timur

24) Urusan Kearsipan

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar Arsip terlampir(penyimpanan defiling cabinet)
2		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar arsip terlampir(penyimpanan dalam dos)
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar arsip terlampir penyimpanan di depo)
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1,85%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sudah diupload ke jikn dan menunggu verifikasi dari ANRI
5		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	2.000 (80 box)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar arsip terlampir(berita acara pemusnahan)
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Pernyataan
7		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau	4641	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Daftar arsip terlampir(penyimpanan didepot arsip)



		dibubarkan dan pemekaran daerah ecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi			
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga karsipan kabupaten/kota yg sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Karsipan	Surat Pernyataan
9		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang inyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Karsipan	Surat Pernyataan
10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga karsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	13 berkas	Dinas Perpustakaan dan Karsipan	Daftar arsip terlampir dan tersimpan di depot arsip

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
1		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan	75,46%	Dinas Perpustakaan dan Karsipan	
2		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	110.9%	Dinas Perpustakaan dan Karsipan	

25) Urusan Kelautan Dan Perikanan

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	226 RTP	Statistik Perikanan	
2		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	75%	Data Asset Dinas Perikanan	
3		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	121 rekomendasi	Data Dinas Perikanan	Izin Usaha Perikanan (IUP) dikeluarkan oleh Dinas PM & PTSP yang dikeluarkan



					dinas Perikanan rekomendasi
4		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	1.059 orang kelompok	Data Dinas Perikanan	
5		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	75.640 ekor	Data Dinas Perikanan	

Tabel 2.61
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/hasil	Capaian kinerja	Sumber data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	119,46%	Statistik Perikanan	

26) Urusan Pariwisata

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	61 obyek	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
2		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	52 (41 gasebo) 11 tolier	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
3		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
4		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	47	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
5		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4 Even	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
6		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
7		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
8		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
9		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	93,33%	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	



10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
----	--	--	---	---	--

Tabel 2.63
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	47%	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
2		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	35,07%	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
3		Tingkat Hunian akomodasi	843 kamar	Dinas pariwisata kepemudaan dan olah raga	
4		Kotribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,102%	statistik	PDRB dlm pariwisata 31.35 juta pdrb kab.lutim 30.695,95
5		Kotribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-	statistik	JUMLAH PAD 199.060.412.240, 72

27) Urusan Pertanian

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	393 Klp	Dispkp	Terdapat 3 kelompok pengadaan hands sprayer, terdapat 6 kelompok pengadaan traktor roda dua yang tidak dapat direalisasikan dan 2 unit pengadaan rubuha yang tidak dapat dibangun dikarenakan terdapat kesalahan nomenklatur (daftar terlampir) dan SK Hibah nomor 317/D-16/X/Tahun 2023 terlampir.
2		Prasaran pertanian yang digunakan	793 paket	Dispkp	Terdapat 1 kelompok yang pekerjaannya menyeberang di tahun 2024 yaitu pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani kelompok tani salo mengkobo desa laro kecamatan burau



3		Penerbitan izin usaha pertanian	-	-	Dinas pertanian hanya memfasilitasi rekomendasi izin usaha dan tidak
4		Persentase prasarana yang digunakan	100%	Dispkip	Prasarana yang dibangun pada tahun 2023 digunakan 100%
5		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	-	-	Dinas pertanian hanya memfasilitasi rekomendasi izin usaha (surat pernyataan terlampir)
6		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	98,65	Dispkip	Data terlampir

Tabel 2.65
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,26%	Dispkip	Data terlampir
2		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1,28%	Dispkip	Data terlampir

28) Urusan Perdagangan

Tabel 2.66
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : <ul style="list-style-type: none"> • Pusat perbelanjaan • Toko swalayan 	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur	
2		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur	
3		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur	Surat Pernyataan



4		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri • Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur	
5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	-	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	Surat Pernyataan
6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan	Bukan menjadi wewenang Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur
7		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	Terdapat 9 sarana prasarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan
8		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,97%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	
9		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	27.489,551 ton	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	Data terlampir
10		Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	64,53%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	Data terlampir
11		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	



Tabel 2.67
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur	
2		Persentase kinerja pupuk	82%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	Data terlampir
3		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	64,53%	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perindustrian Kab Luwu Timur	Data terlampir

29) Urusan Perindustrian

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Output/ Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	-	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan x100 per/ jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Tidak ada permohonan ,blom ada izin yg didaftarkan
2		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a. tersusunnya naskah akademik(30%) b. tersusunnya draft raperda RPIK(20%) C.Draft Raperda RPIK YANG DISETUJUI OLEH DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yg membidangi Perindustrian diprovinsi (25%) d. persetujuan draft	Dibuktikan dengan data dukung



				Raperda RPIK OLEH GUBERNUR PROVINSI (15%) e. penetapan perda RPIK(10%)	
3		Percentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yg diterbitkanper jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk di x100% Sudah tdk ada izin usaha industry(IUI) yang diterbitkan di tahun2023,karena izin usaha industry sudah terintegrasi dengan system OSS RBA (ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH)		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4		Percentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan dibagi jumlah pemohon atau pemohonan izin masuk di x 100% Tidak ada permohonan,belum ada izin yang diterbitkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5		Percentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industr kecil,menengah dan perusahaan Kawasan industr di kab/kota di SIINas per total populasi perusahaan industry kecil,menengah dan perusahaan Kawasan industry di Kab/kota <u>13 x 100%</u> 142 =0,91%		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

Tabel 2.69
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	8,81%	Dinas perdagangan koperasi UKM dan Perindustrian	



2		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	50%	Perda RIPIK	
3		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu	Tidak ada izin usaha industry (IUI) yang dikeluarkan di tahun 2023,karena izin usaha industry sudah terintegrasi dengan system OSS RBA (Online single submission riskbased approach) yang dinilai Tingkat resiko kegiatan usaha.
4		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan
5		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Tidak ada permohonan, belum ada izin yang diterbitkan
6		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	115%	Dinas perdagangan koperasi UKM dan Perindustrian	

30) Urusan Transmigrasi

Tabel 2.70
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bidang Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	SK Penetapan Kawasan	



2		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan permukiman berupa 1 kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tamping 300-500 keluarga	SK Penetapan Kawasan	
3		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 Kawasan (SKPC.SP.1. Koromolai)	SK Penetapan Kawasan	

31) Urusan Energi Sumber Daya Mineral

Tabel 2.71
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan pemerintahan	IKK Output/ keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Daya	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	-	Bagian Pemerintahan	(Surat Pernyataan) Tidak terdapat pemanfaatan panas bumi di kabupaten luwu timur

Tabel 2.72
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

NO	Urusan pemerintahan	IKK Outcome/ Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Daya	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	-	Bagian Pemerintahan	Surat Pernyataan) Tidak terdapat pemanfaatan panas bumi di kabupaten luwu timur

32) Urusan Kehutanan

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	IKK Output / Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya dokumen rencana Pengelolaan Tahura	-	Dinas Kehutanan Pemprov sulsel	Merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyanga	-		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	-		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	-		



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.74
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	IKK	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,05	LRA	Anaudited
		Rasio PAD	19,41%		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,031)	BPKP	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	BPKP	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	51,73	LRA	Anaudited
		Opini Laporan Keuangan	9	Pernyataan opini	Anaudited
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	75,47	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	75,47
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	48,18%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	48,18%
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	13,98%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	13,98%
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Pendidikan SMA kebawah 357 dan Pendidikan SMA keatas 970, jadi Total 1327)	82,04%	Buku induk pegawai (BKPSDM)	1069 jumlah pegawai untuk ijazah PT keatas 1303 pegawai diluar guru dan nakes
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) -	33,92%	Buku induk pegawai (BKPSDM)	442 jumlah pegawai fungsional
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	30,32%	Buku induk pegawai (BKPSDM)	134 pegawai yg memiliki sertifikat kompetensi
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	67,19	LRA Pokok	Audited



		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	53,61	LRA Pokok	Audited
		Assets Management	100		Audited
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	6,83	LRA 2021	Audited
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	84,09 %	BKAD	Melalui Website http://bpkd.luwutimurkab.go.id/
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	BKAD	Melalui Website http://bpkd.luwutimurkab.go.id/

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah laporan akhir yang memuat pertanggungjawaban kinerja yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan pencapaian tahun pertama RPJMD Periode 2021-2026. Dalam penyusunan LAKIP ini dimulai dari pengumpulan data dan pemilihan data dari setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang disatukan dan diperiksa ulang secara seksama, sehingga menghasilkan suatu ikhtisar mengenai hasil capaian kinerja seluruh perangkat daerah yang menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pencapaian sasaran kinerja diperoleh dengan membandingkan target yang ditetapkan setiap tahun dengan realisasi target pada indikator sasaran kinerja. Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam membandingkan yaitu, pertama apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, yang kedua apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah menetapkan 11(sebelas) sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



TABEL 2.75
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Percentase Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,10	75,84	102,35
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan berkelanjutan	2.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Maju (0,707)	Maju (0,707)	100
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,00	90,96	101,07
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	4.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,98	1,19	60,10
5	Ketersediaan lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha	5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,05	5,42	56%
6	Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	6.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,93	84,27	112,46
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	88,10	80,09	90,91
		8.	Indeks Resiko Bencana	202 (tinggi)	152,28 (tinggi)	133 %
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	9.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	A	A (78,438)**	100
		10.	Nilai SAKIP Daerah	BB (71,00)	B (66,51)	93,68
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	11.	IKM Pelayanan SPM			
		84,75				
10	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat		98,49**	116,21%		
11	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	12.	IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	84,31	87,84	104,19%
		13	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	76,81	81,67	106,33%



2.3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapaianya kinerja yang telah ditargetkan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hingga Akhir Tahun 2023 yang merupakan Tahun Kedua RPJMD 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan visi misi dan tujuan melalui 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam IKU Tahun 2022-2026. Selanjutnya ditetapkan 15 Sektor dan Program Prioritas dengan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 15 (empat belas) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023. Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

Misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh”** dengan tujuan **“Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”**. Untuk mencapai misi 1, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan Kesehatan, Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis **“MENINGKATKAN KUALITAS MANUSIA YANG BERDAYA SAING”** dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,10	75,84	102,35
Rata-Rata Capaian Kinerja			102,35%		

A. Indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara memperoleh nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :



RUMUS

$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$																				
Dimana:																				
$X_{(1)} : \text{Indeks harapan hidup}$																				
$X_{(2)} : \text{Indeks pendidikan} = \frac{2}{3}(\text{indeks melek huruf}) + \frac{1}{3}(\text{indeks rata rata lama sekolah})$																				
$X_{(3)} : \text{Indeks standar hidup layak}$																				
Indeks $X_{(3)} = X_{(i)} - X_{(i)\min} / [X_{(i)\max} - X_{(i)\min}]$																				
Dimana:																				
$X_{(1)} : \text{Indikator ke-}i (i = 1, 2, 3)$																				
$X_{(2)} : \text{Nilai maksimum sekolah } X_{(2)}$																				
$X_{(3)} : \text{Nilai minimum sekolah } X_{(3)}$																				
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM ($-X_{(i)}$)</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 ≈</td> <td>300.000 bj</td> <td>UNDP menggunakan PDB per kapita rill yang disesuaikan</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM ($-X_{(i)}$)	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ≈	300.000 bj	UNDP menggunakan PDB per kapita rill yang disesuaikan
Indikator Komponen IPM ($-X_{(i)}$)	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan																	
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)																	
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)																	
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																	
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ≈	300.000 bj	UNDP menggunakan PDB per kapita rill yang disesuaikan																	

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ditargetkan sebesar 74,10, adapun realisasi kinerja dari target berada pada angka 75,84 dengan capaian kinerja 102,35%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian IPM Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2023 meningkat 0,43 poin (0,57 persen) dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 yang berada pada angka 75,41.

Jika melihat data capaian kinerja IPM yang terdapat pada dokumen Laporan Kinerja Luwu Timur Tahun 2022 yaitu 73,92, terjadi perbedaan dengan data capaian IPM 2022 yang digunakan untuk perbandingan dengan capaian kinerja IPM 2023 pada Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Hal ini disebabkan karena sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu dimensi pembentuk IPM mengalami perubahan dari sumber data SP2010 ke sumber data LF SP2020 disebabkan terjadi perubahan karakteristik demografi dalam sepuluh (10) tahun terakhir. Oleh karena itu pada saat melakukan update capaian kinerja IPM 2022 menggunakan sumber data LF SP2020, nilai IPM yang sebelumnya 73,92 berubah menjadi 75,41, sehingga untuk menjamin data yang akurat dan terbaru pada penyusunan dokumen laporan kinerja tahun 2023 menggunakan perhitungan data hasil updating untuk IPM Tahun 2022 yaitu 75,41.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu wilayah. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan yaitu untuk memperoleh akses akan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

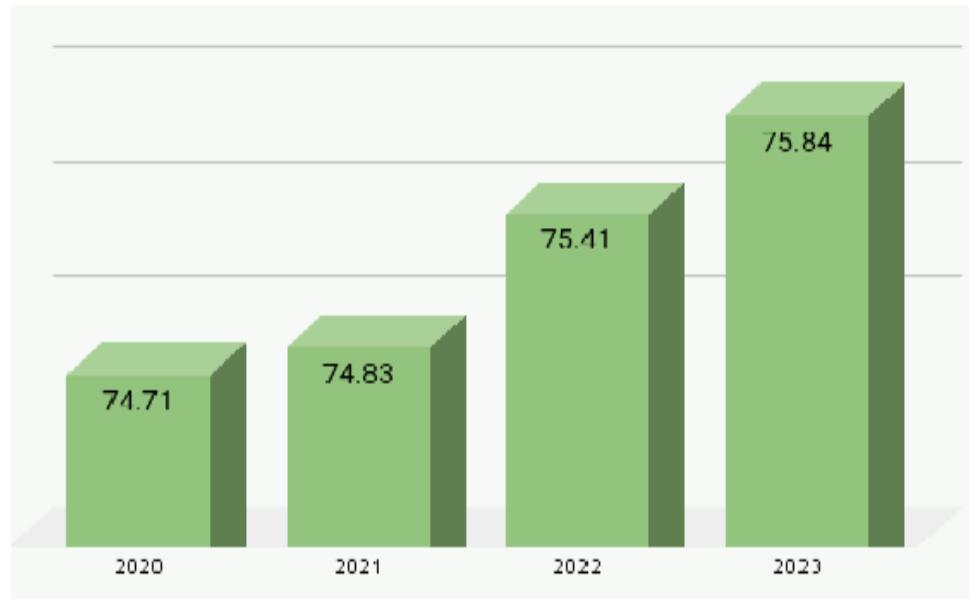
IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dengan kemudian melakukan revisi pada metode penghitungan di tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting



sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian pembangunan dalam jangka panjang, tetapi pada perkembangannya dapat menjadi rujukan untuk jangka pendek dan menengah. Sebagai indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, ada dua aspek yang biasa diperhatikan dalam menilai IPM, yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.

Pembangunan manusia di Luwu Timur terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Luwu Timur sudah berada di level "tinggi". Selama 2020-2023, IPM Luwu Timur rata-rata meningkat sebesar 0,5 persen per tahun, dari 74,71 pada tahun 2020 menjadi 75,84 pada 2023

Peningkatan IPM Luwu Timur 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah Pengeluaran Rii per Kapita sebesar 3,01 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 1,33 persen. Sementara itu, Umur Harapan Hidup (UHH) pertumbuhannya sedikit melambat, dari 0,41 persen menjadi 0,32 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,25 persen menjadi 0,11 persen. Adapun Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya juga melambat, dari 1,25 persen menjadi 0,08 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama 2020-2023 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1. Adapun grafik pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur periode 2020 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 1 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Periode 2020-2023

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)



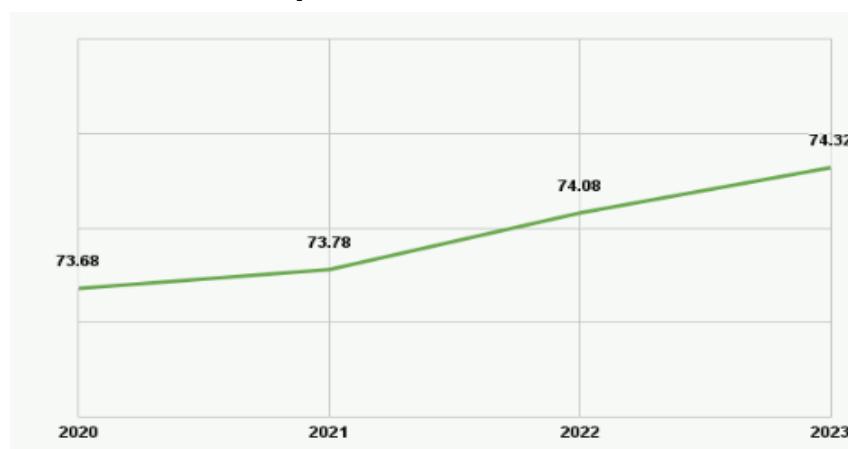
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Luwu Timur menurut dimensi penyusunnya, 2020-2023

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,68	73,78	74,08	74,32
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,83	12,84	13,00	13,01
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,80	8,81	8,92	8,93
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.814	12.886	13.058	13.451
IPM		74,71	74,83	75,41	75,84

A. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (Angka Harapan Hidup)

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,47 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup saat lahir di Luwu Timur adalah 73,68 tahun, dan pada tahun 2023 mencapai 74,32 tahun. UHH 2023 meningkat 0,24 tahun (0,32 persen) dibanding tahun sebelumnya, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan di tahun 2022 yang meningkat 0,41 persen (0,30 tahun). Adapun perkembangan angka harapan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Gambar Angka Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)
Kabupaten Luwu Timur 2012-2022**



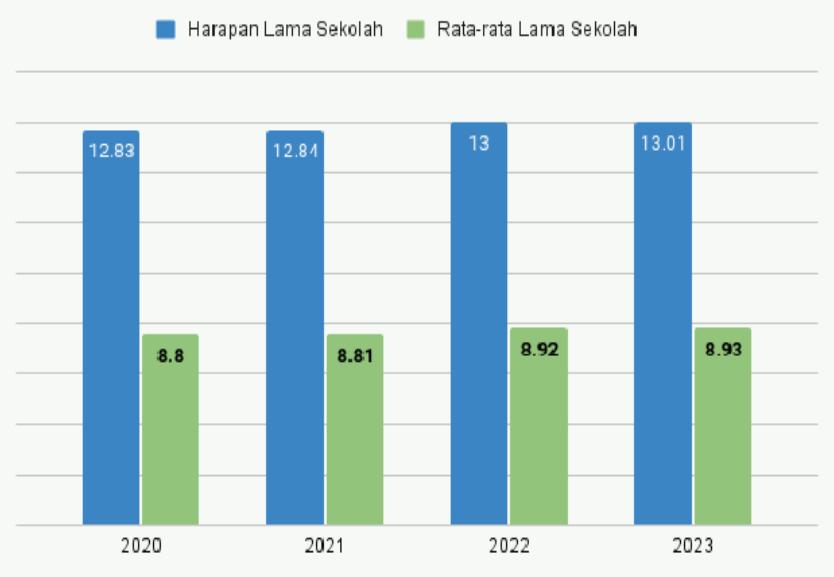
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)



B. Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah)

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Luwu Timur rata-rata meningkat 0,47 persen per tahun sementara RLS meningkat 0,49 persen per tahun. HLS dan RLS Luwu Timur 2023 meningkat 0,01 tahun dibandingkan 2022. Adapun perkembangan capaian angka rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Luwu Timur, 2020-2023



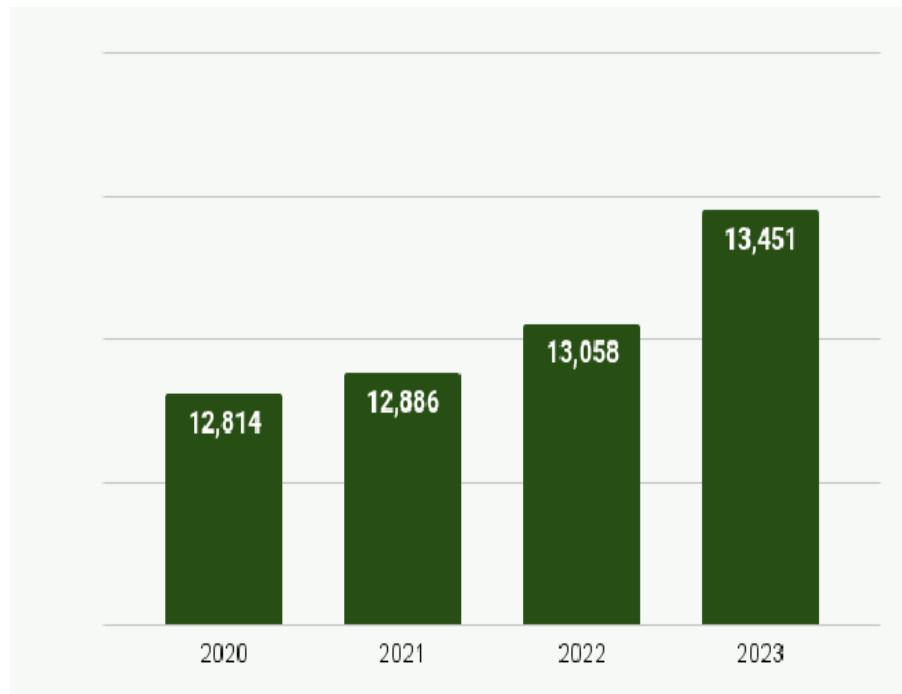
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

C. Dimensi Standar Layak Hidup

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun disesuaikan masyarakat Luwu Timur mencapai Rp 13,45 juta per tahun. Capaian ini meningkat 393 ribu rupiah (3,01 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Adapun perkembangan standar hidup layak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP)
2020-2023 (Rp.000)**



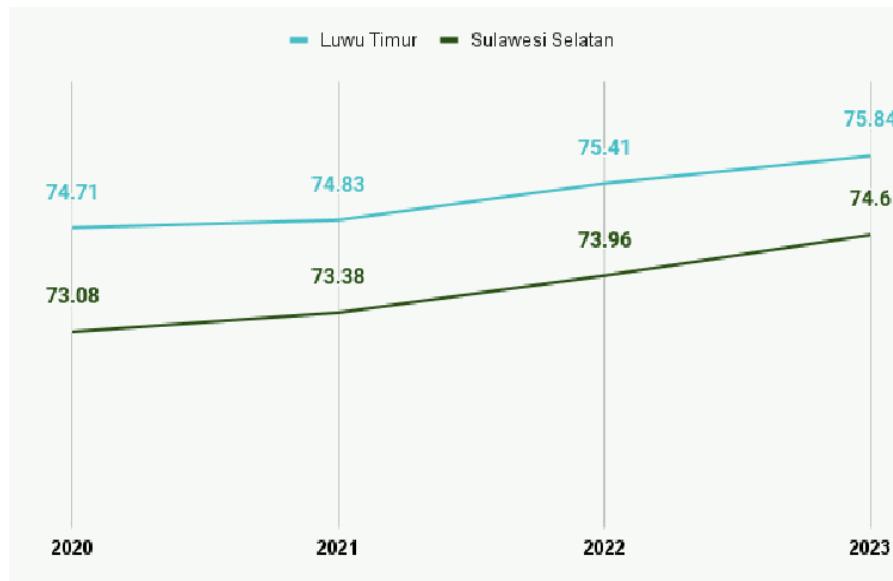
(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Provinsi Selatan

Selama 2020-2023, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai IPM Kabupaten Luwu Timur yang lebih tinggi dari nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2023, nilai IPM Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi (75,84) dibanding nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan (74,6). Tingginya pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur tidak lepas dari pencapaian komponen indikator pembentuk IPM, diantaranya Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari besaran pengeluaran perkapita per tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur berstatus "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$).



Gambar Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2023



(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur 2024)

Perbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Pembentuk, 2023

Komponen (1)	Satuan (2)	Luwu Timur	Sulawesi Selatan
		(3)	(4)
Umur Panjang dan Hidup Sehat			
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,32	73,63
Pengetahuan			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,01	13,54
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,93	8,76
Standar Hidup Layak			
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	13.451	11.841
IPM		75,84	74,60

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur 2024)

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 merupakan realisasi indikator kinerja tahun kedua yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026, dan dapat dilihat pada tabel berikut :



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	2020	73,22	-
		2021	73,13	-
		2022	75,41	102,18%
		2023	75,84	102,35%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Realisasi	Tar get	Realisa si	Tar get	Realisasi	Tar get	Realisa si	Tar get	Realisasi
	Indeks Pembangunan Manusia	73,80	75,41	74,10	75,84	74,40	-	74,70	-	75,00	-

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2023 dengan dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 menempati peringkat ke 4 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Selama periode 2020-2023 angka IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan, selain itu juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- Peningkatan umur harapan hidup saat lahir :
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan kematian bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan seperti peningkatan pelayanan puskesmas PONED, Audit Maternal dan Perinatal (AMP), Perbaikan gizi, pemberian vitamin dan tablet FE pada remaja putri;
 - Meningkatkan upaya pencegahan kematian bayi dan balita dengan imunisasi, pencegahan stunting, pencegahan penyakit menular;
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui program UHC (universal Heath coverate);
 - Memperbaiki status kesehatan gizi masyarakat.
 - Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga sehat;
 - Perbaikan kesehatan lingkungan;
 - Peningkatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Optimalisasi promosi kesehatan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - ketersedian obat dan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan.



- Peningkatan angka rata-rata lama sekolah setiap tahun
 - Pendidikan gratis dan pemberian perlengkapan sekolah gratis SD dan SMP
- Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah
 - Layanan program pendidikan keaksaraan
 - Layanan Pendidikan kesetaraan paket A,B dan C
- Standar Layak Hidup
 - Penghasilan/penerimaan yang semakin wajar.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan :**

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;
 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 - Pengembangan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi;
 - Pengadaan Obat, Vaksin;
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;



- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya;
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan;
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus;
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
 - Operasional Pelayanan Puskesmas;
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria.
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.



- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan.
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- Program Pengelolaan Pendidikan:
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar :
 - Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Sarana Prasarana dan Utulitas Sekolah;
 - Pembangunan Rumah Dinas/Guru/Penjaga Sekolah;
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Sekolah;
 - Pengadaan Mebel Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah;
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Penambahan Ruang Kelas Baru;
 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
 - Pembangunan Laboratorium;



- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah;
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
- Pengadaan Mebel Sekolah;
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
- Pengadaan Perlengkapan Siswa;
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
 - Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD;
 - Pengadaan Mebel PAUD;
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD;
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD;
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD;
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD;
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD.
- Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Non Formal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.343.515.323.850 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.334.149.966.846 atau 97,27% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini sebesar 2,73%. Artinya daya serap penggunaan anggaran yang cukup tinggi dan dengan realisasi kinerja yang tercapai secara signifikan bahkan melebihi target.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN DESA YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN* " dengan 1 (satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Desa Membangun	Status	Maju (0,707)	Maju (0,707)	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja			100%		

- Indikator Kinerja "**Indeks Desa Membangun**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh status Indeks Desa Membangun adalah :

$$IDM=1/3(IS \times IE \times IL)$$

Keterangan:

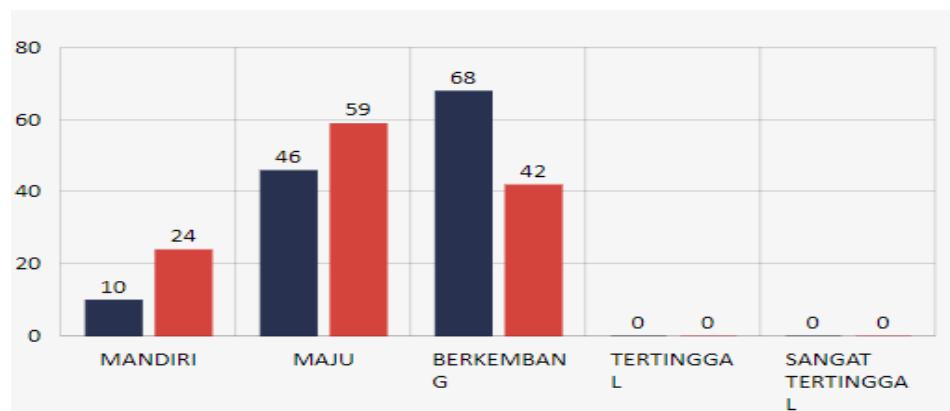
IS: Indeks Sosial

IE: Indeks Ekonomi

IL: Indeks Lingkungan

. Untuk indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dengan target kinerja tahunan yaitu status desa MAJU (0,707), dan realisasi capaian kinerja adalah status Desa MAJU (0,707), dengan persentase capaian Kinerja 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pencapaian target. Jika dilihat tabel perkembangan desa menurut status menunjukkan bahwa terjadi peningkatan masing-masing status desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik Capaian Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024)



Tabel Perbandingan Status IDM Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

	2022		2023	
MANDIRI	10	8.06%	24	19.20%
MAJU	46	37.10%	59	47.20%
BERKEMBANG	68	54.84%	42	33.60%
TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%
SANGAT TERTINGGAL	0	0.00%	0	0.00%

(sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

**TABEL PERUBAHAN STATUS DESA
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2023**

No.	Kode Desa	Nama Desa	Nama Kec	Nilai IDM Tahun 2023	Status Desa
1	7324012001	MALEKU	MANGKUTANA	'0.7871	MAJU
2	7324012002	WONOREJO	MANGKUTANA	'0.8781	MANDIRI
3	7324012003	MARGOLEMBO	MANGKUTANA	'0.7183	MAJU
4	7324012004	TEROMU	MANGKUTANA	'0.7078	MAJU
5	7324012007	MANGGALA	MANGKUTANA	'0.7103	MAJU
6	7324012009	KASINTUWU	MANGKUTANA	'0.6590	BERKEMBANG



7	7324012011	BALAI KEMBANG	MANGKUTANA	'0.7640	MAJU
8	7324012013	PANCA KARSA	MANGKUTANA	'0.6859	BERKEMBANG
9	7324012014	SINDU AGUNG	MANGKUTANA	'0.7287	MAJU
10	7324012015	WONOREJO TIMUR	MANGKUTANA	'0.8840	MANDIRI
11	7324012016	KORONCIA	MANGKUTANA	'0.8124	MAJU
12	7324022001	NUHA	NUHA	'0.6229	BERKEMBANG
13	7324022003	NIKKEL	NUHA	'0.8343	MANDIRI
14	7324022005	MATANO	NUHA	'0.6603	BERKEMBANG
15	7324022009	SOROWAKO	NUHA	'0.8381	MANDIRI
16	7324032001	LOEHA	TOWUTI	'0.7425	MAJU
17	7324032002	MAHALONA	TOWUTI	'0.6532	BERKEMBANG
18	7324032003	TIMAMPU	TOWUTI	'0.8508	MANDIRI
19	7324032004	WAWONDULA	TOWUTI	'0.9144	MANDIRI
20	7324032005	LANGKEA RAYA	TOWUTI	'0.8256	MANDIRI
21	7324032006	TOKALIMBO	TOWUTI	'0.6978	BERKEMBANG
22	7324032007	BARUGA TWT	TOWUTI	'0.9240	MANDIRI
23	7324032008	PEKALOA	TOWUTI	'0.7678	MAJU
24	7324032009	LIOKA	TOWUTI	'0.7973	MAJU
25	7324032010	ASULI	TOWUTI	'0.8221	MANDIRI
26	7324032011	BANTILANG	TOWUTI	'0.6311	BERKEMBANG
27	7324032012	MASIKU	TOWUTI	'0.6437	BERKEMBANG
28	7324032013	RANTE ANGIN	TOWUTI	'0.7963	MAJU
29	7324032014	MATOMPI	TOWUTI	'0.7138	MAJU
30	7324032015	TOLE	TOWUTI	'0.6408	BERKEMBANG
31	7324032016	LIBUKAN MANDIRI	TOWUTI	'0.7446	MAJU
32	7324032017	KALOSI	TOWUTI	'0.6151	BERKEMBANG
33	7324032018	BUANGIN	TOWUTI	'0.6946	BERKEMBANG
34	7324042001	HARAPAN	MALILI	'0.7416	MAJU
35	7324042002	LASKAP	MALILI	'0.8492	MANDIRI
36	7324042004	MANURUNG	MALILI	'0.8229	MANDIRI
37	7324042005	WEWANGRIU	MALILI	'0.7911	MAJU
38	7324042006	BARUGA MLL	MALILI	'0.8673	MANDIRI
39	7324042007	LAKAWALI	MALILI	'0.9105	MANDIRI
40	7324042008	USSU	MALILI	'0.7400	MAJU
41	7324042009	TARABBI	MALILI	'0.6087	BERKEMBANG
42	7324042010	BALANTANG	MALILI	'0.8378	MANDIRI
43	7324042011	ATUE	MALILI	'0.7467	MAJU
44	7324042012	PONGKERU	MALILI	'0.7541	MAJU
45	7324042013	PUNCAK INDAH	MALILI	'0.9381	MANDIRI
46	7324042014	PASI-PASI	MALILI	'0.7092	MAJU
47	7324042015	LAKAWALI PANTAI	MALILI	'0.8390	MANDIRI
48	7324052001	TAWAKUA	ANGKONA	'0.6425	BERKEMBANG
49	7324052002	TAMPINNA	ANGKONA	'0.7341	MAJU
50	7324052003	SOLO	ANGKONA	'0.7400	MAJU
51	7324052004	TARIPA	ANGKONA	'0.7295	MAJU



52	7324052005	MANTADULU	ANGKONA	'0.6411	BERKEMBANG
53	7324052006	BALIREJO	ANGKONA	'0.7819	MAJU
54	7324052007	MALIWOWO	ANGKONA	'0.6849	BERKEMBANG
55	7324052008	LAMAETO	ANGKONA	'0.7335	MAJU
56	7324052009	WATANGPANUA	ANGKONA	'0.8024	MAJU
57	7324052010	WANASARI	ANGKONA	'0.7802	MAJU
58	7324062001	LAMPENAI	WOTU	'0.7081	MAJU
59	7324062002	TARENGGE	WOTU	'0.7714	MAJU
60	7324062003	MARAMBA	WOTU	'0.7038	BERKEMBANG
61	7324062004	CENDANA HIJAU	WOTU	'0.7433	MAJU
62	7324062005	BAWALIPU	WOTU	'0.8786	MANDIRI
63	7324062006	KALAENA	WOTU	'0.6114	BERKEMBANG
64	7324062007	LERA	WOTU	'0.7710	MAJU
65	7324062008	KANAWATU	WOTU	'0.6963	BERKEMBANG
66	7324062009	BAHARI	WOTU	'0.6254	BERKEMBANG
67	7324062010	KARAMBUA	WOTU	'0.6651	BERKEMBANG
68	7324062011	PEPURO BARAT	WOTU	'0.7041	BERKEMBANG
69	7324062012	BALO-BALO	WOTU	'0.6886	BERKEMBANG
70	7324062013	RINJANI	WOTU	'0.6086	BERKEMBANG
71	7324062014	TARENGGE TIMUR	WOTU	'0.6070	BERKEMBANG
72	7324062015	MADANI	WOTU	'0.6814	BERKEMBANG
73	7324062016	TABAROGE	WOTU	'0.6697	BERKEMBANG
74	7324072001	BURAU	BURAU	'0.8340	MANDIRI
75	7324072002	JALAJJA	BURAU	'0.8432	MANDIRI
76	7324072003	LEWONU	BURAU	'0.6552	BERKEMBANG
77	7324072004	LAMBARESE	BURAU	'0.6829	BERKEMBANG
78	7324072005	LAUWO	BURAU	'0.6256	BERKEMBANG
79	7324072006	BONE PUTE	BURAU	'0.7711	MAJU
80	7324072007	LUMBEWE	BURAU	'0.7465	MAJU
81	7324072008	MABONTA	BURAU	'0.6794	BERKEMBANG
82	7324072009	LARO	BURAU	'0.6165	BERKEMBANG
83	7324072010	BENTENG	BURAU	'0.7181	MAJU
84	7324072011	BATU PUTIH	BURAU	'0.6046	BERKEMBANG
85	7324072012	LANOSI	BURAU	'0.6194	BERKEMBANG
86	7324072013	LAGEGO	BURAU	'0.7541	MAJU
87	7324072014	CENDANA	BURAU	'0.6129	BERKEMBANG
88	7324072015	BURAU PANTAI	BURAU	'0.6260	BERKEMBANG
89	7324072016	ASANA	BURAU	'0.6314	BERKEMBANG
90	7324072017	KALATIRI	BURAU	'0.6500	BERKEMBANG
91	7324072018	LAMBARA HARAPAN	BURAU	'0.7019	BERKEMBANG
92	7324082001	BAYONDO	TOMONI	'0.7605	MAJU
93	7324082002	MULYASRI	TOMONI	'0.8189	MANDIRI
94	7324082007	LESTARI	TOMONI	'0.7465	MAJU
95	7324082008	KALPATARU	TOMONI	'0.7687	MAJU
96	7324082011	TADULAKO	TOMONI	'0.7668	MAJU
97	7324082012	BERINGIN JAYA	TOMONI	'0.8219	MANDIRI



98	7324082015	BANGUN JAYA	TOMONI	'0.8283	MANDIRI
99	7324082016	MANDIRI	TOMONI	'0.9014	MANDIRI
100	7324082017	SUMBER ALAM	TOMONI	'0.6403	BERKEMBANG
101	7324082018	UJUNG BARU	TOMONI	'0.7340	MAJU
102	7324082019	BANGUN KARYA	TOMONI	'0.7184	MAJU
103	7324082020	RANTE MARIO	TOMONI	'0.7497	MAJU
104	7324092001	KERTORAHARJO	TOMONI TIMUR	'0.7521	MAJU
105	7324092002	CENDANA HITAM	TOMONI TIMUR	'0.7671	MAJU
106	7324092003	PURWOSARI	TOMONI TIMUR	'0.7168	MAJU
107	7324092004	PATTENGKO	TOMONI TIMUR	'0.7451	MAJU
108	7324092005	MANUNGGAL	TOMONI TIMUR	'0.7443	MAJU
109	7324092006	MARGOMULYO	TOMONI TIMUR	'0.7468	MAJU
110	7324092007	ALAM BUANA	TOMONI TIMUR	'0.6721	BERKEMBANG
111	7324092008	CENDANA HITAM TIMUR	TOMONI TIMUR	'0.6978	BERKEMBANG
112	7324102001	KALAEWA KIRI	KALAEWA	'0.9330	MANDIRI
113	7324102002	SUMBER AGUNG	KALAEWA	'0.7557	MAJU
114	7324102003	PERTASI KENCANA	KALAEWA	'0.7711	MAJU
115	7324102004	NON BLOK	KALAEWA	'0.7767	MAJU
116	7324102005	ARGOMULYO	KALAEWA	'0.7048	BERKEMBANG
117	7324102006	SUMBER MAKMUR	KALAEWA	'0.7640	MAJU
118	7324102007	MEKAR SARI	KALAEWA	'0.7762	MAJU
119	7324112001	LEDU LEDU	WASUPONDA	'0.7602	MAJU
120	7324112002	KAWATA	WASUPONDA	'0.7625	MAJU
121	7324112003	TABARANO	WASUPONDA	'0.8029	MAJU
122	7324112004	WASUPONDA	WASUPONDA	'0.8097	MAJU
123	7324112005	PARUMPANAI	WASUPONDA	'0.7722	MAJU
124	7324112006	BALAMBANO	WASUPONDA	'0.7370	MAJU

(Sumber Data:Dinas PMD Kab. Luwu Timur Tahun 2024)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Indeks Desa Membangun Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Desa	Maju	2021	Berkembang	0,6727



Membangun (IDM)		2022	Berkembang	0,7031
		2023	Maju	47,20

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No	Indikat or Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Real isasi	Targ et	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi	Tar get	Realisa si
1	Indeks Desa Membangun	Maju	Berke mban g	Maju	Maju	Maju	-	Maju	-	Maj u	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yang Merata dan berkelanjutan adalah :**

- Peran aktif kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa;
- Pengembangan potensi desa menjadi desa wisata yang menarik pengunjung sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat;
- Tata kelola keuangan desa yang lebih baik melalui Dana Desa yang meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan.

- ❖ **Alternative/Solusi yang akan dilakukan :**

- Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, sistem administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa;
- Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga;
- Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan pelayanan teknis pemberdayaan masyarakat dan desa.

- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- Program Penataan Desa
 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Program Pemberdayaan Sosial
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp. 1.123.546.830 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.1.020.632.700 atau 90,84 dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 9,16%. Artinya realisasi anggaran terserap dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja sehingga penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Pemberdayaan Gender

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN GENDER*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks	Nilai	90,00	90,66	101,07%



	Pembangunan Gender (IPG)					
	Rata-Rata Capaian Kinerja		101,07%			

Indikator Kinerja "**Indeks Pembangunan Gender**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :

IPG = IPM Perempuan / IPM Laki-Laki

Untuk Indikator *Indeks Pembangunan Gender* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90,00 dan realisasi capaian kinerja sebesar 90,96 dengan persentase capaian sebesar 101,07%, jika dibandingkan tahun lalu dengan realisasi kinerja sebesar 90,34 dengan persentase capaian kinerja 100,44%, menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja sebesar 0,62% dan capaian kinerja sebesar 0,63% untuk tahun 2023.

Indikator ini merupakan capaian tahun kedua sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026,. Adapun tabel capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
TAHUN 2020-2023**

Kode	Kabupaten/Kota	IPG (UHH LF SP2020)			
		2020	2021	2022	2023
7300	SULAWESI SELATAN	93,02	93,04	93,45	93,56
7301	Kepulauan Selayar	91,74	91,60	91,81	92,18
7302	Bulukumba	96,45	96,02	96,23	96,41
7303	Bantaeng	95,78	95,74	95,32	95,37
7304	Jeneponto	91,69	91,87	92,36	92,78
7305	Takalar	87,69	87,55	87,74	88,10
7306	Gowa	87,54	87,75	88,26	88,87
7307	Sinjai	98,16	97,97	98,24	98,30
7308	Maros	89,37	89,32	89,63	89,84
7309	Pangkajene dan Kepulauan	89,96	90,08	90,68	90,87
7310	Baru	95,57	95,56	95,65	95,72
7311	Bone	93,00	92,80	93,34	93,49
7312	Soppeng	97,47	97,58	97,42	97,49
7313	Wajo	90,36	90,52	90,38	90,86
7314	Sidenreng Rappang	92,55	92,75	93,10	93,20
7315	Pinrang	95,79	95,87	96,10	96,37
7316	Enrekang	97,78	97,79	98,37	98,43
7317	Luwu	92,24	92,66	92,92	93,05
7318	Tana Toraja	88,33	88,77	88,89	89,03
7322	Luwu Utara	89,29	89,50	90,14	90,55
7325	Luwu Timur	90,10	90,21	90,83	90,96
7326	Toraja Utara	87,57	87,56	88,14	88,70
7371	Kota Makassar	95,33	95,35	95,44	95,50
7372	Kota Parepare	97,47	97,34	97,45	97,77
7373	Kota Palopo	97,71	97,72	98,08	98,13

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024)



❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Cakupan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026 Adapun perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	2021	89,80	99,87%
		2022	90,34	100,44%
		2023	90,96	101,07%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Cakupan Indeks Pemberdayaan Gender (IDM) merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Indeks Pembangunan Gender- (IPG)	89,94	90,34	90,00	90,96	90,05	-	91,18	-	92,15	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pencapaian sasaran:**

- Pembentukan TIM Pokja Pengarusutamaan Gender;
- Melakukan sinergitas dengan dunia usaha dan Peran organisasi Masyarakat.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

- ✓ Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur lebih optimal. Di bentuknya Tim Pokja Pengarusutamaan Gender juga berperan penting dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimulai dari Perencanaan, Penyediaan



Anggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- Program Perlindungan Perempuan
 - Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kualitas Keluarga
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.3.110.299.169 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.3.033.321.749 atau 97,53% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,47%. Realisasi penggunaan anggaran yang cukup tinggi dengan realisasi kinerja yang mencapai target bahkan melebihi dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran yang disediakan pada indikator ini cukup efektif dan tepat sasaran.



Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas”**. Untuk mencapai misi 2, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal & PTSP.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	1,98	1,19	60,10%
Rata-Rata Capaian Kinerja			60,10%		

A. Indikator Kinerja ***“Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan”***

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan adalah :

$$\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n)} \times 100\%}{\text{Pertumbuhan PDRB sector unggulan (n-1)}}$$

Untuk indikator kinerja *cakupan pertumbuhan PDRB Sektor unggulan* pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 1,98 % dan realisasi sebesar 1,19% dengan persentase capaian kinerja sebesar 60,10%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun 2023 tidak tercapai atau adanya kegagalan capaian kinerja pada indikator ini. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 2022 sebesar -1,84, artinya terjadi peningkatan capaian kinerja tahun 2023 yang sangat drastis, walaupun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan menurut lapangan usaha diukur berdasarkan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Untuk lebih jelasnya laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) sektor unggulan dapat dilihat pada tabel angka A dibawah ini :



Table Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5
F Konstruksi/Construction	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27

(Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023)

Laju pertumbuhan produk domestik bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1 dikalikan dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 30,70 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 50,30%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 meningkat. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Konstan 2010, mencapai 17,93 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi percepatan ekonomi sebesar 9,66 persen.

Laju pertumbuhan PDRB 2023 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,51% , nilai ini sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami peningkatan sebesar 9,66% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Gambar 13.1
Figures

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (%), 2019-2023
Economic Growth of Luwu Timur Regency and Sulawesi Selatan Province (%), 2019-2023



Sumber/Source : BPS - Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Statistics Indonesia - Based on census, surveys and others sources

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	2021	4,19	-
		2022	-1,84	-100,55%
		2023	1,19	60,10%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No .	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	Cakupan Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	1,83	-1,84	1,98	1,19	2,08	-	2,17	-	2,23	-



❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran:**

- ✓ Seluruh Komoditi pada sektor pertanian menurun :
 - Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah;
 - Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) tahun 2023 pada sebagian besar wilayah Kab. Luwu Timur dimana curah hujan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan tanaman yang tidak optimal (produktivitas rendah);
 - Adanya penurunan populasi dalam kurung waktu 2 (dua) tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor :
 - a. Beberapa kasus penyakit yang menyerang ternak khususnya pada reproduksi ternak yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan;
 - b. Pendataan ternak yang tidak maksimal disetiap desa yang memiliki populasi ternak;
 - c. Identifikasi ternak yang keluar dan masuk di wilayah Kabupaten Luwu Timur tidak terpantau dengan baik, karena tidak Adanya pemantauan pada pos perbatasan wilayah Kab. Luwu Timur (Pos Tambangan, Lauwo dan Lampia);
 - d. jenis-jenis penyakit yang baru muncul pada ternak seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Merebaknya wabah penyakit African Swine Fever (ASF) pada ternak babi yang mematikan pada awal hingga pertengahan tahun 2023 yang berdampak pada banyaknya ternak babi yang mati atau dipotong untuk menghindari kerugian sehingga populasi ternak babi menurun 93,56% akan tetapi Sebagian besar ternak jenis lain telah di atasi melalui kegiatan Penganggulangan maupun pengobatan oleh medik veteriner (dokter hewan) dan petugas teknis peternakan;
 - e. Faktor kelahiran dan pemasukan ternak jumlahnya menurun dan dampak dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di tahun 2022 dan kewaspadaan jembrana sehingga banyak peternak yang menjual ternak ke pedagang untuk dipotong atau dijual keluar wilayah Luwu Timur. Faktor lainnya adalah produktivitas sapi dan kerbau yang menghasilkan anak 1 ekor dalam satu tahun jika normal, dan kenyataannya dilapangan bisa menjadi lebih lama yaitu 2 anak dalam 3 tahun karena faktor genetik, cara pemeliharaan dan kesehatan ternak;
 - f. Populasi ayam ras pedaging (broiler) yang jumlahnya menurun sangat drastis sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini karena para peternak banyak gulung tikar dikarnakan harga operasional produksi yang terus naik.
 - Ketersediaan saprodi seperti pupuk yang masih terbatas dan terlambat pasokannya sehingga mempengaruhi ketepatan jadwal penggunaan dan aplikasi pupuk pada tanaman padi;



- Infrastuktur irigasi masih ada yang belum maksimal mengaliri areal persawahan sehingga beberapa lahan tidak dapat ditanami dan ada lahan sawah lambat ditanami karena aliran air belum tersedia;
- Tingginya biaya saprodi (keterbatasan modal usaha) sehingga petani tidak dapat memaksimalkan penggunaan saprodi sesuai anjuran;
- Terbatasnya alat pasca panen seperti mesin panen (*Combine Harvester*) dan *Power thresher* (mesin perontok padi), karena penggunaan alat-alat tersebut dapat menekan kehilangan (losses) pada saat panen yang nantinya dapat mempengaruhi produksi padi;
- Luas areal tanam jagung menurun disebabkan kurangnya bantuan benih dan saprodi lainnya (harga yang cukup tinggi);
- Mayoritas petani hanya mau menanam benih varietas tertentu yang sesuai dengan spesifikasi lokasi, karena sangat mempengaruhi jumlah saprodi yang harus disediakan dan produksi yang dihasilkan;
- Ketersediaan dan penggunaan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) yang relatif masih rendah, sehingga beberapa areal tanam masih menggunakan varietas benih yang memiliki potensi produksi rendah;
- Fenomena dampak perubahan iklim (DPI) tahun 2023 pada sebagian besar wilayah Kab. Luwu Timur dimana curah hujan yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan tanaman yang tidak optimal (produktivitas rendah).

❖ **Alternative/Solusi yang akan dilakukan:**

- ✓ Konsistensi dalam melaksanakan kesepakatan jadwal tanam hasil tudang sipulung untuk memutus mata rantai perkembangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- ✓ Penyediaan bantuan benih padi Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai spesifikasi lokasi melalui alokasi bantuan APBN seluas 16.378 Ha dan bantuan mandiri benih padi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.000 Ha;
- ✓ Untuk memenuhi kebutuhan benih yang spesifik lokasi, maka yang perlu dilakukan adalah memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal (Instalasi Kebun Benih Milik Pemda Kab. Luwu Timur di Desa Teromu Kec. Mangkutana);
- ✓ Pengadaan belerang melalui APBD II Kab. Luwu Timur yang dapat digunakan untuk pengendalian OPT pra tanam;
- ✓ Mendorong dan menfasilitasi petani untuk memnafatkan asuransi pertanian memberi rasa aman dan mencegah tingkat kerugian yang lebih banyak bila mengalami musibah kekeringan, kebanjiran atau kegagalan panen akibat serangan hama;
- ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk subsidi;
- ✓ Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya petani dan penyuluhan pertanian melalui pelatihan, bimbingan dan pendampingan;
- ✓ Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui Pembangunan Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani;



- ✓ Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
 - ✓ Pemanfaatan Alsintan khususnya Combine Harvester (alat panen) untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat panen;
 - ✓ Harga gabah yang cukup tinggi sehingga mendorong minat petani untuk menambah areal tanam dan memberikan dampak pada peningkatan produksi dan pendapatan petani;
 - ✓ Penyediaan alokasi alat dan mesin pertanian seperti alat pemipil jagung (Corn Sheller) melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - ✓ Penyediaan saprodi (pupuk) melalui alokasi pupuk bersubsidi;
 - ✓ Menfasilitasi alokasi bantuan Benih Varietas Unggul Baru (VUB) sesuai sepsifik lokasi melalui alokasi bantuan APBN dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - ✓ Melakukan pendampingan intensif kepada para petani untuk terus menerapkan praktek budidaya yang baik;
 - ✓ Mendorong kegiatan intensifikasi melalui bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk baik yang bersumber dari APBN, APBD I maupun APBD II, serta selalu memberikan penyuluhan kepada petani untuk memanfaatkan pupuk alternatif dari hasil pengolahan dan pemanfaatan pupuk organik;
 - ✓ Untuk penanganan jangka menengah/Panjang, dilakukan upaya peremajaan tanaman terhadap tanaman-tanaman yang sudah tua/rusak.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
 - ✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - ✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
 - ✓ Program Penyuluhan Pertanian;
 - ✓ Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - ✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - ✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - ✓ Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - ✓ Program Pengelolaan Budidaya Perikanan
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - ✓ Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.49.097.654.415 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.46.320.475.325,34 atau 94,34% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,66%. Dengan melihat realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat disimpulkan bahwa



penggunaan anggaran pada indikator ini cukup efektif dan tepat sasaran berdasarkan hasil capaian yang diperoleh.

Sasaran Strategis 5

Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis "KETERSEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN LAPANGAN USAHA dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	5,42	56%
Rata-Rata Capaian Kinerja			56%		

Indikator Kinerja "**Tingkat Pengangguran Terbuka**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase Tingkat Pengangguran Terbuka adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.521}{157.300} \times 100\%$$

$$= 0,055 \times 100$$

$$= 5,42$$

Untuk Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Luwu Timur, target kinerja tahunan untuk tahun 2023 adalah 3,05%, adapun realisasi kinerja adalah 5,42% dengan persentase capaian kinerja sebesar 56%, hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai atau angka pengangguran terbuka masih besar dan belum sepenuhnya terserap oleh pangsa pasar kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kinerja sebesar 3,30% dengan realisasi kinerja sebesar 4,48% dengan persentase capaian sebesar 74%, terjadi pergerakan atau pergeseran target yang cenderung menurun. Namun secara keseluruhan capaian realisasi target dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan atau adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dengan melihat jumlah



pengangguran terbuka usia angkatan kerja yang mengalami peningkatan dari 7.230 jiwa tahun 2022 menjadi 8.521 jiwa untuk tahun 2023.

Angkatan kerja adalah (Labor Force) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran berarti menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan seluruh Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Data Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

URAIAN KETENAGAKERJAAN	JUMLAH
Penduduk Usia Kerja	227.135 orang
Angkatan Kerja	157.300 orang
- Bekerja	148.779 orang
- Tidak Bekerja	8.521 orang
Bukan Angkatan Kerja	69.835 orang
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,42 %
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,25%

(Sumber: Data Dinas Transnaker Kab. Luwu Timur Tahun 2024)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	1,10	2,44	2,81	1,49	1,98
Bulukumba	3,06	3,42	3,14	1,26	1,31
Bantaeng	3,65	4,27	4,07	2,72	3,71
Jeneponto	1,99	2,31	2,38	2,21	2,13
Takalar	3,78	4,16	3,93	2,63	3,58
Gowa	4,35	6,44	4,30	3,26	3,43
Sinjai	2,17	2,65	2,61	1,80	1,69
Maros	4,42	6,28	6,30	5,04	3,64
Pangkep	4,99	5,18	5,86	5,23	5,05
Baru	5,39	6,39	6,74	5,32	5,89
Bone	3,01	3,20	4,15	2,27	2,88
Soppeng	3,24	4,42	3,92	3,40	4,34
Wajo	3,00	4,33	4,32	2,54	2,10
Sidrap	4,35	5,91	4,93	3,56	3,29
Pinrang	2,91	4,19	4,06	2,79	3,64
Enrekang	2,15	2,44	2,34	0,58	1,53
Luwu	4,38	4,94	4,80	3,85	3,70
Tana Toraja	2,55	2,60	3,09	2,32	3,37
Luwu Utara	2,76	3,01	3,91	2,81	2,63
Luwu Timur	3,81	4,46	4,96	4,48	5,42
Toraja Utara	2,86	3,17	2,61	1,99	2,60

Sumber Data : (BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024)



❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2021	4,96	42%
		2022	4,48	74%
		2023	5,42	56%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Realis asi	Tar get	Real isasi	Tar get	Realisasi	Tar get	Realisasi	Tar get	Realisasi
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30	4,48	3,05	5,42	2,80	-	2,55	-	2,30	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran indikator kinerja:**

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami penurunan setiap tahunnya yang dipengaruhi juga oleh meningkatnya Jumlah Penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2023;
- jumlah pekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan.

❖ **Alternative/solusi yang dilakukan untuk pencapaian kinerja :**

- salah satu strategi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi agar para pencari kerja dan tenaga kerja dapat bersaing dalam dunia kerja serta mengoptimalkan penyebarluasan informasi bursa kerja. diharapkan pula agar Perusahaan yang melakukan penerimaan dan penempatan tenaga kerja agar terus melaporkan dan melakukan koordinasi dengan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. selain itu, meningkatnya investasi juga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga perlu adanya kebijakan yang diambil untuk meningkatkan investasi di kabupaten Luwu Timur.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Outputnya adalah jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.



- a. Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, adapun output sub kegiatan ini ada 3 (tiga) yaitu Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerjasama ATS sebanyak 60 Orang dari target 60 orang (100%) dan Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi K3 sebanyak 110 orang dari target 110 orang (100%) dan Jumlah Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerjasama BLK Makassar sebanyak 16 orang dari target 16 orang (100%).
- ✓ Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya adalah jumlah penempatan tenaga kerja.
 - a. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja.
Sub Kegiatan ini berupa bimbingan dan penyuluhan bagi calon tenaga kerja (pencari kerja) dengan output jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat.
 - b. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja.
Output kegiatan ini ada 2 (dua), yaitu pertama jumlah calon tenaga kerja mandiri yang mengikuti pelatihan. Kegiatan ini berupa pelatihan dan bimbingan bagi calon tenaga kerja mandiri atau yang mempunyai usaha sendiri untuk pengembangan usahanya baik itu dari segi manajemen usaha maupun SDM. Kedua adalah jumlah kelompok kerja terampil yang didampingi dan difasilitasi, kegiatan ini berupa fasilitasi pendampingan dan monitoring bagi kelompok usaha mandiri.
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - a. Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Output dari Subkegiatan ini yaitu Jumlah Informasi Lowongan Kerja Yang disebarluaskan dengan realisasi 116 Info Loker dari target 116 info loker (110%).
 - Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI), indikator dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah terfasilitasi. Tahun 2023 tidak ada tenaga kerja indonesia asal Kab. Luwu Timur yang bermasalah yang terlaporkan.
- ✓ Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan. output subkegiatan ini yaitu Jumlah perusahaan yang dibina sebanyak 45 Perusahaan dari target 45 Perusahaan (100%).
- Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Kota, output dari Sub kegiatan ini adalah Angka Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial yang di Fasilitasi, realisasi 3 kasus dari target 3 kasus (100%)
 - b. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Output dari Sub kegiatan ini adalah Angka/Jumlah sengketa pengusaha dan pekerja pertahun yang difasilitasi dan dimediasi, target 30 Kasus sedangkan realisasi sebanyak 30 kasus atau dengan tingkat capaian 100%;
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, output dari Sub kegiatan ini yaitu Jumlah organisasi pekerja /pengusaha yang dibina, realisasi 32 dari target 32 Jumlah organisasi pekerja /pengusaha (100%);
 - e. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, output Sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rancangan UMK Yang ditetapkan, target 1 Dokumen dengan realisasi 1 Dokumen Rancangan UMK Yang ditetapkan. Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan yaitu UMK Tahun 2024 dengan besaran Rp. 3.531.561,-

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.2.129.549.655 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.2.107.351.831 atau 98,96 % dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,04%. Artinya realisasi penggunaan anggaran yang cukup tinggi, tetapi tidak diikuti dengan keberhasilan pencapaian target kinerja tahunan.



Misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas”** dengan tujuan **“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah Secara Berkelanjutan”**. Untuk mencapai misi 3, ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA DAYA GUNA DAN HASIL GUNA INFRASTRUKTUR DAERAH* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	74,93	84,27	112,46
Rata-Rata Capaian Kinerja			112,46%		

Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh realisasi persentase Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur :

Nilai IKM terhadap layanan infrastruktur dihitung dengan menggunakan nilai “rata-rata Tertimbang” terhadap jumlah unsur yang dinilai, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan layanan Infrastruktur terhadap sejumlah X unsur yang dikaji, maka setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Layanan x 25

Variabel unsur yang dinilai dalam IKLI antara lain meliputi : Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas,,Penyediaan Transportasi (Darat,ASDP,Laut dan Udara), Penyediaan Infrastruktur Air Bersih; Penyediaan;Penyediaan Irigasi (pertanian dan air baku);penyediaan infrastruktur perumahan.

((Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (665,01) / panjang seluruh jalan kabupaten (2.229,869) x 90% + Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik (380) / jumlah total jembatan kabupaten (392) x 10%) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (3.815,4) / luas irigasi kabupaten (6.788) x 40% + Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik (98,00) / Panjang seluruh saluran irigasi kabupaten (142,48) x 35% + Panjang sungai kabupaten dalam kondisi baik(0) / panjang total sungai (0) x 20% + Panjang pantai kabupaten dalam kondisi baik (0) / panjang total pantai (0) x 5%) + (Jumlah Penduduk berakses air minum (190.475) / jumlah penduduk (311.062) x 40% + Jumlah rumah tinggal bersanitasi (94.162) / jumlah rumah tinggal (95.902) x 15% + Jumlah bangunan dalam kondisi baik (37) / jumlah bangunan(41) x 45%) + (Luas areal permukiman tertata (48,85) / luas areal permukiman keseluruhan(58,54) x 35% + Luas permukiman kumuh yang ditangani (2,20) / luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani(95) x 35% + Jumlah rumah layak huni (59.430) / jumlah total rumah(66.564) x 30%) + (Jumlah perlengkapan jalan yang ada (16.202) / jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada(45.831) x 100% + Jumlah prasarana perhubungan yang ada (9,7232) / jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada(13) x 100%) / 2 + (Jumlah cakupan koneksi internet pada desa dan kelurahan (0) / jumlah desa dan kelurahan(127) x 100%) + Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik (19) / jumlah ruang publik (19) x 100% + Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD (41) / Jumlah OPD (41) x 100%) / 3))/6

$$\begin{aligned}
 &= (665,01 / 2.229,869 \times 90\%) + (380 / 392 \times 10\%) + (3.815,4 / 6.788 \times 40\%) + (98,00 / 142,48 \times 35\%) + (0 / 0 \times 20\%) + (0 / 0 \times 5\%) + (190,475 / 311.062 \times 40\%) + (94.162 / 95.902 \times 15\%) + (37 / 41 \times 45\%) + (48,85 / 58,54 \times 35\%) + (2,20 / 95 \times 35\%) + (59.430 / 66.564 \times 30\%) + (16.202 / 45.831 \times 100\%) + (9,7232 / 13 \times 100\% / 2) + (0 / 127 \times 100\%) + (19 / 19 \times 100\%) + (41 / 41 \times 100\% / 3) / 6 \\
 &= (26,84) + (9,69) + (22,48) + (24,07) + (0) + (0) + (0,024) + (14,72) + (40,60) + (29,20) + (0,81) + (26,78) + (35,35) + (74,79) + (0) + (100) + (100) / 6 \\
 &= 505,57 / 6 \\
 &= \mathbf{84,27}
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 74,93% dan realisasi kinerja sebesar 84,27%



dengan persentase capaian kinerja 112,46%, hal menunjukkan bahwa target dapat dicapai atau keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana *indeks pembangunan infrastruktur* yang ditargetkan sebesar 74,89 dan realisasi kinerja 58,21 dengan persentase capaian kinerja 77,73%, artinya terjadi peningkatan capaian kinerja.

Luas Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2024)

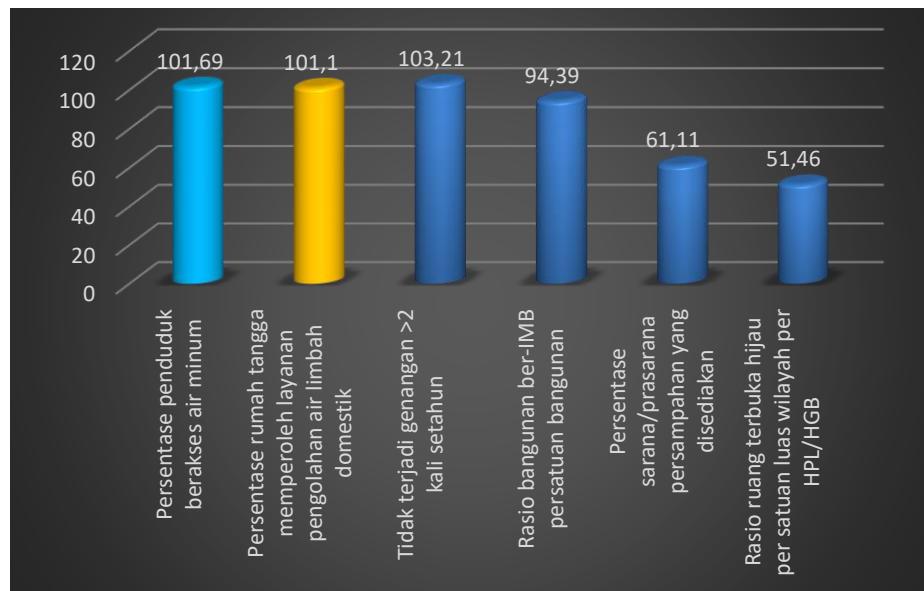
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2024



(Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tahun 2024)

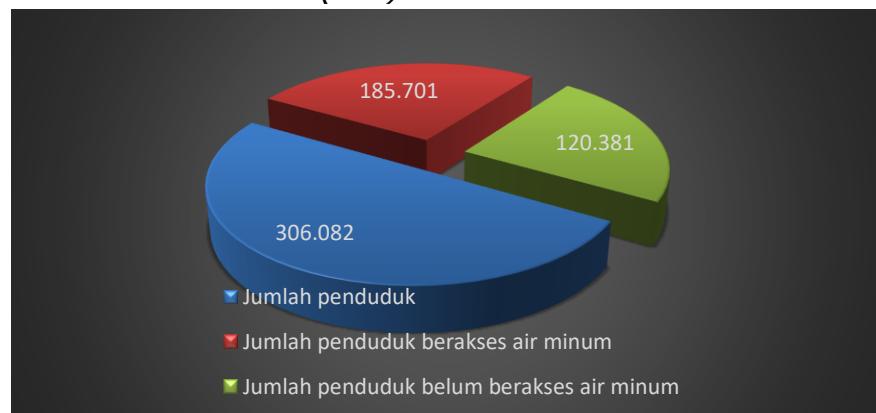


Cakupan indikator sasaran Meningkatnya layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2023

Jumlah Penduduk (Jiwa)berakses air Minum Tahun 2022



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2024

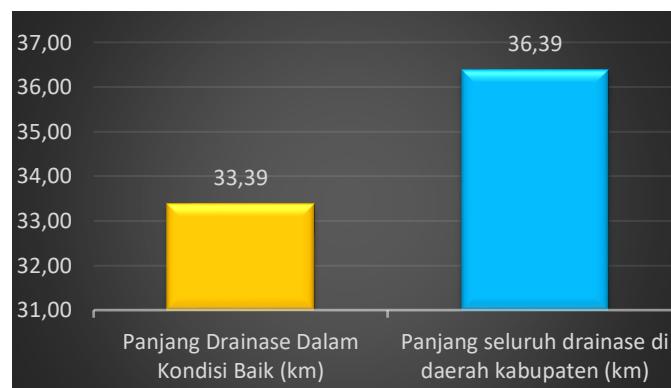


Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024

Jumlah bangunan ber IMB Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tahun 2024



Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data DD1 Bidang Bina Marga Tahun 2024

Panjang peningkatan Jalan (Km) Tahun 2019 - 2023

Tahun	Aspal	Beton	Kerikil
Tahun 2019	39,717	3,653	11,565
Tahun 2020	28,029	3,4631	27,391
Tahun 2021	8,56	5,16	72,69
Tahun 2022	8,94	5,78	32,07
Tahun 2023	9,00	1,00	24,08

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024



Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2023



**Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (Unit)
Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Pembangunan jembatan	Pemeliharaan jembatan
Tahun 2019	8 unit	3 unit
Tahun 2020	4 unit	3 unit
Tahun 2021	7 unit	3 unit
Tahun 2022	8 unit	4 unit
Tahun 2023	16 unit	4 unit

Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2024

Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi Tahun 2023





Ketaatan terhadap RTRW Tahun 2023



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2024

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Nilai Cakupan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	2022	58,21	77,73%
		2023	84,27	112,46

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Realisasi								
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	74,89	58,21	74,93	84,27	75,15	-	75,32	-	75,59	-

- ❖ **Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Jumlah ruas jalan yang dilengkapi PJU semakin bertambah;
- ✓ Adanya anggaran yang bersumber dari Dana DAK
- ✓ Adanya anggaran yang masuk bersumber dari dana BKK Provinsi;
- ✓ Telah tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Luwu Timur;
- ✓ Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge;



- ✓ pemasangan Penerangan Jalan Umum, Pemasangan Marka sepeda dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Kec. Malili yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, selain itu rambu lalu lintas sebagai peringatan dan tanda bagi para pengguna jalan baik pejalan kaki, kendaraan roda dua, ataupun keandaraan roda empat dan titik penempatan rambu sesuai dengan harmonisasi yang diatur
- ✓ pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana LLAJ berupa pemeliharaan perlengkapan jalan, pemeliharaan halte bus sekolah serat pemeliharaan 3 unit terminal yang ada di Dinas Perhubungan dilaksanakan secara rutin, untuk menjamin kemanan dan kenyamanan pengguna sarana dan prasarana LLAJ;
- ❖ **Alternative/ Soluasi yang akan dilakukan :**
 - ✓ Semua ruas jalan akan dilengkapi PJU sesuai target kinerja;
 - ✓ Mempercepat proses Pelaksanaan Barang dan Jasa;
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti.
 - ✓ Meningkatkan kesadaran dari semua pihak dalam menangani permasalahan yang ada khususnya dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh;
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dan membentuk tim koordinasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi;
 - ✓ Melakukan inovasi dalam efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat yang dicapai.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota;
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domest;
 - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
 - ✓ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
 - ✓ Program Penyelenggaraan Jalan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan;



- Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan;
 - Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan;
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan.
- ✓ Program Pengembangan Perumahan
- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
 - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota;
 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah susun dan Rumah Khusus
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah bagi korban bencana;
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kota.
- ✓ Program Kawasan Permukiman
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah sepuluh Ha
 - Perbaikan Rumah tidak layak huni;
 - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian.
- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
 - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Pembangunan Gedung Terminal;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.



- Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota;
 - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Pengelolaan Pelayaran
- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian pelabuhan Sungai dan Danau
 - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
 - Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau.
- ✓ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.188.030.375.860 dan realisasi



penggunaan anggaran sebesar Rp.173.149.748.170,29 atau 92,09% dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 7,91%. Daya serap dan efisiensi anggaran yang cukup baik dengan keberhasilan mencapai target, artinya penggunaan anggaran yang cukup baik dan tepat sasaran.

Sasaran Strategis 7

Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA* ” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	88,10	80,09	90,91 %
2.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	202 (tinggi)	152,28	133%
Rata-Rata Capaian Kinerja			111.96%		

A. Indikator Kinerja “*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU dan IKL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu :

- a. IKLH Nasional meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL
- b. IKLH Provinsi meliputi IKA, IKU, IKL dan IKAL; dan
- c. IKLH Kabupaten/Kota meliputi IKA, IKU dan IKL.

Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH. IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan (Nilai dan Raport IKLH Kabupaten/Kota) sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kab/Kota} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$$



KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.6 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Sumber : Permen KLHK Nomor 27 Tahun 2021

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 66,25) + (0,405 \times 95,97) + (0,219 \times 74,46) \\
 &= (24,91) + (38,87) + (16,31) \\
 &= 80,09
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator kinerja tahunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur, target kinerja tahun 2023 sebesar 88,10 dan



realisasi capaian target kinerja adalah sebesar 80,09% dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,91%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak tercapai, namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kinerja tahunan sebesar 87,55% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 79,71%, artinya terjadi peningkatan realisasi kinerja IKLH

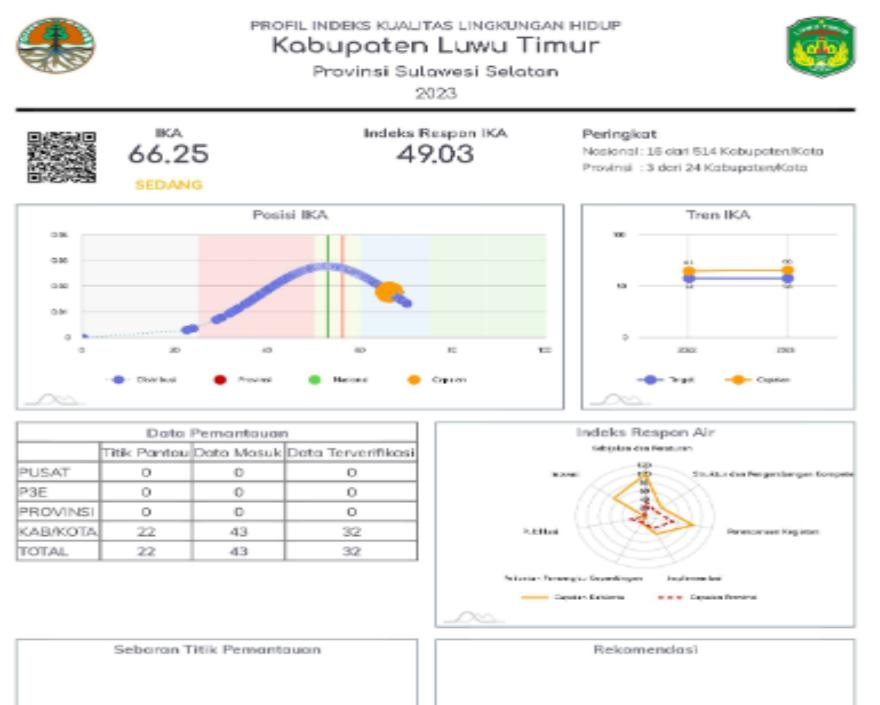
Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,38%. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Apabila dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2022 sebesar 66,52 maka nilai IKA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,27 poin. Nilai IKA memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2022 yaitu kategori **Sedang**.

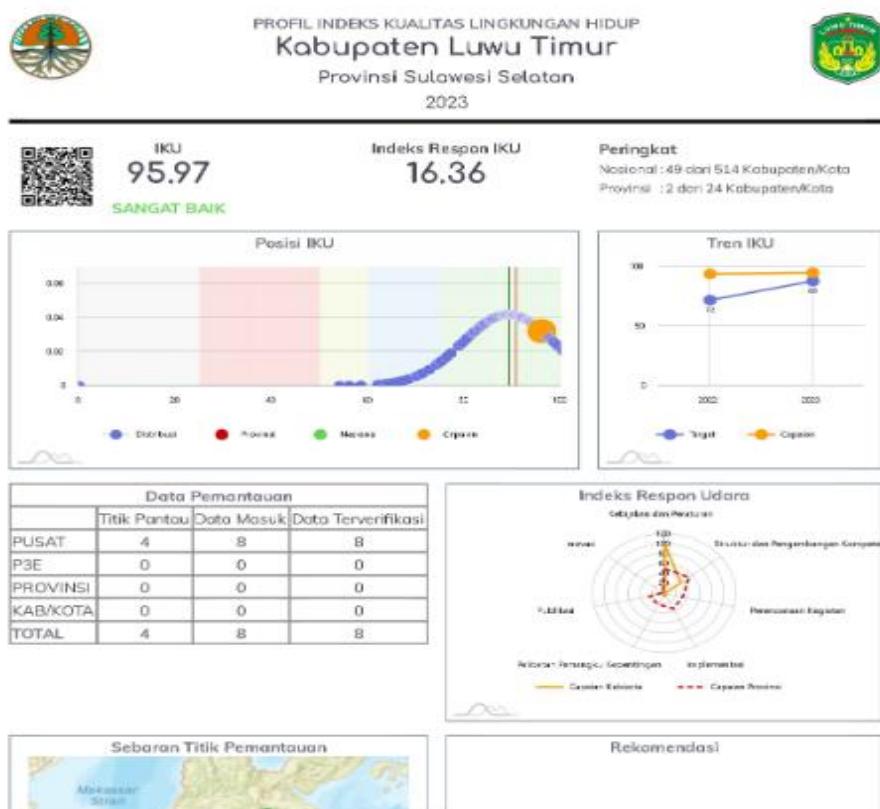
Adapun capaian indikator IKLH Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023



Gambar 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

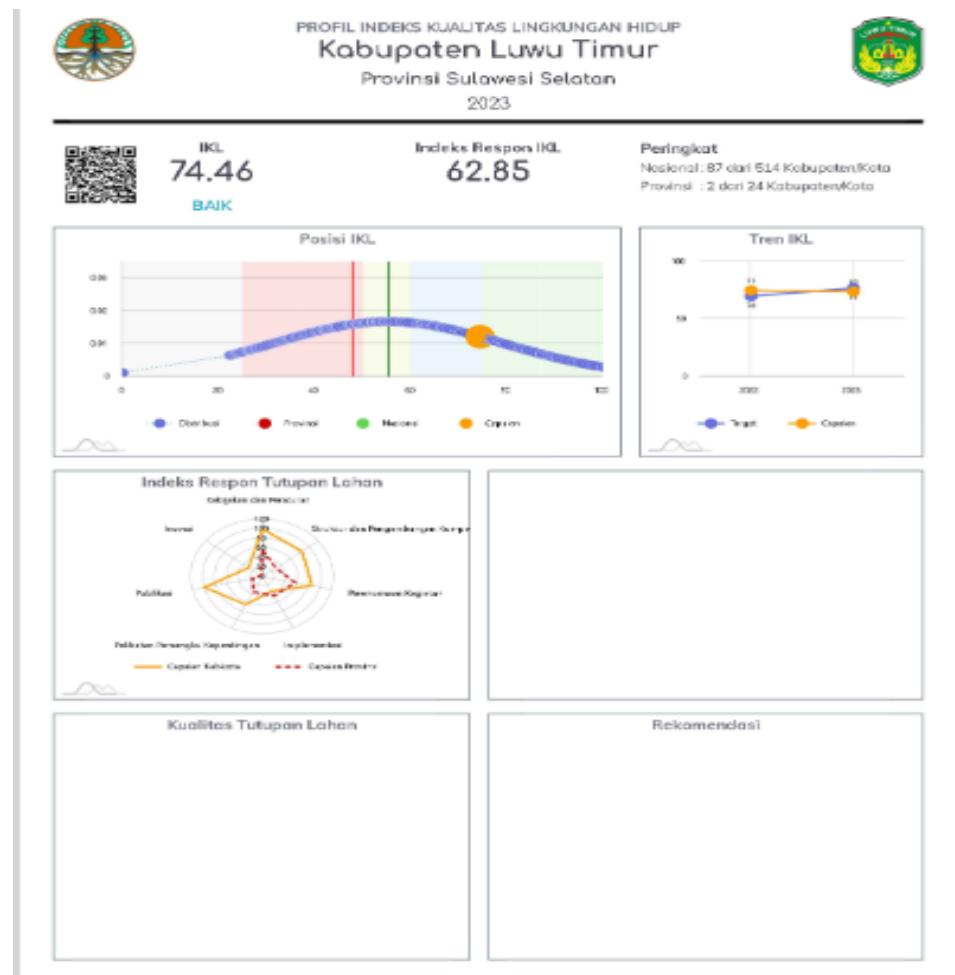


(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2023)



Apabila dibandingkan dengan nilai IKU tahun 2022 sebesar 94,27 maka nilai IKU Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,7 poin. Nilai IKU memang mengalami peningkatan karena nilai IKU Kabupaten Luwu Timur masuk dalam kategori **sangat baik**.

**Gambar 1.2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**



(Sumber Data : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2023)

Apabila dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2022 sebesar 75,45 maka nilai IKL Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,99 poin. Nilai IKL memang mengalami penurunan tetapi kategori indeks masih sama dengan tahun 2022 yaitu kategori **Baik**.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**
Capaian IKLH Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :



Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	%	2021	84,08	139,21
		2022	79,71	91,05
		2023	80,09	90,91

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
	Tar get	Real isasi	Tar get	Real isasi	Tar get	Realisa si	Targ et	Realisa si	Targ et	Realis asi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87,55	79,71	88,10	80,09	88,35	-	88,70	-	88,70	-

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ Kegagalan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

- Penyebab tidak tercapainya target atau turunnya realisasi dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - a. Pembagian kewenangan antara Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam pengawasan, penerapan sanksi dan penerbitan izin lingkungan;
 - b. Kewenangan Pemberian sanksi mengikuti tempat diteratkannya Persetujuan Lingkungan;
 - c. Lokasi Penanaman Rehabilitasi DAS IPPKH vegetasinya terlalu rapat sehingga bibit pohon yang ditanam kurang mendapatkan sinar matahari sehingga persentase tumbuhnya kurang maksimal. & juga Terdapat penebangan liar dilokasi tersebut dan merusak tanaman yang ditanam;
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Perbup PPMHA masih dalam tahap proses perbaikan dan verifikasi dan akan dijadwalkan Kembali oleh Bagian Hukum;
 - e. Kurangnya pemahaman calon sekolah Adiwiyata Kabupaten terkait gerakan PBLHS dan dalam penyusunan dokumen PBLHS;
 - f. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintah Desa terkait Program Kampung Iklim;



- g. Pemilik Izin Pengelolaan Limbah B3 belum rutin melaporkan neraca pengelolaan limbah B3 per triwulan;
 - h. Banyaknya bank sampah yang tutup karena kalah dengan persaingan harga dengan sektor informal dan jarak vendor yang terlalu jauh sehingga biaya transfortasi melonjak;
 - i. Volume sampah yang terus meningkat dan keterbatasan sarana dan prasarana pengangkut sampah dan keterbatasan petugas kebersihan sehingga tidak mampu untuk mengangkut semua sampah ygdihasilkan per hari;
 - j. kendaraan pengangkut sampah sebagian besar sudah tua, sehingga sering mengalami kerusakan;
 - k. Kurangnya SDM serta sarana & prasarana laboratorium;
 - l. Kondisi Sebagian Peralatan Pengujian di Laboratorium Sudah Rusak
- Alternative solusi yang telah dilakukan untuk keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja :
- a. Meningkatkan Pengawasan kegiatan Usaha yang berdampak pada lingkungan seperti pertambangan, perkebunan, industry dll;
 - b. 'Meningkatkan pemahaman dan partisipasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar dalam masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai komponen IKLH yakni IKA, IKU dan IKL;
 - c. Menggalakkan kegiatan penanaman pohon di pekarangan atau lahan di sekitar lingkungan rumah dan tempat kerja dapat meningkatkan luasan ruang terbuka hijau;
 - d. Memperbarui data Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur seperti Ruang Terbuka Hijau maupun Tutupan Vegetasi yang lainnya. Diharapkan pembaharuan data;
 - e. Koordinasi dan pelaporan hasil-hasil pengawasan, penanganan pengaduan, penerbitan sanksi dan penerbitan izin lingkungan dengan KLHK;
 - f. Melakukan pemantauan rutin dan Kerjasama dengan stakeholder terkait (KPH Larona, Camat Towuti dan Desa Lioka) untuk Rehabilitasi DAS IPPKH;
 - g. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada seluruh sekolah yang ada di Kab. Luwu Timur melalui Kerjasama DLH, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Luwu Timur terkait gerakan PBLHS dan dalam penyusunan dokumen PBLHS;
 - h. Melakukan sosialisasi secara rutin kepada Masyarakat & pemerintah terkait kampung iklim;
 - i. Upayakan Mobil pengangkut sampah menjemput di bank sampah unit agar bank sampah tetap aktif dan regulasi



perputaran uang untuk hasil penjualan sampah lebih ditingkatkan;

- j. Diperlukan sosialisasi, pelatihan & dukungan teknis dari terhadap pelaku usaha/kegiatan penghasil LB3;
- k. Tingkatkan sarana dan prasarana laboratorium serta Tambahkan personal laboratorium dan peningkatan kompetensi SDM laboratorium.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja :**

- 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota :
 - Sub Kegiatan Pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota :
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota :
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - c. Program Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Pengelolaan Persampahan
 - Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
 - Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
 - d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) :
 - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota



- Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
- Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH;
- Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH.

B. Indikator Kinerja "*Indeks Resiko Bencana*"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

$$R = H \times \frac{V}{C}$$

Dimana :

R = Risk (Risiko)

H = Hazar (Bahaya)

V = Vulnerability (kerentanan)

C = Capacity (Kapasitas)

Untuk indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) Luwu Timur pada tahun 2023, ditargetkan dengan nilai 202 (tinggi) dan realisasi target kinerja menurun menjadi 152,28 (risiko tinggi) dengan persentase capaian kinerja sebesar 133%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana target kinerja tahunan yang ditetapkan dengan nilai 202 (tinggi) dengan realisasi kinerja 176,14 (risiko tinggi), IRB tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui BPBD untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. **"Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun"**. Semakin kecil nilai IRB berarti semakin baik, IRB yang turun merupakan indikasi adanya investasi di bidang Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Program penanggulangan bencana dapat mengurangi risiko. **IKD** dan **IRB** menjadi **RAPOR** bagi **Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana

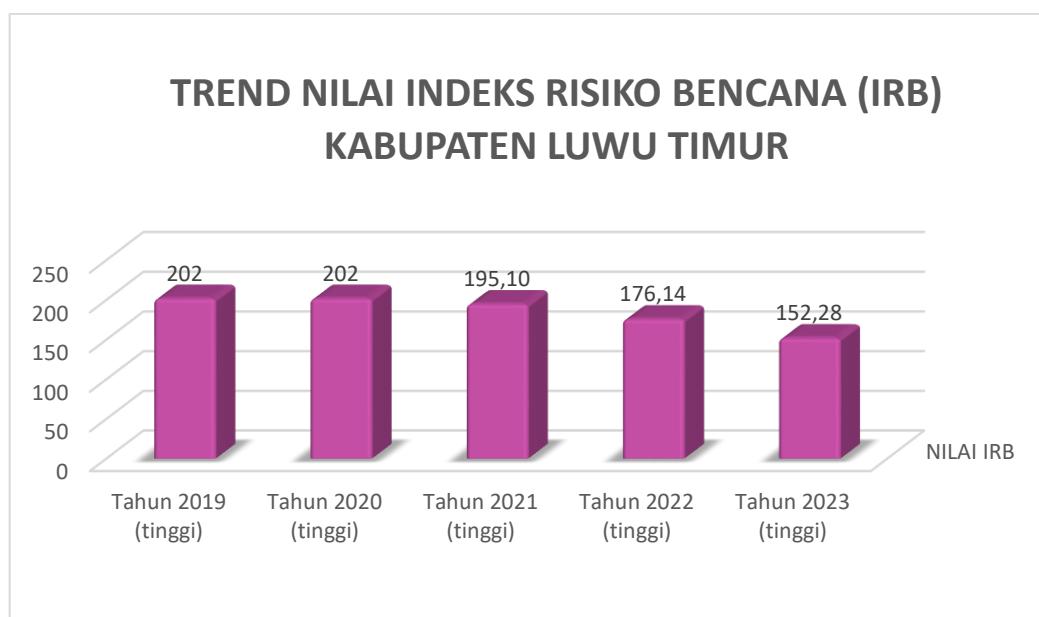
Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing -masing provinsi dan kabupaten/kota. **Komponen bahaya** adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. **Komponen kerentanan** adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara **komponen kapasitas** adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.



Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/ kota dilakukan dengan memerhatikan faktor hazard, vulnerability, dan capacity. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut. Dengan demikian, Indeks Risiko Bencana ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan risiko bencana yang ada. Indeks Risiko Bencana Indonesia dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan indeks risiko bencana di suatu kabupaten/kota.

Adapun Trend Nilai Indeks Risiko Bencana dapat dilihat pada tabel berikut ini :



(Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun Kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	2021	195.10	-
		2022	182.45	111%
		2023	152,28	133%



❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 (Untuk Indikator Kinerja Indeks Resiko Bencana (IRB) merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026).

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Real isasi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Reali sasi	Targ et	Realisa si
1.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	202	176. 14	202	152,2 8	202	-	202	-	202	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja:**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

- Penyebab tercapainya target atau turunnya tingkat resiko bencana dari tahun-tahun sebelumnya adalah :
 - a. Adanya pelaksanaan FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam rangka penurunan Nilai IRB;
 - b. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur;
 - c. Adanya peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. Adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait kebencanaan dari OPD terkait;
 - e. Pelaksanaan Program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat;
 - f. Penanggulangan bencana telah menjadi program prioritas kepala daerah yaitu Mitigasi Bencana.
- Alternative solusi yang dilakukan :
 - a. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Forum Group Discussion Penilaian Indeks Ketahanan Daerah sesuai timeline ;
 - c. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data pendukung dari OPD terkait dalam Penilaian Indeks Ketahanan Daerah untuk memaksimalkan Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana;

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

1. Indeks Resiko Bencana (IRB)

a. Program Penanggulangan Bencana:

- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota:



- Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana);
 - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana:
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit.
 - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- c. Program Penanganan Bencana
- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian



Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.8.106.397.414 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.7.006.205.588,68 atau 86,43% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 13,57%. Jika disimpulkan realisasi penggunaan anggaran dengan realisasi kinerja bahwa anggaran yang disediakan digunakan dengan cukup efektif dan efisien.

Misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik”** dengan tujuan **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani”**. Untuk mencapai misi 4, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandia, Kesehatan, Rumah Sakit, Pendidikan, Perhubungan, Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Pertanian dan Bapelitbangda.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN* ” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	A	A (78,438)**	100
2.	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	BB(71,00)	B(66,51)	93,68
Rata-Rata Capaian Kinerja			96,84%		

A. Indikator Kinerja **“Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

Hasil Evaluasi Dari Kementerian Dalam Negeri tentang IPKD

Untuk indikator *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)* pada tahun 2023 ditargetkan predikat A dan realisasi kinerja dengan predikat A (78,438)** (untuk angka sementara), karena penetapan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-



Sulawesi Selatan belum ada diriis sampai dengan saat ini, yang kemudian nilainya akan dirilis pada akhir tahun 2024. Untuk tahun 2021 nilai IPKD Luwu Timur sebesar 80,1614, sementara tahun 2022 sebesar 78,438, artinya terjadi penurunan capaian kinerja IPKD dari tahun 2021 ke 2022. Namun untuk perbandingan capaain IPKD tahun 2023 belum ada karena masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun tabel Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab/Kota Se-Sulawesi Selatan Klaster Sedang
Tahun Anggaran 2021**

No.	Kab	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Kategori	Nilai
1.	Luwu Timur	14,988	19,1379	11,1207	15	4,9150	15	80,1614	Baik	A
2.	Bantaeng	12,004	20	14,4828	10	3,2398	15	74,7270	Perlu Perbaikan	B
3.	Pangkajene Kepulauan	10,327	18,2759	7,5000	20	3,0166	15	74,1197	Perlu Perbaikan	B
4.	Luwu Utara	6,654	19,6552	8,2759	10	2,3007	15	61,8856	Perlu Perbaikan	B
5.	Bulukumba	9,565	13,7931	12,9310	10	2,6234	10,0050	58,9175	Perlu Perbaikan	B
6.	Wajo	7,449	19,8276	5,4310	15	1,5956	5,0100	54,3132	Perlu Perbaikan	B
7.	Tana Toraja	7,998	12,0690	7,7586	15	2,5781	0	45,4039	Sangat Perlu Perbaikan	C

(Sumber Data : Bapelitbangda Tahun 2023)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1(satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pengukuran IPKD dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :



1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terkait dengan dokumen RPJMD dan RKPD;
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait Dokumen KUA-PPAS dan APBD;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD; dan
4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :
 1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
 4. Penyerapan anggaran;
 5. Kondisi keuangan daerah; dan
 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

B. Indikator Kinerja "**Nilai Akuntabilitas Kinerja**".

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai SAKIP Daerah adalah :

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2023 ditargetkan predikat BB (71,00) dan realisasi kinerja adalah B (66,51) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 93,68. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja tahunan yang ditetapkan tidak berhasil dicapai atau belum bisa naik predikat dari B ke BB, namun demikian untuk komponen nilai/poin mengalami peningkatan dari 64,26 menjadi 66,51 (naik 2,25 poin) dan merupakan kenaikan paling tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga tren implementasi AKIP cenderung terjadi penguatan dengan hasil nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya penilaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai yang berarti bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Luwu Timur sudah menunjukkan progres peningkatan dan kemajuan yang "**baik**" yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Adapun rincian hasil evaluasi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2021	2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,01	18,83	20,50
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,01	19,01	19,14
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,91	12,02	12,11
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	5,48	14,40	14,76
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,82	64,26	66,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

(Sumber data: Hasil evaluasi AKIP Thn 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & RB)

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	2021	A (80,16)	-
		2022	A (78,438)	-
		2023	A (78,438)	100

Capaian Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP Daerah	Predikat	2021	B (62,82)	-
		2022	B(64,26)	-
		2023	B(66,51)	93,68

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja Tahunan RPJMD Tahun 2021-2026.

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Realisasi								
1.	Indeks Pengelola	A	A (78,43)	A	A(78,438)	A	-	A	-	A	-



	an Keuangan Daerah (IPKD)		8))**						
--	------------------------------------	--	----	--	-----	--	--	--	--	--	--

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Targ et	Reali sasi	Targ et	Reali sasi	Targ et	Realis asi	Targ et	Realis asi	Targ et	Reali sasi
1.	Nilai SAKIP Daerah	BB (70,00)	B (64,2 6)	BB (71,00)	B (66,5 1)	A	-	A	-	A	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

1. Keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dipengaruhi oleh:
 - Kapasitas Manajemen SDM pengelolaan keuangan yang lebih responsif dan kerjasama yang baik ;
 - Penguatan sistem pengendalian intern dimana dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan setiap triwulan;
 - komitmen dan konsisten dalam menjalankan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran seperti kesesuaian nomenklatur dan pagu program RPJMD dan RKPD, RKPD dan KUA-PPAS, KUAPPAS dan APBD;
2. Faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja akuntabilitas kinerja :
 - Rumusan tujuan dalam dokumen perencanaan beberapa PD belum dilengkapi dengan indikator tujuan ;
 - Perbaikan perencanaan kinerja belum sempurna dan belum merata ke seluruh PD, terutama terhadap sebagian PD utama serta pada PD klaster pendukung dan klaster tambahan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 89 tahun 2021 ;
 - Kualitas perjenjangan kinerja belum sempurna dan belum merata ke setiap PD. Di sebagian PD, pohon kinerjanya masih berorientasi pada urusan dan struktur organisasi serta program/kegiatan eksisting. Lainnya, di sebagian pohon kinerja PD belum menggambarkan hubungan kausalitas yang logis dengan mempertimbangkan CSF, terutama di level taktikal dan operasional, yang menunjukkan bahwa pohon kinerja belum menggambarkan pemecahan masalah atau solusi dari kondisi yang dihadapi;
 - Penetapan target kinerja di dalam PK sebagian PD penuh sepenuhnya melihat pada capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga ditemukan penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi sebelumnya;
 - Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat PD sebagian besar belum dilengkapi definisi operasional melainkan hanya formulasi



perhitungan saja, sehingga belum sepenuhnya dapat menjelaskan secara detail dan komprehensif atas formula perhitungan dan indikator kinerja ;

- Masih ditemukan formulasi indikator kinerja di tingkat Pemda yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup;
- Laporan Kinerja PD belum sempurna pada aspek analisis informasi, sebagian belum mengungkapkan dengan jelas aspek ketercapaian kinerjanya disertai analisis keberhasilan dan kegagalan serta belum dilengkapi dengan bukti dukung dan data dukung yang relevan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja berikutnya secara optimal;
- Kualitas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja internal masih belum baik, terutama terhadap kedalaman analisis dan detail informasi;

❖ **Alternative /Solusi pemecahan masalah :**

- A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
 - Melakukan pembahasan tindaklanjut bersama tim APIP Inspektorat agar tidak ada temua yang berulang;
 - Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bersama OPD;
 - Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan sesuai kebutuhan.
- B. Nilai Akuntabilitas Kinerja :
 - Melakukan reviu kembali atas dokumen perencanaan PD dengan memastikan bahwa rumusan perencanaan kinerja telah mengacu pada isu strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan terkawal dalam rumusan tujuan, dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil/outcome. Selanjutnya, penetapan tujuan dan sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup;
 - Memperbaiki kualitas perjenjangan kinerja seluruh PD dengan sepenuhnya mengacu pada prinsip penyusunan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021. Serta memastikan bahwa perjenjangan kinerja memiliki hubungan kausalitas yang logis dengan mempertimbangkan CSF di setiap level, sampai ke level operasional.
 - Memastikan bahwa penetapan target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya mengacu pada capaian dan realisasi tahun sebelumnya;
 - Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan memberikan informasi definisi operasional dan memberikan penjelasan detail setiap formulasi perhitungan dengan acuan kebijakan maupun data dukung lainnya. Selanjutnya memastikan bahwa definisi operasional dan formulasi perhitungan tersebut relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan, serta sesuai pada level kinerjanya;



- Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh PD dengan memperdalam analisis informasi pada pencapaian kinerja, serta memperkuat data dan bukti dukungterkait yang relevan guna memperkuat analisis tersebut;
- Mendorong pemanfaatan informasi pada laporan kinerja secara optimal dengan menggunakan sebagai masukan dalam perencanaan kinerja selanjutnya, seperti dalam penetapan target yang lebih baik, maupun dalam penyesuaian strategi maupun aktivitas dalam rangka mewujudkan kinerja yang lebih baik;
- Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memperdalam analisis penilaian dan menuangkannya secara detail ke dalam LHE.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Rep. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran ;
 - Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota;
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaopran Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;



- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat Mendesak
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Standar Harga;
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - Penilaian Barang Milik Daerah;
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Penataan Kelembagaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebesar Rp.341.290.039.024 dengan realisasi sebesar Rp.336.207.256.812 atau 98,51% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,49%.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis " *MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK* " dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	IKM Pelayanan SPM	Nilai	84.75	98,49**	116,21%
2.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	84,31	87,84	104,19%
Rata-Rata Capaian Kinerja			110,2%		



A. Indikator Kinerja "**IKM Pelayanan SPM**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh nilai Indeks Pelayanan SPM adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai "rata-rata Tertimbang" terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi :

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan,kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Penerapan dan Pencapaian SPM yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 ditargetkan dengan nilai sebesar 84,75 dan realisasi kinerja adalah 98,49 (angka sementara) atau predikat **TUNTAS UTAMA** dengan persentase capaian sebesar 116,21%. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target pada indikator kinerja tersebut. Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM ini merupakan pencapaian tahun kedua sesuai dengan IKU 2022-2026 Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Bupati tahun 2023, Hasil penilaian IKM Pelayanan SPM ini untuk kedua kalinya dilakukan Evaluasi Penerapan SPM berdasarkan e-SPM Secara Nasional yang bersumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik.

IKM merupakan cara untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kepuasan masyarakat menerima layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan keberhasilan pelayanan penyelenggaraan publik, yang dilakukan melalui survei IKM. Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan untuk mencapai peningkatan IKM adalah penerapan Standar



Pelayanan Minimal (SPM), dimana telah diatur dalam UU Nomor 32/2004 Pasal 11 ayat (4) yang menyebutkan "Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. SPM merupakan alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata berdasarkan jenis pelayanan, indikator, nilai, dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan. Adapun Bidang urusan yang menjadi target survey IKM adalah :

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Urusan Sosial;

B. Indikator Kinerja "**IKM Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan**"

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Angka Harapan Lama Sekolah adalah :

Nilai IKM terhadap dihitung dengan menggunakan nilai "rata-rata Tertimbang" terhadap masing-masing unsur pelayanan, Dalam Perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan, maka setiap unsur yang dikaji memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = 1$$

Dimana X adalah jumlah unsur yang dikaji;

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Layanan} \times 25$$

Keterangan :

Ruang Lingkup IKM antara lain meliputi : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk/spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2023 yang merupakan pencapaian tahun kedua sesuai dengan IKU Kabupaten 2022-2026 dan perjanjian kinerja ditargetkan dengan nilai 84,31 dan capaian realisasi sebesar 87,84 dengan



persentase capaian 104,19%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target indikator IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun tabel perhitungan IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2023

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
5	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
6	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
7	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
8	3	3	3	4	3	3	3	2	4	
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
10	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
11	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
13	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
14	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
15	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
16	4	4	3	4	3	3	3	3	4	
17	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
18	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
20	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
28	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
29	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
30	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
31	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
32	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
33	4	4	3	4	3	3	3	3	3	
34	3	4	3	4	3	4	3	4	4	
35	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
36	4	3	4	4	4	4	4	3	4	



37	4	4	4	4	4	4	3	3	4
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4
39	4	3	4	4	3	4	4	4	4
40	4	4	3	4	3	4	4	4	4
41	4	3	3	4	4	3	4	3	4
42	4	3	4	4	3	4	3	3	4
43	4	3	4	4	4	4	4	4	4
44	4	3	3	4	3	3	3	4	4
45	4	3	3	4	3	3	4	4	4
46	3	4	3	4	3	3	4	3	3
47	3	3	3	4	3	3	3	3	3
48	4	3	3	4	3	3	4	4	4
49	3	3	3	4	4	3	3	3	3
50	3	3	3	4	3	4	3	3	4
51	4	3	3	4	4	4	4	4	4
52	3	3	4	4	3	4	4	4	4
53	3	3	4	4	3	3	4	4	4
54	4	3	3	4	4	3	3	3	4
55	3	3	3	4	3	3	3	3	3
56	3	4	4	4	4	4	3	3	4
57	3	3	3	4	3	3	4	4	3
58	4	3	3	4	4	3	3	4	3
59	4	4	3	4	3	3	3	4	3
60	3	3	3	4	3	4	4	3	3
61	4	4	3	4	3	4	3	4	3
62	3	4	4	4	3	4	3	3	3
63	3	3	3	4	3	4	3	4	3
64	4	3	3	4	3	4	3	3	4
65	3	4	3	4	3	4	4	4	3
66	4	4	3	4	3	3	4	3	4
67	3	3	3	4	4	3	4	3	3
68	3	4	3	4	3	3	4	4	3
69	4	4	4	4	3	3	3	3	3
70	3	3	3	4	4	3	4	4	4
71	3	3	3	4	4	3	3	3	3
72	3	3	3	4	4	3	3	4	3
73	3	3	4	4	4	3	3	3	3
74	3	3	3	4	3	3	3	4	3
75	3	3	4	4	3	3	4	3	3
76	3	3	3	4	4	4	3	4	4
77	4	4	3	4	3	4	3	3	3
78	3	3	2	4	3	2	3	2	3
79	3	4	4	4	3	3	4	3	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	3	3	3	4	3	3	3	3	4
82	4	3	3	4	4	4	4	4	4
83	3	4	4	4	3	3	3	4	4



84	3	4	3	4	3	4	4	4	3
85	4	4	3	4	3	3	3	4	4
86	3	4	4	4	3	4	3	3	4
87	3	3	3	4	3	4	3	3	3
88	4	3	4	4	3	4	4	4	3
89	3	3	3	4	3	4	3	3	3
90	4	4	4	4	3	4	4	4	4
91	3	3	3	4	3	3	4	3	3
92	4	4	3	4	4	3	4	3	3
93	3	3	3	4	3	3	3	3	3
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	3	4	4	4	3	4	4	4
96	4	4	3	4	3	3	4	3	4
97	4	3	3	4	3	4	3	4	3
98	3	3	4	3	3	4	3	4	4
99	4	3	3	4	3	3	3	3	3
100	3	3	3	4	3	3	3	3	4
101	3	3	3	4	3	3	3	4	3
102	4	4	4	4	3	4	4	4	4
103	3	4	3	4	3	3	3	3	3
104	4	4	3	4	3	4	4	3	3
105	3	3	3	4	3	3	4	3	3
106	4	4	3	4	3	3	3	3	4
107	3	3	3	4	3	3	3	3	4
108	3	4	4	4	4	4	4	4	4
109	3	3	3	4	3	3	3	3	4
110	3	3	3	4	3	3	3	3	4
111	3	3	3	4	3	3	3	3	4
112	4	3	4	4	4	3	3	4	4
113	3	3	3	4	3	3	3	4	4
114	3	3	3	4	3	3	3	3	3
115	3	3	3	4	3	3	4	4	4
116	3	4	3	4	3	3	3	3	3
117	4	3	3	4	3	3	4	3	3
118	3	4	3	4	3	3	3	3	4
119	4	3	3	4	3	4	3	4	4
120	4	3	3	4	3	3	3	3	4
121	4	3	3	4	3	3	4	3	4
122	3	3	4	4	3	3	3	4	3
123	3	4	4	3	3	3	3	3	4
124	3	3	3	4	3	3	3	3	3
125	3	3	4	4	3	4	3	4	4
126	4	3	3	4	3	3	3	4	4
127	3	4	4	4	4	3	3	4	3
128	4	3	3	4	3	3	3	4	3
129	3	4	3	4	3	3	4	3	4
130	4	3	4	4	3	3	3	3	3



131	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3
132	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
133	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
134	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4
135	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4
136	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4
137	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3
138	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
139	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3
140	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
141	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
142	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
143	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3
144	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4
145	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3
148	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4
149	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3
150	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4
151	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4
152	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
153	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4
154	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
155	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3
156	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4
157	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
158	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4
159	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3
160	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4
161	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4
162	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
163	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3
164	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4
165	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4
166	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4
167	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3
168	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4
169	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3
170	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4
171	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3
172	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4
173	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4
174	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
175	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3
176	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
177	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3



178	4	3	4	4	3	4	4	4	4
179	3	4	3	4	4	4	4	3	4
180	3	4	3	4	3	3	4	4	3
181	3	3	4	4	4	3	3	4	3
182	4	4	3	4	3	4	3	4	3
183	3	4	3	4	4	4	3	4	4
184	4	3	4	4	4	4	4	4	4
185	3	4	3	4	3	4	4	3	4
186	4	3	3	4	3	4	4	4	3
187	4	3	4	4	3	4	3	4	4
188	4	3	3	4	3	3	4	3	3
189	4	3	3	4	3	3	3	3	4
190	4	3	3	3	3	3	4	4	3
191	4	4	3	4	3	4	3	4	4
192	3	4	3	4	3	3	3	3	3
193	4	4	3	4	3	4	4	4	3
194	3	4	3	4	3	3	4	3	4
195	3	4	3	4	3	4	3	3	3
196	4	3	4	4	3	3	4	3	4
197	4	4	4	4	3	4	3	4	4
198	4	3	3	4	3	3	4	3	4
199	4	3	3	4	3	3	4	3	3
200	3	4	3	4	3	4	3	3	4
201	3	3	4	4	4	3	3	4	4
202	4	3	3	4	3	4	3	4	4
203	3	4	3	4	3	3	3	3	3
204	4	3	3	4	3	3	3	3	4
205	3	3	3	4	3	3	3	3	4
206	3	3	3	4	3	4	4	3	3
207	4	4	3	4	3	3	3	3	3
208	3	3	3	4	3	4	3	4	3
209	3	4	3	4	3	3	4	3	4
210	4	3	4	4	3	3	4	3	4
211	3	3	4	4	3	3	3	4	3
212	4	4	4	3	3	3	3	3	4
213	4	3	3	4	3	3	3	3	3
214	3	3	4	4	3	4	3	4	4
215	4	3	3	4	3	3	3	4	4
216	4	3	4	4	3	3	3	4	3
217	4	3	3	4	3	3	3	4	3
218	3	4	3	4	3	3	4	3	4
219	4	3	4	4	4	3	3	3	3
220	3	4	3	4	3	4	3	3	3
221	4	3	3	4	3	4	3	3	3
222	3	3	3	4	3	3	3	3	4
223	4	3	3	4	3	4	4	4	4
224	3	4	3	4	4	3	3	3	4



225	3	4	3	4	3	3	3	3	4
226	4	3	3	4	3	4	3	3	3
227	4	3	3	4	3	3	3	3	4
228	4	3	4	4	3	3	3	3	3
229	4	4	3	4	3	4	4	4	4
230	4	3	4	3	3	4	4	4	4
231	3	4	4	4	3	3	3	3	4
232	4	4	3	4	3	4	3	4	3
233	3	4	3	4	3	3	3	3	4
234	4	3	4	4	3	4	3	4	3
235	3	4	3	4	4	4	3	4	4
236	4	3	4	4	3	3	4	4	3
237	4	3	3	4	3	3	3	3	4
238	3	4	3	4	3	3	4	4	3
239	3	3	4	4	3	4	3	3	4
240	4	3	4	4	3	3	4	3	4
241	4	4	4	4	3	3	4	4	4
242	3	3	4	4	3	4	4	3	4
243	4	3	4	4	4	3	4	4	4
244	3	4	3	4	4	4	3	3	3
245	3	4	3	4	4	3	3	4	4
246	4	4	3	4	4	4	4	4	4
247	4	3	3	4	4	4	4	3	4
248	3	4	3	4	4	4	4	3	3
249	3	4	3	4	3	3	3	4	4
250	4	3	4	4	3	3	4	3	4
251	4	3	4	4	4	4	3	3	4
252	3	4	3	4	4	3	3	4	3
253	3	4	4	4	3	4	4	3	4
254	4	4	3	4	3	4	3	4	4
255	4	3	4	4	3	4	3	4	4
256	3	3	3	4	4	4	4	4	3
257	4	3	4	4	3	4	3	4	4
258	3	3	3	4	3	3	4	3	3
259	4	4	4	4	3	4	3	4	4
260	3	3	3	4	4	3	4	3	3
261	3	3	3	4	3	4	3	4	4
262	4	3	3	4	4	4	4	3	4
263	4	4	4	4	4	4	4	4	3
264	4	4	3	4	3	3	3	4	3
265	3	3	4	4	3	4	4	4	4
266	4	4	3	4	3	3	3	3	4
267	3	3	4	4	3	4	3	4	4
268	3	4	3	4	3	4	3	4	3
269	4	3	3	4	3	4	3	3	4
270	3	3	3	4	3	3	4	4	3
271	4	3	3	4	3	4	4	4	4



272	3	3	3	4	3	3	3	3	4
273	4	3	4	4	4	3	3	3	3
274	3	4	3	4	4	3	4	4	4
275	4	3	4	4	3	3	4	3	4
276	3	4	4	4	4	4	4	4	4
277	3	3	3	4	3	3	4	3	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	4	4	4	4	3	3	3	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	3	4	4	3	3	4	4	3
282	3	3	4	4	3	3	3	3	4
283	4	4	3	4	3	4	3	3	3
284	4	3	3	4	3	3	3	4	3
285	4	4	4	4	3	4	3	4	4
286	3	4	4	4	4	4	4	4	4
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	4	4	4	4	4	4	4	4
290	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	3	4	3	4	4	4	3	3	4
292	3	4	3	4	3	4	4	4	4
293	4	4	4	3	3	3	3	3	4
294	4	4	3	4	3	3	3	3	3
295	3	4	3	4	3	3	4	3	4
296	4	3	3	4	3	3	3	4	3
297	4	4	4	4	4	4	4	4	4
298	3	4	4	4	4	4	4	4	4
299	4	3	3	4	3	3	3	3	4
300	3	3	3	4	4	3	4	3	3
301	4	4	3	4	3	4	3	4	3
302	4	4	3	4	3	4	3	4	3
303	3	3	4	4	4	3	3	4	3
304	4	3	3	4	3	3	3	3	4
305	3	4	3	4	3	4	3	3	3
306	4	3	4	4	3	4	3	4	3
307	4	3	4	3	3	4	4	4	4
308	3	4	3	4	3	3	3	3	4
309	4	4	4	4	3	3	4	4	4
310	4	3	3	4	4	3	4	3	4
311	3	4	3	4	3	3	4	4	3
312	4	3	4	4	3	3	4	3	4
313	4	4	3	4	3	4	4	3	3
314	4	3	4	4	3	3	4	3	4
315	4	4	3	4	4	4	3	4	4
316	4	3	4	4	4	4	3	3	3
317	3	4	3	4	3	4	3	3	4
318	4	3	3	4	3	3	4	3	4



319	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3
320	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4
321	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3
322	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4
323	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
324	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
325	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3
326	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4
327	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
328	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4
329	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
330	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3
331	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
332	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3
333	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
334	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3
335	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4
336	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
337	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3
338	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3
339	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3
340	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4
341	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4
342	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3
343	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
344	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
345	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
346	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3
347	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4
348	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
349	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3
350	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4
351	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
352	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3
353	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3
354	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4
355	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
356	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4
357	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3
•Nilai /Unsur	1260	1232	1202	1419	1175	1234	1231	1243	1293	
NRR / unsur	3,529	3,451	3,367	3,975	3,291	3,457	3,448	3,482	3,622	*) 3,514
NRR tertbg/ unsur	0,392	0,383	0,374	0,442	0,366	0,384	0,383	0,387	0,402	
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										87,84



			No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
Keterangan :			U1	Persyaratan	3,529
- U1 s.d. U14	= Unsur-Unsur pelayanan		U2	Prosedur	3,451
- NRR	= Nilai rata-rata		U3	Waktu pelayanan	3,367
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat		U4	Biaya/tarif	3,975
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang		U5	Produk layanan	3,291
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25		U6	Kompetensi pelaksana	3,457
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi		U7	Perilaku pelaksana	3,448
NRR tertimbang	= NRR per unsur x 0,111 per unsur		U8	Sarana dan Prasarana	3,482
			U9	Penanganan Pengaduan	3,622
IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) :			87,84	= Baik	
Mutu Pelayanan :					
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00				
B (Baik)	: 76,61 - 88,30				
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60				
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99				

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKM Pelayanan SPM Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
IKM Pelayanan SPM	Nilai	2021	-	-
		2022	91,65	111,20%
		2023	98,49	116,21%

Capaian IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	2021	-	-
		2022	87,80	106,80%
		2023	87,84	104,19%



❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026. (Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan SPM merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	IKM Pelayanan SPM	82,42	91,65	84,75	98,49*	85,68	-	87,78	-	90	-

(Untuk Indikator Kinerja IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan indikator tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:)

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Realisasi								
1.	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	82,21	87,80	84,31	87,84	86,23	-	88,10	-	88,32	-

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

A. IKM Pelayanan SPM :

1. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
2. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang memadai
3. Penempatan tenaga pendidik dilakukan secara merata,
4. Peningkatan KIE kepada ibu hamil, sehingga melahirkan di fasilitas Kesehatan.
5. Penyediaan sarana mobilitas untuk menjemput dan mengantar pulang ibu yang bersalin di puskesmas.
6. Bidan desa yang aktif melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.
7. Dukungan Anggaran yang sangat baik dalam memacu pelayanan spm
8. Dukungan Personil pada bidang yang menangani Penyediaan kebutuhan pokok Air minum dan Penyediaan pengelolaan air limbah domestik
9. Penanganan yang tanggap terhadap sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana,



10. Alokasi anggaran untuk pendataan cukup maksimal, sehingga identifikasi yang dilakukan bersifat makro.
11. Untuk Capaian dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 250 org, Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD, Penyebaran informasi melalui FB, IG 1.895 org, Penyampaian informasi melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 10 kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 274.359 org dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 276.254 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa (baseline data). Capain yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan peringatan dini bencana karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat,
12. Capaian dari Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 43 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 50 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 250 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Alat ini ditempatkan di kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa(baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
13. Capaian dari Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui perhitungan jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (633 laki-laki dan 650 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi.
14. Adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM dan intensifnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM.

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

1. Adanya peningkatan pelayanan perizinan karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai an kemampuan pelayanan Petugas yang ramah dan ruangan pelayanan yang nyaman sehingga masyarakat/pelaku usaha merasa nyaman dan puas, dengan aplikasi



OSS sehingga memberi kemudahan dalam pengurusan Izin menyebabkan percepatan waktu dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan lebih singkat;

2. Kepakaan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan transparan.

❖ **Alternative solusi yang telah dilakukan :**

A. IKM Pelayanan SPM:

1. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar pelayanan minimal pada jenjang TK/ PAUD, SD, dan SMP dengan mengalokasikan/menambah anggaran dibidang Pendidikan,
2. Pemenuhan perlengkapan dasar PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram,
3. Perlunya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk pemeratan guru pada satuan pendidikan,
4. Pemberian upah guru yang masih berstatus honorer untuk semua jenjang,
5. Memberikan pelatihan kepada guru melalui kegiatan KKG, MGMP dan Pelatihan Tutor untuk jenjang kesetaraan,
6. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik jenjang TK, SD dan SMP melalui dana BOP dan BOS,
7. Bantuan seragam sekolah untuk peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP,
8. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Kesetaraan,
9. Pencegahan perkawinan usia dini dan Peningkatan KIE tentang Kesehatan reproduksi pada remaja
10. Pendampingan 1000 HP, mulai dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun oleh bidan, jadi semua bidan harus ada ibu hamil/bayi yang didampingi.
11. Pemberdayaan kader untuk menggerakkan masyarakat yang punya balita agar dibawa ke posyandu setiap bulannya.
12. Pengadaan strip kolesterol sesuai jumlah warga lanjut usia
13. Dukungan anggaran perlu ditingkatkan
14. Diperlukan tambahan personil pada bidang yang menangani SPM
15. Diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
16. Diperlukan dukungan BBWS dan BPPW untuk penanganan aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan
17. Perlu dilakukan identifikasi lokasi bencana lebih detail terhadap lokasi-lokasi rawan bencana yang telah ditetapkan.
18. Perlu dilakukan pembuatan baseline lokasi rawan bencana



19. Melakukan Koordinasi dengan TPAPD kab. Luwu Timur dan mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM Trantibum;
20. Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial,
21. Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
22. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
23. Melakukan pengumpulan data base ditingkat dusun,
24. Memaksimalkan pendampingan desa terkait pelaksanaan Mitigasi Bencana di tingkat desa melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Dana Desa,
25. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan,
26. Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya,
27. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG,
28. Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan,
29. Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana,
30. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur,
31. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada dirjen bina pembangunan daerah terkait indikator dan capaian kinerja SPM;
32. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
33. Membentuk UPTD Satpol PP kecamatan,
34. Memenuhi Sarana dan Prasarana secara bertahap
35. Diperlukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki, minimal 1 unit mobil Damkar untuk 1 Kecamatan, yang sampai saat ini masih ada 2 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kab. Luwu Timur yang belum memiliki WMK/ posko Damkar dan Penyelamatan yaitu Kec. Nuha dan Kec. Mangkutana, Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas, dan peningkatan sumber daya aparatur pemadam kebakaran, dimana sangat disadari bahwa untuk mencukupi semua itu tentunya diperlukan anggaran yang besar
36. Pelaksanaan pendataan PPKS Target SPM;
37. Pengusulan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);



B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Mengembangkan inovasi inovasi yang diharapkan akan mampu memberi kemudahan bagi masyarakat dalam hal ini pengurus izin, seperti inovasi si Kumiz yang saat ini sedang di aplikasikan dalam proses perizinan dan non perizinan;
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi secara offline maupun online;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Penguatan Sumber Daya Manusia yang terkait dengan melakukan pelatihan dan konsultasi.

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

A. IKM Pelayanan SPM:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
10. Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota;
11. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;
12. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Program Penanggulangan Bencana;
14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
15. Program Rehabilitasi sosial;
16. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

B. IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
2. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.190.114.594.305 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.185.893.070.173 atau 97,78% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,22%.

Misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat** dengan tujuan **“Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Norma Ketertiban dan Ketentraman”**. Untuk mencapai misi 5, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidang ketertiban dan ketentraman, pemadam kebakaran dan penyelamatan dan kesatuan bangsa dan politik.

Sasaran Strategis 10

Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis **“TERPELIHARANYA RASA AMAN DAN DAMAI DALAM MASYARAKAT”** dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	76,81	81,67	106,33%
Rata-Rata Capaian Kinerja			106,33%		

B. Indikator Kinerja **“Indeks Ketertiban dan Ketentraman”**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja ketentraman dan ketertiban umum adalah :

Indikator indeks ketertiban dan ketentraman dibentuk oleh nilai rata-rata :

- 1. Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada;**
- 2. Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM ketenteraman dan ketertiban umum;**
- 3. Persentase Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten;**
- 4. Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%);**
- 5. Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%)**



$$\begin{array}{lcl}
 \text{Indeks Ketertiban dan Ketentraman} & = & 9,22 + 72,45 \\
 & = & 81,67
 \end{array}$$



Untuk indikator kinerja tahunan Indeks Ketertiban dan Ketentraman Pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 76,81 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 81,67 dan persentase capaian kinerja 106,33%. Artinya menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kerja Utama (IKU)

Kabupaten 2022-2026. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana target kinerja tahunan sebesar 76,72 dan realisasi capaian sebesar 59,82 dengan persentase capaian kinerja 77,97, terjadi peningkatan capaian kinerja..

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Kinerja *Indeks Ketertiban dan Ketentraman* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Indikator ini merupakan capaian tahun kedua berdasarkan IKU Kabupaten 2022-2026, adapun perbandingan capaian target dan realisasi tahun sebelumnya). dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Nilai	2021	-	-
		2022	59,82	77,97%
		2023	81,67	106,33%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar-	Real-	Tar-	Real-	Tar-	Realis-	Tar-	Realisa-	Tar-	Realisa-
1	Indeks Ketertiban dan ketentraman	76,72	59,82	76,81	81,67	77,21	-	77,43	-	77,86	-



❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Kebijakan penempatan personil Satpol PP di Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah dapat lebih intens dilakukan;
- ✓ Pemanfaatan media sosial dalam menyebarkan informasi -informasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sehingga masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dalam melaporkan adanya pelanggaran dan memberikan kritik dan saran untuk peningkatan kinerja Satpol PP;
- ✓ Peranan PPNS dalam penyelesaian kasus Pelanggaran Perda/Perkada;

❖ **Alternative Solusi Yang dilakukan :**

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar melalui Pendidikan dan Pelatihan. PNS pelaksana Satpol PP diikutkan untuk Diklat Jabatan Fungsional Pol PP dan Diklat PPNS bagi PNS yang memenuhi syarat;
- Anggota Satpol PP Non-PNS (upah jasa) diberikan program pelatihan-pelatihan kepamongprajaan agar dapat meningkatkan kemampuan membantu tugas pokok Satpol PP dalam penegakan Perda;
- melakukan monitoring terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa;
- Pembukaan Wilayan Manajemen Kebakaran (WMK) untuk daerah kecamatan yang belum memiliki WMK.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
 - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
 - c. Koordinansi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
 - g. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



- h. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada;
 - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
- ✓ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri.
- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.7.795.973.040 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.7.583.233.351 atau 97,27% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,73%.



Misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya”** dengan tujuan **“Meningkatkan Toleransi dan Kualitas Kehidupan Beragama serta Ketahanan Budaya Daerah”**. Untuk mencapai misi 6, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan yang membidang Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis **“MENINGKATNYA PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN”** dengan 2 (dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	%	95	96,1	101,16%
2.	Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat	%	95	82,4	86,74%
Rata-Rata Capaian Kinerja			93,95%		

A. Indikator Kinerja **“Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat”**

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat adalah :

Dimana : Cakupan Kinerja Kesejahteraan Rakyat

1. A = (Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi/Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang ditargetkan x100%)
2. B = Jumlah jemaah haji yang difasilitasi/Jumlah jemaah haji x 100%
3. C = Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi/Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang ditargetkan x 100%
4. D = Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif/Jumlah petugas keagamaan yang ditargetkan x 100% ,
5. E = Jumlah Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang dibantu hibah/Jumlah Rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ditargetkan x 100%))



$$\text{Rata-rata Persentase (\%)} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D} + \mathbf{E}}{5}$$

- Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang difasilitasi = 10
- Jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar agama yang ditargetkan = 12
- Jumlah Jemaah Haji = 159
- Jumlah Jemaah haji Yang di Fasilitasi = 159
- Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi =23
- Jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang mengikuti wisata religi yang ditargetkan = 23
- Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif =95
- Jumlah petugas keagamaan yang ditargetkan = 95
- Jumlah Rumah ibadah dan Lembaga keagamaan yang dibantu hibah = 81
- Jumlah Rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ditargetkan = 83

$$\begin{aligned}
 \text{Rata-Rata Persentase (\%)} &= (10/12 \times 100\%) + \\
 &(159/159 \times 100\%) + \\
 &(23/23 \times 100\%) + \\
 &(95/95 \times 100\%) + \\
 &(81/83 \times 100\%) / 5 \\
 &= (83) + (100) + (100) + (100) \\
 &+ (97,6) / 5 \\
 &= 480,5 / 5 \\
 &= 96,1
 \end{aligned}$$

Untuk Indikator *Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95 dan realisasi kinerja 96,1 dengan persentase capaian sebesar 101,16%. Hal ini menunjukkan bahwa target tercapai atau keberhasilan pencapaian target. Indikator ini merupakan capaian tahun kedua sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026.

Kehadiran **agama** secara fungsional sebagai "perekat sosial", memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa **masyarakat** menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja dan seperangkat peranan yang kesemuanya adalah dalam rangka memelihara kehidupan beragama dalam masyarakat. Nilai Agama terdiri dari beberapa bentuk yaitu **Aqidah**, merupakan sebuah sistem dari kepercayaan dan keyakinan yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, **Akhlik** yaitu seperangkat perilaku atau sifat dari seorang individu yang telah melekat dalam diri. Dari sifat-sifat tersebutlah, kemudian menimbulkan perbuatan yang mudah dilaksanakan tanpa harus memikirkan



pertimbangan terlebih dulu. **Ibadah** yaitu sebuah bentuk pengabdian individu terhadap Tuhan-Nya dengan berorientasikan pahala. Tujuan Pembentukan nilai-nilai agama dalam masyarakat yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Agar terhindar dari adanya krisis identitas diri yang membuat seorang individu tidak dapat menentukan nasibnya sendiri;
2. Menjadikan bekal berupa ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya;
3. Agar hidup seorang individu menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas;
4. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun untuk beragam contoh nilai-nilai dalam agama di masyarakat, antara lain;

1. Mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis dalam lingkungan bermasyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut.
2. Tidak menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi hasrat dunia.
3. Memelihara keasrian dan kebersihan lingkungan dan alam sekitar.
4. Menyantuni anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan disaat sedang memiliki banyak rejeki.
5. Tidak mengeksplorasi secara berlebih sumber daya alam yang tersedia untuk kelangsungan kehidupan generasi di masa mendatang.
6. Tidak melakukan perjudian dengan tujuan untuk menyambung hidup.
7. Tidak melakukan tindakan provokatif mengatasnamakan agama.
8. Menciptakan kedamaian dengan cara saling berbagi terhadap sesama.
9. Melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan.
10. Menjunjung tinggi perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya.
11. Tidak membuang sampah sembarangan.
12. Membantu teman saat tertimpa musibah tanpa memandang agama yang dianutnya.
13. Membantu masyarakat sekitar dalam membangun tempat peribadatan.
14. Mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
15. Mewujudkan cita-cita dengan menggunakan usaha sendiri tanpa harus berbuat kecurangan.
16. Tidak memaksakan kehendak individu lain untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita.
17. Mengedepankan tenggang rasa dalam bermasyarakat.
18. Bertoleransi dalam menjalani kehidupan sosial.



19. Tidak mencontek saat ujian sedang berlangsung.
20. Tidak mengganggu saat umat beragama lain sedang melakukan prosesi peribadatan.
21. Mengikuti gotong royong membersihkan lingkungan.
22. Tidak membicarakan keburukan orang lain.
23. Memelihara kebersihan dan keutuhan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
24. Tidak menyebarkan berita bohong kepada masyarakat luas.
25. Tidak menyebarkan kebencian kepada masyarakat luas.
26. Memberikan masukan yang sifatnya positif terhadap kinerja pemerintah.
27. Ikut berpartisipasi dalam membangun negara.
28. Tidak ikut mabuk-mabukan.
29. Tidak melanggar rambu lalu lintas saat sedang berkendara.
30. Selalu berpikir positif dalam menyikapi sesuatu.
31. Berperilaku sopan terhadap orang yang usianya lebih tua dari kita.
32. Bertanggung jawab ketika merusak barang yang bukan milik sendiri.

B. Indikator Kinerja "***Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat***".

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 25/A-09/I/Tahun 2022, formulasi cara untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah

Cakupan pelaksanaan Kegiatan Kebudayaan dimana:

A=Percentase capaian kegiatan Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (%) (Dinas Lingkungan Hidup) = 0

B=Percentase capaian kegiatan kebudayaan lokal yang dilestarikan (%) =80

C=Percentase capaian sanggar seni budaya yang dibina (%) = 100

D=Percentase capaian kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%) (KesbangPol) = 100

E=persentase capaian pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan (%) = 100

F=persentase capaian sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan (%) = 100

G=Percentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (%) (PMD) = 96,80

Rata-rata (%) = $\frac{A+B+C+D+E+F+G}{7}$

$$= \frac{0+80+100+100+100+100+96,80}{7}$$

$$= \frac{576,8}{7}$$



= 82,4

Untuk indikator *Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 95 dan realisasi kinerja sebesar 82,4% dengan persentase capaian kinerja sebesar 86,74%. Hal menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih belum dapat dicapai atau penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat belum optimal. Indikator ini merupakan capaian tahun kedua sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dan IKU Kabupaten 2022-2026.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian *Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat* selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026 dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Penerapan Nilai Agama dalam Masyarakat	%	2021	-	-
		2022	71,9	75,68%
		2023	96,1	101,16

Capaian *Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat* Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut (Untuk Indikator ini merupakan indikator baru tahun kedua pada IKU Kabupaten 2022-2026 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat	%	2021	-	-
		2022	53,79	56,62%
		2023	82,4	86,74

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026

(Untuk Indikator ini merupakan indikator baru tahun pertama pada IKU Kabupaten 2022-2026 sehingga belum ada perbandingan)

No.	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025		2026	
		Tar get	Real isasi	Tar get	Realisa si						
1	Cakupan Penerapan	95	71,9	95	96,1	95	-	95	-	95	-



	Nilai Agama dalam Masyarakat										
2	Cakupan Penerapan Nilai Budaya dalam Masyarakat	95	53,7 9%	95	82,4	95	-	95	-	95	-

❖ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran kinerja :**

➢ **Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat**

1. Seluruh kegiatan keagamaan terlaksana sesuai dengan target penerima yang direncanakan.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target sasaran kinerja:**

➢ **Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat**

1. Masih kurangnya data kebudayaan lokal yang dilestarikan karena belum adanya dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah yang memuat semua data kebudayaan lokal yang perlu dilestarikan;
2. Masih kurangnya cagar budaya yang ditetapkan.
3. Target yang ditetapkan terlalu tinggi;
4. Terbatasnya sumber daya manusia pada beberapa OPD Pengampu untuk melakukan tugas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

❖ **Alternative Solusi yang dilakukan :**

➢ **Cakupan Penerapan Nilai Agama Dalam Masyarakat**

1. Pengajuan proposal penerimaan dana hibah dilakukan atau diterima pihak terkait sebelum penetapan KUA-PPAS Pokok atau Perubahan atau sesuai dengan regulasi batas waktu pengajuan proposal dana hibah pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

➢ **Cakupan Penerapan Nilai Budaya Dalam Masyarakat**

1. diperlukan pokok-pokok pikiran pemajuan kebudayaan (PPKD) Kabupaten Luwu Timur yang dijadikan dasar untuk mengelola cagar budaya dan seni budaya yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu dibutuhkan SDM yang memadai untuk mengelola cagar budaya, seni budaya dan untuk melestarikan sejarah lokal yang ada di Kabupaten Luwu Timur disamping itu juga tentunya harus di dukung dengan Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan kebudayaan;
2. Memaksimalkan fungsi tim dan forum yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur untuk membantu melakukan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Luwu Timur;



3. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi serta pemberdayaan forum-forum strategis yang terbentuk di daerah.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang sasaran**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
2. Program Pengembangan Kebudayaan
Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan Penelestarian Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
Sub Kegiatan Peningkatan pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia kesenian tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah
Kegiatan Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah daerah kabupaten/kota;
Sub Kegiatan Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota;
Sub Kegiatan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah.
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan Peningkatan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota;
Sub Kegiatan Pendaftaran objek diduga cagar budaya;
Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya;
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
✓ Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan



- Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar Rp.21.647.997.590 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.20.875.033.896 atau 96,43% dengan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,57%.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada era otonomi daerah, akuntabilitas menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan "**good governance** sekaligus **clean government**". Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 sasaran strategis dengan 23 indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka besaran rata-rata capaian kinerja dan persentase realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.1
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
1	Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing	102,35%	97,27%	2,73%
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan	100%	90,84	9,16%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	100,38%	90,34**	2,47%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	60,10%	94,34%	5,66%
5	Ketersediaan Lapangan	56%	98,96	1,04%



6	Pekerjaan dan Lapangan Usaha Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah	112,46%	92,09%	7,91%
7	Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	111,96%	86,43%	13,57
8	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	96,84%	98,51%	1,49%
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	110,2%	97,78%	2,22%
10	Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai Dalam Masyarakat	106,33%	97,27%	2,73%
11	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan	93,95%	96,43%	3,57%

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 2.123.841.577.219,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.021.710.065.869,25 atau 95,19%, berdasarkan data hasil audit BPK. Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD
Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
		(RP)	(RP)	%	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	390.691.353.806,00	394.401.978.544,58	100,95	
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	238.588.526.149,00	246.731.693.563,59	103,41	
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.177.658.500,00	2.981.187.069,00	57,58	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	23.588.575.458,00	23.588.575.458,00	100,00	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	123.336.593.699,00	121.100.522.453,99	98,19	

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir tahun 2023, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.394.401.978.544,58 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.390.691.353.806,00 atau mencapai 100,95%. Dari jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi sebagai berikut :



1. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 246.731.693.563,59 atau sebesar 103,41% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 238.588.526.149,00;
2. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.981.187.069,00 atau sebesar 57,58 dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 5.177.658.500,00;
3. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Sebesar Rp. 23.588.575.458,00 atau sebesar 100,00 % dari target yang ditetapkan 23.588.575.458,00.
4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 121.100.522.453,99 atau 98,19% dari target sebesar Rp. 123.336.593.699,00.

Aspek Belanja Daerah

Tabel III.2
 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
 Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
5.1.	Belanja Operasi	1.266.763.111.781,00	1.192.238.807.683,66	94,12
5.2	Belanja Modal	334.306.920.202,00	313.767.765.805,75	93,86
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	548.000.000,00	10,96
5.4	Belanja Transfer	331.256.898.338,00	330.962.845.481,60	99,91
6.1	Penerimaan Pembiayaan	173.616.646.898,00	173.616.646.898,24	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.898.000.000,00	10.576.000.000,00	82,00
Jumlah		2.021.710.065.869,25	2.021.710.065.869,25	95,19

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Di tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

1. Luar Biasa, Kabupaten Luwu Timur Sabet Dua Penghargaan dari Kemenkes RI

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur berhasil menyabet dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI di Tahun 2023 ini.

Keduanya adalah penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)



2. DPK Lutim Raih Juara I Stand Terbaik di Festival Aksara Lontaraq ke IV Sulsel

Lutim,warta.luwutimur.go.id- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) berhasil meraih juara I Stand Terbaik dengan tema kain Taipa, pada Festival Aksara Lontaraq ke IV





3. Satu-Satunya di Luwu Raya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Terima Penghargaan ProKlim 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menorehkan tinta emas di kancah nasional. Pasalnya, daerah berjuluk Bumi Batara Guru ini lagi-lagi menerima sebuah



4. Peduli Gerakan Transisi PAUD ke SD, Sufriaty Budiman Terima Penghargaan Dari Kemendikbudristek

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bunda PAUD Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Hj. Sufriaty Budiman menerima Piagam Penghargaan Kategori Wiyata Darma Pratama dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset



5. Dua Sekolah di Lutim Berhasil Meraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Dua Sekolah asal Kabupaten Luwu Timur, yakni UPT SP SD Negeri 221 Malili dan UPT SP SMP Negeri 1 Tomoni berhasil



General, News, Pemerintahan ⏰ Oktober 17, 2023

6. Sekda Lutim Terima Piala dan Piagam KLA Tahun 2023 Kategori Madya

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli menerima Piala dan Piagam Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 kategori Madya yang



General, News, Pemerintahan ⏰ Agustus 16, 2023

[f Sebar](#) [Twitter Tweet](#)

7. Bupati Budiman Terima Penghargaan Sebagai Kepala Daerah Peduli Pendidikan

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman, menghadiri secara langsung pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) VI tingkat



8. Lutim Raih Penghargaan Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 Kategori "BB" Sangat Baik

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Setelah Sukses mendapatkan penghargaan atas Konsistensi dan keberhasilan dalam mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI, Luwu Timur kembali meraih penghargaan di bidang Kearsipan, yakni



General, News, Pemerintahan ⏰ Mei 24, 2023

[f Sebar](#) [Twitter Tweet](#)



9. Konsisten dan Berhasil Implementasikan Aplikasi SRIKANDI, Bupati Lutim Terima Penghargaan dari ANRI

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman terus menorehkan prestasi. Kali ini, Budiman menerima penghargaan tingkat nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

General, News, Pemerintahan 🕒 Mei 22, 2023



10. Lutim Terima WTP ke-11, Bupati Budiman : Prestasi Ini Berkat Kerjasama Semua Pihak

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin menandatangani Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan



11. Puskemas Mahalona Sabet Juara I Lomba Video Testimoni Imunisasi Suntikan Ganda tingkat Nasional

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Puskemas Mahalona Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur berhasil menyabet Juara I Lomba Video Testimoni Imunisasi Suntikan Ganda yang diselenggarakan oleh Kementerian

General, News, Pemerintahan 🕒 Mei 9, 2023



12 Inovasi Pospending PKM Bone Pute Masuk Top 30 KIPP 2023 Provinsi Sulsel

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan UPTD Puskesmas Bone Pute Kecamatan Burau, yakni inovasi Pospending atau Posyandu Pencegahan Stunting yang diinisiasi oleh Inovatornya Sirjhon

General, News, Pemerintahan 🕒 April 12, 2023



13 Hj. Sufriaty Terima Piagam Penghargaan Dari Gubernur Sulawesi Selatan

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) atas dedikasi dan partisipasi dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2021-2022, Ketua Forum Kabupaten



14 Sukses Kendalikan Covid-19, Lutim Terima Penghargaan PPKM Award 2023

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Setelah meraih penghargaan APBD AWARD dan UHC AWARD, Kabupaten Luwu Timur kembali meraih penghargaan tingkat nasional yaitu PPKM AWARD 2023, bahkan sukses

General, News, Pemerintahan 🕒 Maret 20, 2023





15. **Tiga Desa Wisata Kabupaten Luwu Timur Lolos 300 Besar ADWI 2023**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (KemenParekraf) Republik Indonesia kembali mengumumkan nama-nama Desa Wisata yang masuk peringkat 300 besar ADWI 2023 setelah sebelumnya

General, News, Pemerintahan ⏲ Maret 20, 2023



16 **Kabupaten Luwu Timur Terima UHC Award untuk Kedua Kalinya dari Kemenkes RI**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur untuk kedua kalinya menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan,

General, News, Pemerintahan ⏲ Maret 14, 2023



17 **Kabupaten Luwu Timur Wakili Sulsel Pada Anugerah Tinarbuka HAKIN Tahun 2023**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur mewakili Provinsi Sulawesi Selatan pada Lomba Anugerah Tinarbuka dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) Tahun 2023 yang diselenggarakan

General, News, Pemerintahan ⏲ Maret 14, 2023



18. **Kabupaten Luwu Timur Sukses Meraih Adipura Tahun 2022**

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Kabupaten Luwu Timur, dibawah kepemimpinan Bupati H. Budiman kembali sukses meraih penghargaan Adipura dengan kategori Kota Kecil. sebuah penghargaan yang sudah lama

General, News, Pemerintahan ⏲ Februari 28, 2023





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877),
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816),
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



provinsi. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah se-Indonesia.

Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penugasan oleh Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (1) Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, ayat (2) Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan peraturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya.

Pelaporan Tugas Pembantuan meliputi program/kegiatan kementerian atau lembaga yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 2 kepentingan daerah untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah disamping sebagai bagian strategis dari dokumentasi capaian kegiatan yang memang menjadi potret ketercapaian program/kegiatan tersebut pada daerah yang secara simultan dihajatkan berkontribusi pada masyarakat.

Tugas pembantuan pada hakekatnya menjadi keikutsertaan daerah maupun desa termasuk pula masyarakat atas pelaksanaan penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang tertentu.

Penyelenggaraan urusan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah diatur lebih lanjut pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sementara itu, pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Dekosentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu, sedangkan Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Berkenaan dengan uraian diatas, Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan urusan Bersama berkewajiban



mengintegrasikan keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di daerah baik yang dilaksanakan melalui mekanisme APBD maupun melalui mekanisme APBN, sehingga keseluruhan program dan kegiatan harus dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya dengan melakukan evaluasi kinerja sebagai analisis penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dalam konteks kinerja pemerintah daerah dan Bupati Luwu Timur sebagai kepala daerah otonom yang mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah, berkewajiban melaporkan penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan setiap tahun anggaran berakhir.

3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Luwu Timur selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai berikut:

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Luwu Timur, antara lain:

1) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kabupaten Luwu Timur pada Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi selain didanai dari APBD, juga mendapatkan dana APBN melalui dana tugas pembantuan. Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Timur mendapatkan alokasi dana dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

a) Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, antara lain;

- Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi Target 100%, dengan kegiatan fasilitasi dan pembinaan lembaga, fasilitasi pembinaan masyarakat, fasilitasi dan pembinaan keluarga, bantuan keluarga, bantuan peralatan/sarana, sarana pengembangan kawasan, prasarana bidang konektivitas darat (jalan) dan prasarana pengembangan kawasan.
- Program Dukungan Manajemen target 100%, dengan kegiatan layanan dukungan manajemen internal

b) Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kabupaten luwu timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah di tetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Transmigrasi
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu Timur 2023

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 067.07.4.350289/2023 Tgl 30 Nov 2022	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan,Perdesaan Dan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.272.262.000	4.247.708.197	99,42				
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	SKPC Koromala, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.100.000	44.830.000	99,40	1 Lembaga	1 Lembaga yang difasilitasi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	SKPC Koromala, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71.100.000	67.007.000	94,24	88 Orang	88 Orang yang difasilitasi memperoleh Layanan Sosial Budaya di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	SKPC Koromala, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.465.000	66.618.580	86,00	15 KK	15 KK difasilitasi Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi	100	
			Bantuan Keluarga	SKPC Koromala, Desa Mahalon a, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	677.400.000	677.194.272	99,97	92 KK	92 KK Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan	100	

LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR



			Bantuan Peralatan / Sarana	SKPC Koromala, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	527.042.000	526.822.600	99,96	1 Unit	1 Unit Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	100	
			Sarana Pengembangan Kawasan	Desa Buangin dan Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.416.323.000	2.411.356.811	99,79	18 Unit	18 Unit Fasilitas Umum yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	100	
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	SKPC Koromala, Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	372.860.000	369.574.734	99,12	1 Km	1 Km Panjang Jalan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	100	
			Prasarana Pengembangan Kawasan	Desa Buangin dan Desa Mahalona, Kec. Tiwuti	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.975.000	84.304.200	99,21	15 Km ² bidang, Km Hektar	15 Km ² bidang, Km Hektar	100	
			Program Dukungan Manajemen		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83.210.000	82.407.840	99,04				
			Layanan Dukungan Manajemen Internal	Kab. Luwu Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83.210.000	82.407.840	99,04	1 Layanan	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	



2) Kementerian Pertanian

a. Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Pertanian, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Dirjen Perkebunan, meliputi;

- Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas Target 100% dengan kegiatan, bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, koordinasi (baseline), bimtek, monitoring dan evaluasi lingkup pupuk dan pestisida, pelayanan publik kepada masyarakat, penerima pupuk bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi
- Program Dukungan Manajemen target 100%, dengan kegiatan layanan manajemen keuangan, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan, layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan manajemen satker daerah, penyusunan rencana program dan penganggaran satker.
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri target 100%, dengan kegiatan pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, kawasan kakao, intensifikasi tanaman kakao, pengawalan dan pendampingan kegiatan, penguatan perbenihan tanaman perkebunan, sarana pengembangan kawasan, kebun sumber benih tanaman perkebunan dan pemerihara kebun sumber benih-unggul lokal

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal (Dirjen) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Dirjen Perkebunan oleh Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten luwu timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah di tetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel:



Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Pilihan Bidang Pertanian
Oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKA TCAPAI AN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian	Surat pengesahan DIPA- NOMOR : SP DIPA-018.08.4.199133/2023		Kab Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	129.918.500	107.046.450	82,40				
			Program ketersediaan, akses dan komsumsi pangan berkualitas		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	9.800.000	7.500.000	76,53				
			Bimtek, Monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	9.800.000	7.500.000	76,53	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	43.918.500	30.036.650	68,39				
			Koordinasi [Base Line]		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	17.700.000	4.909.900	27,74				
			Bimtek, Monitoring dan evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida pertanian	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	17.700.000	4.909.900	27,74	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	

LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR



		Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Base Line)		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	26.218.500	25.126.750	95,84				
		Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	26.218.500	25.126.750	95,84	1 Layanan	1 Layanan	100	
		Program Dukungan manajemen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	76.200.000	69.509.800					
		Layanan Manajemen Keuangan	Kab. Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	76.200.000	69.509.800	91,22	1 dokumen	1 Layanan	100	
Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Pertanian	Surat pengesahan DIPA- NOMOR : SP DIPA- 018.05.4.199572/2023 Tanggal 30 November 2022.		Kab Luwu Timur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	689.840.000	687.343.817	99,64				
		Program Nilai Tambah Daya Saing Industri		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	286.880.000	285.551.060	99,54	100 Ha	100 Ha	100	
		pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	286.000.000	284.671.060	99,54				
		Kawasan Kakao			286.000.000	284.671.060	99,54				
		Intensifikasi Tanaman Kakao		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	266.000.000	264.900.000	99,59				
		Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	20.000.000	19.771.060	98,86				
		Penguatan perbenihan tanaman perkebunan		Dinas Pertanian dan	880	880	100	1 Ha	1 Ha	100	

LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR



					Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur						
			Sarana Pengembangan Kawasan (Base Line)		880	880	100				
			Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	880	880	100			
			Pemelihara Kebun Sumber Benih Unggu Lokal		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	880	880	100			
			Program Dukungan manajemen		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur	402.960.000	401.792.757	99,71	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan			402.960.000	401.792.757	99,71			
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			402.960.000	401.792.757	99,71			
			Layanan Manajemen Satker Daerah			402.960.000	401.792.757	99,71			
			Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran Satker			402.960.000	401.792.757	99,71			



3.3.2 Tugas Pembantuan/ Penugasan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur untuk anggaran tahun 2023, memperoleh bantuan anggaran Tugas Pembantuan/ Penugasan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni;

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan

a. Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , antara lain;

- Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik (Malili River Side), target 100%, meliputi kegiatan, Jumlah RTH Publik yang di Tata

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah di tetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel;



Tabel 3.3

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Mendasar Bidang Pekerjaan Umum
 Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pekerjaan Umum	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1093/IV/Tahun 2023 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik (Malili River Side)	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	7.387.684.463,55	7.387.684.463,55	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	
			Jumlah RTH Publik yang di Tata	Luwu Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur	7.387.684.463,55	7.387.684.463,55	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	



4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

a. Target Kinerja

Target Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain;

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, target 100%, meliputi kegiatan, antara lain:
 - Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga,
 - Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga,
 - Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk,
 - Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran,
 - Dan belanja sewa makan, minum rapat, dan alat ukur lainnya.

b. Realisasi

Realisasi pelaksanaan tugas pembantuan Pusat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan hukum atas pelaksanaan tugas pembantuan yang telah di tetapkan dan mengacu pada program, kegiatan serta rincian kegiatan, yang dijabarkan sebagai berikut dalam bentuk tabel;



Tabel 3.4

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Urusan Wajib Tidak Mendasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM ,KEGIATAN,OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	TINGKAT CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1093/VII/Tahun 2023, Tanggal 24 Juli 2023	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000	146.988,584	73,49				
			Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000	146.988,584	73,49				
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000	146.988,584	73,49				
			Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000	146.988,584	73,49				
			Belanja Makanan dan Minuman pada Sosialisasi Pelayanan Urusan Sosial	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.000.000	0	0	800 Paket	0	0	
			Makanan tambahan stunting	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	36.000.000	0	0				



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

					dan Desa							
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	45.090.000	33.430.000	74,14				
			Makan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.050.000	21.900.000	87,43	876 kotak	1002 kotak	100	
			Snack	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.040.000	11.530.000	57,53	1153 kotak	2004 kotak	100	
			Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.010.000	99.758.584	95,00				
			Pemberian Makanan Tambahan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.010.000	99.758.584	95,00				
			Balita	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	92.250.000	88.651.840	96,1				
			- Susu Bubuk 400 Gram	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	77.900.000	74.711.840	95,91	820 dos	6.560 saset	100	
			- Vitamin Becafort	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.350.000	13.940.000	97,14	410 botol	820 botol	100	
			Bumil	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.760.000,00	11.106.744	87,04				
			- Susu Bumil	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.180.000	3.912.744	93,61	44 dos	264 dos	100	
			- Vitamin	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	8.580.000	7.194.000	83,85	44 botol	1.320 botol	100	



**LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR**

					dan Desa							
			- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.900.000	4.900.000	100				
			Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.900.000	4.900.000	100				
			Spanduk	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.500.000	4.500.000	100	90 meter	228 meter	100	
			Baliho	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	400.000	400.000	100	8 meter	192 meter	100	
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.000.000	3.000.000	100				
			Papan Nama Rumah Gizi	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.000.000	3.000.000	100	1 Unit	1 Unit	100	
			Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.000.000	4.000.000	100	2 Unit	2 Unit	100	
			Meja Kerja Petugas Gizi	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.000.000	4.000.000	100				
			Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.000.000	1.900.000	95,00	2 Unit	2 Unit	100	
			Meja Kerja Petugas Gizi	Luwu Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.000.000	1.900.000	95,00				

Sumber : Laporan Perangkat Daerah Setelah Diolah Tahun 2023



3.3.3. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang terjadi selama pelaksanaan Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur antara lain:

Tabel 3.5

Uraian Capaian Kinerja, Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan
Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan Dan Transmigrasi				Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
1	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga yang difasilitasi di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	Masih belum maksimalnya Monitoring dan Pembinaan terhadap Lembaga Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi dan belum rampungnya Pemyusunan AD/ART Poktan	Peningkatan dukungan SDM dan anggaran dalam Pembinaan Lembaga Satuan Pemukiman Kawasan Transmigrasi serta pendampingan langsung ke Poktan bersama penyuluh setempat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
2	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	88 Orang yang difasilitasi memperoleh Layanan Sosial Budaya di Satuan Permukiman/Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi	1. Penyesuaian budaya warga transmigran setempat dengan transmigran asal 2. Masih kurangnya jumlah tenaga lintas sector (Pendidikan dan Kesehatan)	1. Dilakukan sosialisasi mempertemukan warga baik setempat maupun asal 2. Penambahan jumlah tenaga lintas sector (Pendidikan dan Kesehatan) 3. Melakukan Penyuluhan serta pembinaan terkait usaha ekonomi warga transmigran	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
3	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	15 KK difasilitasi Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi	1. Sarana Transportasi Umum yang belum maksimal untuk mencapai Lokasi Kawasan Transmigrasi 2. Minat transmigran local sangat besar namun terbatasnya kuota calon warga transmigran yang diberikan oleh Kementerian	1. Peningkatan Fasilitasi Transportasi dan akses jalan ke Wilayah Kawasan Transmigrasi 2. melakukan Upaya penambahan kuota calon warga transmigran	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Bantuan Keluarga	107 orang Transmigran yang Mendapatkan Bantuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan	Terbatasnya Tenaga/petugas pada bagian logistic dan Gudang	Memaksimalkan petugas yang tersedia dengan Menyusun jadwal pembagian jadup	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
5	Bantuan Peralatan / Sarana	1 Paket Bantuan Sarana Produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP berupa bantuan Bibit Tanaman Hortikultura serta pupuk dan Saprodi untuk lahan pekarangan	Kouta Pupuk yang dibagikan belum mencukupi untuk kebutuhan lahan pekarangan warga	Penambahan volume dan kuota Pupuk dan Saprodi sesuai dengan kebutuhan warga	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
6	Sarana Pengembangan Kawasan	47 Unit Sarana Penunjang yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	Distribusi Air bersih ke warga belum merata dan maksimal yang disebabkan kurangnya debit air pada saat musim kemarau	Meningkatkan Sarana Air Bersih (SAB) pada Kawasan Transmigrasi berupa Penambahan penampungan Air Bersih	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
7	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1 km Panjang jalan Lingkungan pada kawasan transmigrasi yang dibangun	Sarana Transportasi umum dan akses jalan yang belum maksimal untuk mencapai Lokasi Kawasan Transmigrasi	Mengusulkan peningkatan akses jalan ke Pemerintah Pusat melalui kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
8	Prasarana Pengembangan Kawasan	15 Km ² Luasan pengembangan Kawasan terkait pengukuran lahan	Adanya claim lahan secara sepihak oleh Masyarakat setempat		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
II	Program Dukungan Manajemen	1 Layanan			Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	-	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Luwu Timur
III	Program Ketersediaan, Akses dan Komsumsi Pangan Berkualitas				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	Tersalurnya Pengadaan Alsintan (hand Sprayer 572 Unit, Hand Traktor Roda Dua 73 Unit, MistBlower 50 Unit, Transplanter 10 unit, alko 10 unit dan Cultivator sebanyak 1 unit.	Masih banyak petani penerima bantuan tidak memelihara bantuan tersebut dengan baik.	Telah dilakukan sosialisasi dan Peningkatan SDM Petani terkait pengelolaan dan pemanfaatan alsintan .	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
2	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	1 unit	-		Dinas Pertanian dan



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
3	Koordinasi [Base Line]	19 unit	-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
4	Bimtek/Monitoring dan Evaluas Lingkup Pupuk dan Pestisida	Tersalurnya pupuk subsidi sesuai kouta dan tepat sasaran sesuai e aloaksi.	Masih rendahnya petani menebus pupuk subsidi yaitu jenis pupuk NPK Formula khusus kakao, hal ini disebabkan karena harganya mahal.	Sosialisasi terkait Kredit dana KUR untuk keperluan Saprodi Bagi Petani.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
5	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Base Line)				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
6	Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi dan divalidasi	Telah diverifikasi dan validasi pupuk besubsidi yaitu Pupuk Urea sebanyak 12.679, 529 Ton, PUPUK NPK Phonska sebanyak 16.685,117 Ton sedangkan Pupuk NPK Khusus sebanyak 4.158,917 Ton	Masih Ada data yang tidak sesuai didukcapil yaitu , Nama, Jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir, sehingga mempengaruhi usulan kebutuhan kuota pupuk besubsidi di luwu timur	Penyuluh Pertanian Lapangan memfasilitasi petani agar memperbaiki data yang ada di kartu keluarga yang belum valid di dukcapil	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
IV	Program Dukungan Manajemen	1 Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Layanan Manajemen Keuangan		-	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
V	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	Sarana Pengembangan Kawasan tanaman tahunan dan penyegar	Intensifikasi tanaman kakao seluas 100 hektar		-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
2	Kawasan Kakao				
3	Intensifikasi Tanaman Kakao				
4	Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan				
VI	Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman	Pemeliharaan Kebun Entres Kakao Seluas 1 hektar	Tidak dapat terlaksana karena adanya Refocusing Anggaran		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perkebunan				Kab. Luwu Timur
	Penguatan perbenihan tanaman perkebunan				
	Sarana Pengembangan Kawasan (Base Line)				
	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan				
	Pemelihara Kebun Sumber Benih Unggul Lokal			Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan	
VII	Program Dukungan Manajemen				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
1	dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan			-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
3	Layanan Manajemen Satker Daerah				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
4	Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran Satker				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya	Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Ekonomi Desa Dalam Pembangunan Desa			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hukum Adat yang sama dalam Daerah				
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	(1) Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi TP-PKK Kabupaten, (2) Jumlah Pembinaan TP-PKK Kabupaten, (3) Jumlah TP-PKK Yang Di Monitoring dan Di Evaluasi			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Peningkatan Derajat Pendidikan Perempuan dan Keluarga				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	- Sosialisasi Pelayanan Urusan Sosial				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Belanja Makanan dan Minuman pada Sosialisasi Pelayanan Urusan Sosial				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Makanan tambahan stunting	Pemberian makanan tambahan bagi balita stunting sebanyak 800 paket	kegiatan ini tidak terealisasi karena mengantisipasi makanan yang akan dibawa ke wilayah yang jaraknya jauh dan/atau sebelah danau sudah tidak layak makan dikarenakan harus memakai catering 1 vendor	Diharapkan pada juknis BKK Stunting selanjutnya belanja makanan langsung diberikan kepada petugas gizi yang ada di desa masing2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Belanja makanan dan minuman rapat Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Gizi buruk				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Makan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Snack				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	- Belanja Persediaan untuk di jual/di serahkan ke masyarakat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Pemberian Makanan Tambahan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Balita		-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	- Susu Bubuk 400 Gram	Pemberian susu balita selama 1 bulan	Susu ibu hamil dan susu balita di ekatalog tidak ada dijual perkotak, yang ada atau tersedia hanya dalam bentuk saset. Sehingga yang terealisasi volume saset, namun pemberian susu kepada Balita dan Ibu Hamil tidak berkurang berdasarkan jumlah gram yang dianggarkan	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	- Vitamin Becafort	Pemberian Vitamin kepada balita selama 3 bulan	Anggaran berdasarkan DPA untuk Pengadaan multi vitamin balita becafort sebesar Rp. 35.000,- perbotol sedangkan di e katalog harga yang ada sebesar Rp. 17.524,- sehingga sangat memungkinkan mendapatkan 2 (dua) botol dan lebih dalam penanganan balita terindikasi stunting.	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Bumil				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	- Susu Bumil	Pemberian susu ibu hamil selama 1 bulan	Susu ibu hamil dan susu balita di ekatalog tidak ada dijual perkotak, yang ada atau tersedia hanya dalam bentuk saset. Pemberian susu kepada Balita dan Ibu Hamil tidak berkurang berdasarkan jumlah gram yang dianggarkan	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	
17	- Vitamin Canna Pola	Pemberian susu ibu hamil selama 1 bulan	Multivitamin ibu hamil yang ada pada e katalog dalam bentuk kapsul, tidak ada tersedia dalam bentuk botol/kotak.	Untuk mendapatkan target dan sasaran yang tepat maka dilakukan perubahan harga satuan dan jumlah sasaran sesuai data program dan referensi harga barang di ekatalog LKPP dengan mempertimbangkan nilai TKDN produk maka di lakukan perubahan terhadap anggaran yang terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang termuat dalam JUSTIFIKASI TEKNIS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dan Penggandaan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Pengadaan Media Kampanye dan Media Pembelajaran				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Spanduk	Sasaran 3 lembar perkecamatan	Sebagai media kampanye dalam percepatan penangan stunting	Spanduk dibagikan di setiap kecamatan untuk dipasang pada tempat strategis atau ditempat yang sering dikunjungi masyarakat.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Baliho	Sasaran 1 lembar	Sosialisasi stunting		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23	Papan Nama Rumah Gizi	1 buah papan nama	Tanda pengenal rumah gizi	Batara Guru Desa Puncak Indah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



LPPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian Capaian Kinerja	Hambatan/ Permasalahan	Upaya Upaya Penyelesaian	Perangkat Daerah yang Melaksanakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	Meja Kerja Petugas Gizi	Sasaran 2 petugas dirumah gizi	Ruang kerja petugas dirumah gizi	untuk digunakan petugas di rumah gizi pada saat pelayanan kepada anak atau ibu hamil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	Kursi Kerja Petugas Gizi	Sasaran 2 petugas dirumah gizi	Ruang kerja petugas dirumah gizi	untuk digunakan petugas di rumah gizi pada saat pelayanan kepada anak atau ibu hamil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga secara minimal berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Capain Penerapan standar pelayanan Minimal Kabupaten Luwu timur adalah sebagai berikut:

4.1. Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur,

4.1.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan pendidikan adalah sebagai berikut

- 1) Pendidikan Dasar
- 2) Pendidikan Kesetaraan
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target capaian penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2023 :

- 1) Pendidikan Dasar target capaian SPM 100 % Setiap Tahun
- 2) Pendidikan Kesetaraan target capaian SPM 100 % Setiap Tahun
- 3) Pendidikan Anak Usia Dini target capaian SPM 100 % Setiap Tahun

4.1.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Pendidikan bersumber dari APBD dan APBN tahun 2023 sebesar Rp.119.436.143.293 dengan besaran Realisasi Anggaran sebanyak Rp.118.022.596.486 (98,82 %) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Pendidikan 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja Indikator Capaian	Anggaran		(%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	6	7	8
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Rp.104.122.568.893	Rp.101.810.576.505	97,82%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)			
		Jumlah Anak usia 7-15			



		Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan			
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Rp.3.369.776.000	Rp.3.368.663.160	99,97%
		Jumlah Anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dalam pendidikan kesetaraan			
		Jumlah Anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Rp.11.943.798.400	Rp.12.843.355.821	107,53 %
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD			
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan			
TOTAL		Rp.119.436.143.293	Rp.118.022.592.486	98,82%	

4.1.4. Dukungan Personil

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana Pendidikan yang ada. Jumlah personil pada tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Dukungan Personil Urusan Pendidikan

No	Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah	Ket
1	2	3	4
1	Pejabat Struktural	15	1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 6 Kepala Seksi, 3 Kasubag
2	Staf / Tenaga Administrasi	9	Staf PNS



3	Fungsional	20	18 Pengawas, 1 Fungsional SDM dan 1 Pamong Budaya
---	------------	----	---

4.1.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan pendidikan tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi target SPM urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Capaian	URAIAN KINERJA		
			Target (%)	Batas Waktu	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)	100	Setiap Tahun	63,87 %
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, MP/MTs)			7452
		Jumlah anak usia 7-15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan			11.667
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	98,68 %
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar dalam pendidikan kesetaraan			53.676
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan			54.391
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100 %
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD			563
		Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan			563



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- a. Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal,
- b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar PAUD,
- c. Masih minimnya kesadaran serta pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dimana pada usia tersebut adalah usia pertumbuhan anak atau yang disebut Golden ages,
- d. Penempatan tenaga pendidik belum dilakukan secara merata,
- e. Masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas walaupun secara rasio berdasarkan jumlah keseluruhan, jumlah guru dan siswa masih cukup baik dengan Rasio Guru dan Murid SD/MI sebesar 1 : 22 dan SMP/MTs sebesar 1 : 27 dan;
- f. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang belum memadai,
- g. Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi guru) serta;
- h. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menganalisis dan mengolah data pada satuan Pendidikan

2) Solusi

- a. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai Standar pelayanan minimal pada jenjang TK/ PAUD, SD, dan SMP dengan mengalokasikan/menambah anggaran dibidang Pendidikan,
- b. Pemenuhan perlengkapan dasar PAUD perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram,
- c. Perlunya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk pemeratan guru pada satuan pendidikan,
- d. Pemberian upah guru yang masih berstatus honorer untuk semua jenjang,
- e. Memberikan pelatihan kepada guru melalui kegiatan KKG, MGMP dan Pelatihan Tutor untuk jenjang kesetaraan,
- f. Bantuan biaya pendidikan untuk peserta didik jenjang TK, SD dan SMP melalui dana BOP dan BOS,



- g. Bantuan seragam sekolah untuk peserta didik baru pada jenjang SD dan SMP,
- h. Pendampingan proses akreditasi bagi jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan Kesetaraan.

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Bidang urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

4.2.1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan kesehatan balita
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif,
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

4.2.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan tahun 2023 :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 4) Pelayanan kesehatan balita, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun



-
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
 - 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
 - 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
 - 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun
 - 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), target capaian Penerapan SPM 100% Setiap Tahun.

4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Kesehatan bersumber dari APBD (BOK) tahun 2023 sebesar Rp.17.711.778.772 dan realisasi sebesar Rp.16.690.363.201, (94,23%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Kesehatan 2023

No.	Jenis pelayanan dasar	Alokasi biaya		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp.3.196.865.500	Rp.2.775.380.055	86,82 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp.6.073.517.000	Rp.5.995.760.000	98,72 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp.155.485.000	Rp.141.997.500	91,33 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp.4.853.116.800	Rp.4.661.263.230	96,05 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp.883.100.800	Rp.798.846.782	90,46 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp.747.018.240	Rp.694.518.500	92,97 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp.472.562.500	Rp.456.331.860	96,57 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp.126.710.144	Rp.122.964.500	97,04 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus	Rp.275.380.144	Rp.225.382.500	81,84 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp.238.130.144	Rp.223.052.400	93,67 %



11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Rp.453.112.500	Rp.380.617.174	84,00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Teninfeksi HIV	Rp.236.780.000	Rp.214.248.700	90,48 %
	Total	Rp.17.711.778.772	Rp.16.690.363.201	94,23 %

4.2.4 Dukungan Personil

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Dinas Kesehatan sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Dinas Kesehatan dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang tetap dilingkup Dinas Kesehatan pada tahun 2023 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 4.5
Dukungan Personil Urusan Kesehatan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	PERSONIL DINAS KESEHATAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4
	Pejabat Struktural	8	
	Staf/Tenaga Administrasi	22	
	Fungsional	939	
	TOTAL	969	

4.2.5 Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Kesehatan tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Realisasi target capaian SPM
Urusan Bidang Kesehatan

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal	Sasaran dalam Tahun	Target (%)	Jumlah yang terlayani	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	5130	100	4911	95,73
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	4910	100	4908	99,96



	persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	4906	100	4819	98,23
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	29.650	100	27.283	92,02
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	11.616	100	11.616	100
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	119.162	100	119.162	100
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	18.809	100	15.659	83,25
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	47.465	100	47.465	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus				
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5262	100	5262	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota	553	100	553	100



	yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun				
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB				
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3488	100	3488	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV				
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasylakes dalam kurun waktu satu tahun	5804	100	5804	100

4.2.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1) Kendala dan Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan belum mencapai target, karena masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibu tidak segera memeriksakan kehamilannya, serta adanya kehamilan pada usia dini
- b. Masih ada persalinan yang ditolong dirumah karena si ibu tidak mau melahirkan di fasilitas kesehatan.
- c. Adanya kematian neonatal yaitu sebanyak 54 kasus, ada beberapa neonatal yang tidak datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk control bayinya, serta ada beberapa bidan yang bidan desanya kurang aktif melakukan kunjungan rumah, ibu bayi pulang kampung atau pindah domisili sehingga tidak dipantau Kesehatan bayinya.
- d. Masih ada balita yang tidak berkunjung lagi ke posyandu jika sudah lengkap imunisasinya
- e. Kurangnya strip pemeriksaan kolesterol yang merupakan salah satu indikator pelayanan Kesehatan usia lanjut sesuai standar

2) Solusi

- a. Pencegahan perkawinan usia dini dan Peningkatan KIE tentang Kesehatan reproduksi pada remaja
- b. Meningkatkan KIE kepada ibu hamil agar melahirkan di fasilitas Kesehatan.
- c. Penyediaan sarana mobilitas untuk menjemput dan mengantar pulang ibu yang bersalin di puskesmas.



- d. Pendampingan 1000 HP, mulai dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun oleh bidan, jadi semua bidan harus ada ibu hamil/bayi yang didampingi.
- e. Pemberdayaan kader untuk menggerakkan masyarakat yang punya balita agar dibawa ke posyandu setiap bulannya.
- f. Bidan desa aktif melakukan kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.
- g. Pengadaan strip kolesterol sesuai jumlah warga lanjut usia

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bidang urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Bidang urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut

Target capaian SPM.

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

4.3.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 :

- 1) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

4.3.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar Rp.17.292.926.275,00 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan realisasi sebesar Rp Rp.16.553.438.155,00 (Enam Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), persentase realisasi, sebanyak (95,72 %), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	4	5	6
Penyediaan Kebutuhan pokok air	Program Pengelolaan dan Pengembangan	10.182.251.121,00	9.895.907.423,00	97,19%



minum sehari-hari	Sistem Penyediaan Air Minum			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.182.251.121,00	9.895.907.423,00	97,19%
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	615.307.723,00	608.550.291,00	98,90%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	677.224.000,00	653.075.782,00	96,43%
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.373.718.328,00	4.330.017.083,00	99,00%
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	829.000.000,00	813.106.598,00	98,08%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.687.001.070,00	3.491.157.669,00	94,69%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.110.675.154,00	6.657.530.732,00	93,63%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.110.675.154,00	6.657.530.732,00	93,63%
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan	6.806.435.154,00	6.535.328.802,00	96,02%



	Setempat			
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Ninja	304.240.000,00	122.201.930,00	40,17%
	JUMLAH	17.292.926.275	16.553.438.155,00	95,72

4.3.4. Dukungan Personil

Jumlah aparat yang membidangi urusan pekerjaan umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang . Untuk mengetahuinya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.8
Dukungan Personil Urusan Pekerjaan umum
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	PERSONIL URUSAN PEKERJAAN UMUM	JUMLAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Struktural :		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretaris	1	
	Kepala Bidang	5	
	Kepala Sub Bagian	3	
	Kepala Tata Usaha	4	
2	Staf/Tenaga Administrasi		
	Staf PNS	54	
	Staf Upah Jasa/ Honorer	48	
3	Fungsional :	16	

4.3.5. Hasil Capaian

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis pelayanan dasar (Indikator Capaian SPM)	Uraian kinerja		
		Jumlah Penduduk	Jumlah yang dilayani	Realisasi (%)
1	2	3	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum	953	953	100
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).	953	953	100



2	Penyediaan pengelolaan air limbah domestik	688	688	100
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	688	688	100
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	688	688	100

4.3.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

- 1) Kendala
 - a. Dukungan Anggaran
 - b. Dukungan Personil pada bidang yang menangani Penyediaan kebutuhan pokok Air minum dan Penyediaan pengelolaan air limbah domestik
- 2) Permasalahan
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
 - b. Terdapat sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana
 - c. Terdapat aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan
- 3) Solusi.
 - a. Dukungan anggaran perlu ditingkatkan
 - b. Diperlukan tambahan personil pada bidang yang menangani SPM
 - c. Diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun
 - d. Diperlukan penanganan terhadap sarana SPAM yang mengalami kerusakan akibat bencana,
 - e. Diperlukan dukungan BBWS dan BPPW untuk penanganan aset bangunan SPAM yang penanganannya merupakan kewenangan BBWS dan BPPW Provinsi Sulawesi Selatan

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Bidang urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut;

- 1) Penyediaan & reabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah



4.4.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2023 :

- 1) Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten, target capaian SPM 100% Setiap Tahun,
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

4.4.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat bersumber dari APBD Tahun 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp. 26.925.500, belanja modal tanah untuk Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp. 500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 146.078.000, Badan Keuangan dan Aset Daerah realisasi untuk Bantuan Dana Darurat dan Mendesak Kepada Korban Bencana Kebakaran, Bencana Tanah Longsor dan Bencana Angin Kencang sebesar Rp.156.500.000 sesuai Surat keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 187/F-04/V/Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 156.500.000 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar ke 123 Desa masing-masing Desa 10 Unit Total 1230 Unit dengan Alokasi Anggaran Rp. 15.000.000 Per Unit dengan Total Rp. 18.450.000.000 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.10
Anggaran Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Biaya		
		Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi bencana Kabupaten	34.500.000	34.500.000	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	500.000.000	146.078.000	29,22
		18.450.000.000	18.450.000.000	100

4.4.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.11
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Personil Urusan Perumahan Rakyat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
Pejabat Struktural			
1	Kepala Dinas	1	Kepala Dinas
2	Kabid Perumahan	1	PNS
3	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2	Fungsional
5	Staf Bidang Perumahan	1	Upah Jasa

4.4.5. Realisasi

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat tahun 2023 berdasarkan target telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Realisasi Target SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			
		Indikator Capaian	Jumlah Target	Jumlah yang dilayani	Realisasi (%)
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	2	2	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	1	100
			1230	1230	100

4.4.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

- Kurangnya alokasi anggaran untuk pendataan, sehingga identifikasi yang dilakukan masih bersifat makro.
- Belum tersedia basis data
- Tidak ada penetapan status bencana.

b. Permasalahan

- Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan korban bencana baru dilakukan setelah adanya penetapan bencana
- Data yang tersedia tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan inputansi data SPM bidang perumahan.



- Anggaran telah disiapkan, tapi tidak terealisasi karena tidak ada penetapan status bencana.
- c. Solusinya,
 - Perlu dilakukan identifikasi lokasi bencana lebih detail terhadap lokasi-lokasi rawan bencana yang telah ditetapkan.
 - Perlu dilakukan pembuatan baseline lokasi rawan bencana.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kesatuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) serta Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan standar pelayanan minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 yakni:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana target capaian SPM 100% Setiap Tahun



5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, target capaian SPM 100% Setiap Tahun.

4.5.3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar **Rp.14.132.085.715** dan realisasi sebesar **Rp.13.521.314.121**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13
Alokasi Anggaran
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Biaya		
		Anggaran	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.7.795.973.040	Rp. 7.583.233.351	97,27%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Rp. 196.640.642	Rp. 136.888.800	70,33%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp. 480.740.600	Rp. 300.456.700	62,50%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 797.928.000	Rp. 713.212.800	89,38%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Rp 4.862.803.433	Rp 4.787.522.470	98,45 %

4.5.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil dalam penerapan SPM Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Dukungan Personil Penerapan SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	PERSONIL SATPOL, DAMKAR & BPBD	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	Pejabat Struktural		
	- Eselon II	1 orang	



	- Eselon III	11 orang	
	- Eselon IV	24 orang	
2	Staf (Jabatan Pelaksana)	18 orang	
3	Fungsional	16 Orang	
4	Tenaga Upah jasa	351 orang	
5	Tenaga PPPK Dinas Damkar dan penyelamatan	4 orang	

4.5.5. Realisasi

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2023 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Realisasi Target capaian SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar (Indikator Standar Pelayanan Minimal)	Jumlah Orang yang berhak dilayani	Jumlah Orang yang dilayani	Realisasi (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	853	853	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	302.039	276.254	91,46%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	302.039	302.039	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.283	1.283	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan			



Evakuasi Korban Kebakaran	138	138	100%
Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			

Catatan:

- 1) Untuk Capaian dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan berasal dari pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 250 org, Penyampaian informasi melalui PUSDALOPS BPBD, Penyebaran informasi melalui FB, IG 1.895 org, Penyampaian informasi melalui Papan himbauan informasi bencana dan rambu-rambu peringatan bencana yang ditempatkan di 10 kecamatan yang berpotensi tersampaikan kepada 274.359 org dengan akumulasi secara keseluruhan sebesar 276.254 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa (baseline data). Capain yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum memiliki papan himbauan peringatan dini bencana karena kondisi papan himbauan yang sebelumnya rusak berat,
- 2) Capaian dari Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berasal dari pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (Pelatihan TRC) sebanyak 43 org, pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi sebanyak 50 org, pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 250 org. Selain itu terdapat penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat Ina TEWS untuk mendeteksi gempa bumi yang berpotensi tsunami yang disebabkan oleh sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur. Alat ini ditempatkan di kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa(baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%.
- 3) Capaian dari Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui perhitungan jumlah korban bencana bulan Januari s.d Desember 2023 sebanyak 1.283 jiwa (633 laki-laki dan 650 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi.

4.5.6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

1. Untuk pelayanan dasar dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada berdasarkan tabel diatas dihitung berdasarkan jumlah



kasus penegakan perda/perkada yang dilaporkan dan ditangani selama Tahun 2023 dimana terdapat 853 kasus pelanggaran perda yang di laporkan dan semua kasus dapat ditangani. namun dari penegakan perda/perkada tersebut tidak ada warga Negara yang terkena dampak kerugian materil maupun pelayanan pengobatan akibat dari penegakan perda dan perkada sehingga capaian 100

Kendala, Permasalahan dan Solusi

2. Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhinya. Selain anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang
3. Dalam Penginputan capaian SPM juga masih terjadi perbedaan persepsi terkait indikator kinerja layanan SPM
4. Meskipun capaian layanan dasar SPM Trantibum terealisasi 100% namun kendala yang dihadapi ada dalam pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM trantibum. Pemenuhan Mutu layanan ini belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhinya. Selain anggaran dukungan personil yang memiliki SDM yang berkualitas juga masih kurang,
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana,
6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada,
7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis,
8. Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas yang baru mandiri pada tahun 2022, dimana sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Dinas Satpol PP dan Damkar. Untuk itu kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan masih sangat terbatas, baik itu sarana prasarana, sumber daya manusia, dan jumlah anggaran

b. Permasalahan

- 1) Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kepada masyarakat maka Satpol PP Kabupaten Luwu Timur menempatkan personil di Kecamatan. Namun pelayanan ini tidak dapat maksimal dilakukan mengingat personil Satpol PP di Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang PNS pelaksana Satpol PP selain itu, SDM Aparatur Satpol PP di Kecamatan masih terbatas bahkan sarana dan prasarana dikecamatan belum memadai
- 2) Keterbatasan Anggaran/pembayaran penanggulangan bencana,



- 3) Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat dan data base terkait jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana masih skala desa,
- 4) Kabupaten Luwu Timur mempunyai luas wilayah yang cukup luas, sehingga Untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat maka diperlukan penambahan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran), dimana waktu tanggap/respon time akan jauh dari target karena pelayanan yang sangat jauh dan luas.
- 5) kondisi Dinas Damkar dan Penyelamatan yang masih sangat terbatas sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Damkar yang tugas pokok dan fungsi adalah urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan Dinas Damkar saat ini yang sangat diperlukan adalah mobil pemadam kebakaran yang masih sangat kurang, mobil suplay (tangki) serta alat pelindung diri (APD) untuk personal.

c. Solusi

Dari Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di atas maka berikut beberapa alternatif pemecahan masalah :

1. Melakukan Koordinasi dengan TPAPD kab. Luwu Timur dan mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka pemenuhan peningkatan mutu layanan SPM Trantibum;
2. Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial,
3. Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
4. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
5. Melakukan pengumpulan data base ditingkat dusun,
6. Memaksimalkan pendampingan desa terkait pelaksanaan Mitigasi Bencana di tingkat desa melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) dan Dana Desa,
7. Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan,
8. Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya,
9. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG,
10. Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan,
11. Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana,



-
12. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur,
 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi pada dirjen bina pembangunan daerah terkait indikator dan capaian kinerja SPM;
 14. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Satpol PP untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
 15. Membentuk UPTD Satpol PP kecamatan,
 16. Memenuhi Sarana dan Prasarana secara bertahap
 17. Diperlukan pengadaan mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki, minimal 1 unit mobil Damkar untuk 1 Kecamatan, yang sampai saat ini masih ada 2 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kab. Luwu Timur yang belum memiliki WMK/ posko Damkar dan Penyelamatan yaitu Kec. Nuha dan Kec. Mangkutana, Juga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas, dan peningkatan sumber daya aparatur pemadam kebakaran, dimana sangat disadari bahwa untuk mencukupi semua itu tentunya diperlukan anggaran yang besar.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten

4.6.2. Target Capaian SPM

Target capaian penerapan SPM urusan sosial tahun 2023:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti target capaian SPM 100% Setiap Tahun,
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, target capaian SPM 100% Setiap Tahun
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten, target capaian SPM 100% Setiap Tahun



4.6.3. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Sosial bersumber dari APBD tahun 2023 sebesar Rp. 1,366,352,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,309,973,120,- (95,87%), dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran
Urusan Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Biaya		
		Alokasi	Realisasi	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Rp.855.699.900	Rp. 842.615.230	98.47 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Rp.31.025.000	Rp.30.464.000	98.19 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Rp.855.699.900	Rp.842.615.230	98.47 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Rp.193.155.000	Rp.184.896.670	95.72 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Rp.286.472.100	Rp.251.997.220	87.97

4.6.4. Dukungan Personil

Adapun dukungan personil dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.17
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial

NO	PERSONIL DINAS SOSIAL P3A	JUMLA H	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pejabat Struktural :		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretaris Dinas	1	
	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	1	
	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	
	Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1	
	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	
	Kasubag Umum dan keuangan	1	
	Kepala UPTD PPA	1	



2	Staf/Tenaga Administrasi		
	PNS	5	
	Non PNS	25	
3	Fungsional :		
	Pekerja Sosial Ahli Muda	2	
	Analis Kebijakan	2	

4.6.5. Realisasi

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal urusan urusan sosial tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.18
Realisasi Target SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran dalam Tahun	Jumlah yg terlayani	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti			
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	50	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti			
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	5	5	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti			
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	30	30	98%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	3	3	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten			
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	200	200	100%



4.6.6. Kendala, Permasalahan dan solusi

a. Kendala

- Belum adanya Rumah Singgah
- Belum dibentuknya TRC Ketelantaran

b. Permasalahan

- Belum adanya kegiatan pendataan khusus target penerima layanan SPM
- Minimnya anggaran yang ada untuk mendukung tercapainya target SPM

c. Solusi

- Melaksanakan pendataan PPKS Target SPM;
- Mengusulkan penambahan anggaran pada program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran tahunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Data yang termuat dalam laporan ini telah direview oleh inspektorat dalam rangka Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan LPPD.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepala Daerah ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023.





**TIM PENYUSUN LPPD
SEKRETARIAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Jl. Soekarno-Hatta, Malili, Luwu Timur, Sulsel

www.luwutimurkab.go.id

Email:sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id